

BIANGLALA BUDAYA

100 Tahun (1918-2018)
Kongres Kebudayaan
Menuju Kemajuan
Kebudayaan Bangsa

CATATAN REKAM JEJAK

Nunus Supardi

5/5



BIANGLALA BUDAYA

KONGRES KEBUDAYAAN

Jilid
lima 05/05

NUNUS SUPARDI

Bianglala Budaya Jilid 5:

Catatan Rekam Jejak

©Nunus Supardi

Cetakan Pertama, November 2018

Penyunting

Ining Isaiyas

Perancang Sampul

Febrian Adi Putra

Perancang Infografis

Ashief Mutammimul Husna

Penata Letak

Jane Verawati

Ilustrasi

Ashief Mutammimul Husna

Foto sampul: Residen Yogyakarta dan Hamengku Buwono VIII, 1935, koleksi Museum Negeri Sonobudoyo.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

SUPARDI, Nunus

Bianglala Budaya Jilid 5:

Catatan Rekam Jejak

Jakarta; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

XVIII + 115 hlm.; 21 cm x 15 cm

**Untuk memperingati 100 tahun Kongres Kebudayaan (1918-2018)
menuju kemajuan kebudayaan bangsa**

Daftar Isi

Sekapur Sirih	VI
Pengantar Edisi Kedua	IX
Prakata Pemulung	XIII
Bab 1: Pendahuluan	02
Bab 2: Hubungan Antarkongres	04
Hubungan Tema dan Pokok Bahasan dalam Kongres Kebudayaan	05
Hubungan Kongres Kebudayaan dan Kongres-kongres Lainnya	37
Bab 3: Realisasi Hasil Kongres	64
Bab 4: Relevansi Kongres Kebudayaan 1918	90
Kesadaran Berbangsa dan Kesadaran Berbudaya Bangsa	91
Kongres Kebudayaan Tonggak Sejarah Budaya Bangsa	96
Bab 5: Penutup	106
Daftar Pustaka	113
Tentang Penulis	114

Hilmar Farid

Direktur Jenderal Kebudayaan

Republik Indonesia

B*ianglala Budaya* karya Nunus Supardi ini sudah diterbitkan beberapa kali dalam versi-versi yang terus dimutakhirkan, mengikuti perkembangan penyelenggaraan kongres-kongres yang membahas permasalahan dan visi pembangunan kebudayaan Indonesia. Buku ini merupakan sebuah kompilasi catatan penting, yang telah berhasil memaparkan runutan periodik tentang bagaimana berbagai pemikiran dan perdebatan soal kebudayaan mengemuka pada setiap zaman. Buku ini tentunya merekam berbagai usaha menjawab tantangan zaman seiring dengan perkembangan masyarakat dan institusi negara. Sebagai kompilasi catatan, buku ini menyediakan pintu-pintu ke ratusan sumber sejarah untuk terus kita gali kembali dalam upaya merumuskan visi besar pemajuan kebudayaan Indonesia masa depan.

Penerbitan *Bianglala Budaya* dalam versi yang diperbarui tahun 2018 ini merupakan penanda bagi tiga momen penting dalam kronik panjang perjalanan kongres kebudayaan di Indonesia.

Momen pertama adalah peringatan 100 tahun diselenggarakannya *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* pada 5-7 Juli 1918 di Surakarta. Kongres tersebut kemudian disepakati sebagai kongres pertama (masa prakemerdekaan) yang membicarakan, mengulas, dan memperdebatkan permasalahan-permasalahan budaya dari perspektif kebangkitan nasional, meski hanya spesifik kebudayaan Jawa. Dipengaruhi imbas besar *Ethische Politiek* dasawarsa sebelumnya, kongres ini mengedepankan pembahasan tentang kesadaran akan “ketimuran”, kebutuhan untuk mengejar peradaban Barat, pentingnya pendidikan terbuka bagi rakyat, sampai perumusan visi

pengembangan budaya Jawa. Kongres yang diketuai oleh R. Sastrowidjono ini telah membuka kotak Pandora wacana kebudayaan di kalangan para pendiri republik ini.

Momen kedua adalah peringatan 70 tahun diselenggarakannya Kongres Kebudayaan pertama setelah berdirinya Republik Indonesia, yang terjadi di Magelang pada 20-24 Agustus 1948. Diketuai oleh Mr. Wongsonegoro dengan dukungan Mr. Ali Sastroamidjojo (sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RI), kongres diselenggarakan tidak lama sebelum agresi militer Belanda kedua pada akhir 1948. Bisa dibayangkan betapa tidak stabilnya keadaan saat itu, dan tetap saja kongres ini dilaksanakan dengan fasilitas serba terbatas; dengan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, segenap anggota kabinet, serta budayawan dan seniman. Kongres inilah yang berhasil memberikan rekomendasi awal tentang pentingnya kebudayaan dalam pembangunan manusia Indonesia dan bagaimana posisi negara dalam mewujudkan hal tersebut.

Momen ketiga adalah diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Jakarta, 5-9 Desember 2018. Kongres ini adalah kongres kebudayaan pertama yang diselenggarakan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lahirnya undang-undang tersebut mengubah posisi negara dan relasinya dengan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Strategi Kebudayaan harus disusun dari proses pendataan dan perdebatan secara *bottom-up* dari tingkat kabupaten/kota, naik ke tingkat provinsi, untuk

kemudian dirumuskan di tingkat nasional. Kali ini, Strategi Kebudayaan tidak dilahirkan oleh para pemikir besar, tapi merupakan hasil konsolidasi pemikiran atau hasil kecerdasan kolektif para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dari seluruh pelosok negeri. Dalam kongres ini juga untuk pertama kalinya Strategi Kebudayaan yang dirumuskan memiliki kekuatan hukum melalui penetapan oleh Presiden, yang kemudian akan menjadi dasar penyusunan dokumen-dokumen teknokratik kerja pemerintah seperti RPJPN, RPJMN, sampai RKP dan RKPD. Dengan kata lain: untuk pertama kalinya perspektif kebudayaan menjadi dasar pembangunan nasional.

Ketiga momen penting ini layak kita rayakan bersama. Melalui buku yang disunting kembali menjadi lima jilid ini, saya berharap kita semua dapat mempelajari riwayat kongres kebudayaan di Indonesia dan ikut merayakan ketiga momen penting itu lewat partisipasi dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Jakarta, 10 November 2018

Pengantar

Edisi kedua

Prof. Dr. Fuad Hassan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1985-1993

Banyak pendekatan dilakukan oleh para pemikir dan filosof untuk menjelaskan pembeda utama antara manusia dan hewan. Ada yang menekankan pembeda utama itu pada kecerdasan, ada pula yang menekankan pada ketangkasan-ketangkasan yang membuat manusia bisa melompat dari satu tahap kesanggupan ke kesanggupan lainnya. Namun, pada analisa akhirnya, pembeda utama antara kedua makhluk ini adalah adanya dimensi budaya dalam perkembangan manusia sebagai umat masyarakat maupun sebagai perorangan.

Hewan adalah makhluk alamiah murni. Mereka lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kaitan dengan lingkungan alamnya (*nature*). Manusia lahir, tumbuh, berkembang tidak hanya dalam kaitan dengan lingkungan alamnya, akan tetapi juga di bawah pengaruh lingkungan budayanya (*culture*). Demikian, maka ada alasan untuk menyebutkan, karena dalam kehidupan manusia itu berorientasi pada nilai budaya, maka hal itu menjadi keunggulannya di atas hewan. Kalau pada hewan orientasi itu ditekankan pada nilai bertahan diri (*survival*) belaka, pada manusia kehidupan dimaknai lebih dari sekedar bertahan diri; pada manusia orientasi dalam kehidupan diperluas oleh dimensi-dimensi yang memperkaya wawasan hidupnya seperti keindahan, keadilan, kesenangan.

Oleh karena adanya acuan pada nilai budaya itu, maka setiap bentuk kebersamaan manusia (misalnya dalam suku, masyarakat, bangsa), cenderung untuk berpedoman pada ukuran-ukuran (*nomos*) yang kemudian menjadi norma perilaku dalam kehidupan kebersamaan itu. Gagasan tentang baik-buruk, indah dan tidak indah, adalah gagasan-gagasan tentang skala

nilai-nilai, dan diterjemahkan dalam ukuran-ukuran norma sosial. Dengan demikian perikehidupan manusia mengacu pada aturan-aturan yang menjadi dasar konformisme sosial. Misalnya, ukuran tentang penggunaan tangan kiri dan tangan kanan adalah ukuran norma. Secara umum gambaran inilah yang menjadi pendukung dari sejarah peradaban.

Demikianlah, maka keunggulan manusia sebagai makhluk budaya menjelma dalam kehidupan yang beradab. Kita sebagai bangsa yang kebetulan atau ditakdirkan (*by incident*) meliputi beratus suku bangsa yang menggunakan beratus ragam bahasa dan menampilkan gaya hidup yang berakhir pada tradisi beragam, niscaya akan terus-menerus disibukkan oleh pemikiran tentang ikhtiar pengembangan kebudayaan Indonesia. Berpikir tentang pengembangan kebudayaan di Indonesia tidak akan berhenti dalam satu dua generasi. Kita harus menjalani kehidupan yang multikultural, dengan kesanggupan menyaksikan bahwa keberagaman itu justru kekayaan. Dasar yang diperlukan untuk sampai pada kesanggupan menjalani hidup dalam keberagaman adalah kesanggupan untuk menempatkan keberagaman sebagai kekayaan, kesanggupan untuk saling kenal, saling mengerti dan saling menerima. Dengan kenyataan ini kita sudah betul-betul diwajibkan untuk tidak melepaskan perhatian kita terhadap ikhtiar pengembangan kebudayaan nasional. Dalam hal ini patut kita junjung tinggi wawasan para pendiri bangsa yang mencantumkan Pasal 32 dan Penjelasannya dalam UUD 1945. Dengan pencantuman itu menunjukkan bahwa sejak semula para pendiri bangsa telah menempatkan urusan pengembangan kebudayaan sebagai komitmen konstitusional.

Perlu dijelaskan di sini, komitmen itu tidak dapat diabaikan oleh karena alasan pengembangan kebudayaan nasional harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang bisa dipersoalkan adalah bagaimana cara-cara komitmen itu diwujudkan. Dan itu menjadi tantangan bagi kita semua yang berminat terhadap ikhtiar pengembangan kebudayaan nasional. Dalam kaitan ini kita harus menyadari bahwa proses pengembangan kebudayaan bukan berarti sekadar beralih dari segala yang lama ke segala yang baru.

Dinamika kebudayaan bukan merupakan proses singkir-menyingskirkan apa yang lama dan kemudian menggantinya dengan yang baru. Menarik sekali untuk dicermati bahwa dinamika kebudayaan merupakan penjelmaan dari pertentangan antara dua daya, yaitu daya pelestarian (*preservative*) dan pengembangan (*progressive*). Oleh karena itu, dalam pembahasan tentang kebudayaan nasional kita perlu mencurahkan perhatian pada berbagai ikhwal kebudayaan, yaitu mana yang perlu dilestarikan dan bagian lain yang mana yang perlu dimajukan. Misalnya, dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan adalah upaya itu dapat “*mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.*”

Dalam hubungan dengan berbagai permasalahan kebudayaan seperti digambarkan di atas, dapat dimengerti jika dalam rentang waktu yang panjang (1918-2003) telah terselenggara beberapa kali Kongres Kebudayaan. Himpunan dari berbagai kegiatan kongres yang pernah diselenggarakan, dalam sebuah buku, merupakan ikhtiar untuk menyajikan perkembangan pemikiran tentang kebudayaan Indonesia secara umum dari waktu ke waktu. Kalau kita cermat membaca perkembangan pemikiran itu, akan terlihat adanya benang merah, adanya harapan dan cita-cita yang selalu diungkap kembali di samping memperbincangkan hal baru yang kontemporer. Namun demikian, terdapat pula kesan bahwa usulan-usulan dan saran-saran yang lagi-lagi muncul, menunjukkan karena usulan itu tidak ditindaklanjuti oleh instansi-instansi dan fihak-fihak yang seharusnya usulan itu dapat dijadikan andalan. Dalam pelaksanaan Kongres Kebudayaan yang terakhir (2003) juga terdapat kesan bahan yang telah diuraikan dan disepakati merupakan ulangan dari kongres sebelumnya. Ulangan-ulangan pembahasan itu menggambarkan bahwa bahan-bahan yang telah terhimpun kurang dijadikan acuan, sehingga berlangsungnya kongres itu dapat merupakan forum yang memperbincangkan bab-bab baru yang terlepas dari bab sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau kemudian pada bidang-bidang kebudayaan diadakan kongres secara terpisah, seperti kongres Bahasa, Kongres Kesenian, yang fokusnya lebih jelas.

Dengan diupayakannya penerbitan buku ini patut disambut oleh khalayak pembaca yang berminat terhadap ikhtiar besar dalam mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan dihimpunnya bahan-bahan dokumenter Kongres Kebudayaan sepanjang 1918–2003, maka buku ini bisa menjadi sumber acuan yang komprehensif bagi peminat masalah budaya.

Jakarta, 6 Mei 2005

Prakata Pemulung

Pada 2018 ini, tepatnya tanggal 5 Juli 2018, Kongres Kebudayaan (Jawa) yang pertama resmi dibuka satu abad yang lalu. Kongres itu diberi nama *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, atau Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa. Pada dasarnya, inilah Kongres Kebudayaan (KK) I. Gagasan untuk menyelenggarakannya muncul dari seorang bumiputra, Pangeran Prangwadana atau Mangkunegoro VII. Kegigihan kaum bumiputra untuk mengganti pemerintah Batavia menyelenggarakan Kongres Bahasa (Jawa) menjadi Kongres Kebudayaan (Jawa) mencerminkan tumbuhnya kesadaran kaum terpelajar bumiputra untuk melawan hegemoni budaya penjajah Belanda yang berabad-abad mencengeram pikiran kaum bumiputra.

Pilihan pada kongres, sebagai ajang para pemangku kebudayaan untuk membahas berbagai permasalahan kebudayaan guna menghasilkan suatu kesepakatan pada masa penjajahan Belanda, mencerminkan betapa besarnya kesadaran kaum pergerakan dalam menyiapkan lahirnya bangsa baru yang berjati diri kebudayaan baru, kebudayaan Indonesia. Tumbuhnya kesadaran berbangsa ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908, sedangkan kesadaran berbudaya ditandai dengan KK 1918. Sepuluh tahun kemudian, bibit kesadaran itu tumbuh semakin besar dan membulat kuat. Melalui Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, hal itu secara bersama-sama diikrarkan sebagai suatu “sumpah” bersama untuk “mengaku berbangsa satu, Indonesia”, “bertanah air satu, Indonesia”, dan “menjunjung bahasa persatuan, Indonesia”. Tujuh belas tahun kemudian bangsa baru itu mencapai titik kulminasi, dengan gagah berani memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka, tepatnya pada 17 Agustus 1945.

Seratus tahun perjalanan KK kini telah meninggalkan rekam jejak yang sarat dengan konsep, kebijakan, dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa, seiring dengan kemajuan zaman. Tujuan utama penulisan buku ini, selain untuk memperingati 100 tahun berlangsungnya KK pertama, juga untuk mengangkat dan memperkenalkan berbagai kongres sebagai peristiwa budaya yang selama ini masih terabaikan. Kongres maupun konferensi kebudayaan luput dari perhatian kita, baik dalam hal makna keputusan kongres maupun tindak lanjut sebagai bentuk realisasi keputusan kongres. Banyak sekali ide, gagasan, saran, dan pendapat yang pernah dilontarkan oleh para pendahulu kita yang dapat dijadikan bahan renungan dalam menyusun konsep, kebijakan, dan strategi pemajuan kebudayaan masa-masa selanjutnya.

Bukti bahwa kebudayaan dan KK memiliki peran penting dalam membangun rasa kebangsaan dan memajukan kebudayaan bangsa bertebaran di mana-mana. Pemulungan data dimulai sejak 1991 pada saat diselenggarakan KK di Taman Mini Indonesia Indah. Hasilnya diterbitkan dalam bentuk cetak sederhana, "Kongres Kebudayaan 1918-2003", sebagai bahan bacaan KK 2003 di Bukittinggi. Setelah itu, pemulung terus memulung dan merevisi buku tersebut. Selain telah berlangsung enam belas kali KK, ada kongres berbagai unsur kebudayaan, seperti: bahasa (Indonesia dan daerah), sastra (Indonesia dan daerah), linguistik, kesenian, sejarah, arkeologi, prehistori, perbukuan, perpustakaan dll. Berikutnya juga kongres bidang-bidang lain yang bukan unsur kebudayaan tapi terkait erat dengan masalah kebudayaan, misalnya kongres Pancasila, kongres pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, diaspora Indonesia, kebudayaan pemuda, kebudayaan daerah, dll. Dari rekaman jejak berbagai kongres itu dapat diidentifikasi berbagai konsep, kebijakan, dan strategi untuk memajukan kebudayaan bangsa.

Kesemuanya itu merupakan serpihan-serpihan yang dapat dijadikan bahan pelengkap untuk menggambarkan perjalanan sejarah kebudayaan bangsa. Maraknya kongres dan konferensi kebudayaan dan unsur-unsurnya,

setelah memasuki era Reformasi, menunjukkan peningkatan kesadaran para pemangku kebudayaan. Masing-masing suku bangsa seperti saling berlomba untuk menyelenggarakan kongres sendiri-sendiri: Jawa, Sunda, Minangkabau, Madura, Bali, Banjar, Aceh, dll. Di bidang bahasa berlangsung kongres bahasa Aceh, Lampung, Madura, Cirebon, Tegal, Makassar, Gorontalo, Inyong Banyumas dll. Di bidang sastra berlangsung kongres sastra Indonesia, sastra Jawa, kongres cerita pendek Indonesia, dll. Selain itu, juga ditemukan berbagai data baru baik dalam bentuk teks, foto, atau gambar. Pada 2013 terbitlah buku edisi III berjudul *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013* dalam rangka menyongsong Kongres Kebudayaan Indonesia 2013. Untuk memperingati “100 Tahun Kongres Kebudayaan” dan menyambut KK 2018, pemulung pun menyiapkan data tambahan untuk melengkapi buku sebelumnya. Judul buku edisi IV ini mengalami penyesuaian menjadi *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 100 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2018*.

Melalui penghimpunan data ini, diharapkan peristiwa-peristiwa budaya itu dapat diakui sebagai peristiwa bersejarah. Namun, masuk ke dalam buku sejarah atau tidak, KK tetap merupakan peristiwa sejarah yang penting. Putu Wijaya mengatakan dalam bukunya, *NgEH*, sebuah peristiwa bisa menjadi penting kalau dia mendapat ekspos. Tetapi sebuah peristiwa penting tidak dengan sendirinya menjadi tidak penting kalau tidak diekspos. Peristiwa budaya, meskipun tidak diekspos, menurut Putu, akan tetap penting. Suatu peristiwa budaya, meski telah berlangsung lama dan tidak diketahui banyak orang, akhirnya suatu saat akan diakui sebagai peristiwa penting, karena ia lebih merupakan pengalaman spiritual. Tanpa publikasi, ia bisa menunggu waktu, merambat terus perlahan-lahan, membangun sesuatu dalam diri manusia, kadangkala tanpa disadari oleh manusianya sendiri, sampai pada suatu saat sejarah akan “mendusin, terkejut dan buru-buru mencatatnya, kemudian diakui sebagai salah satu prasasti penting.”

Berbeda dengan edisi 2007 yang penyajiannya dalam satu buku, edisi baru ini, dengan pertimbangan kepraktisan, terbagi menjadi lima buku, yaitu

Jilid 1, 2, 3, 4, dan 5. Jilid 1 berjudul *Kongres Kebudayaan*. Isinya memaparkan KK masa penjajahan (1918-1945), KK sesudah Indonesia merdeka, dimulai dari masa awal kemerdekaan (1945-1965), masa pembangunan (1969-1998), dan masa Reformasi (1998 hingga sekarang). Jilid 2 berjudul *Dari Kongres Pancasila hingga Kongres Kebudayaan Pemuda*. Dalam buku ini dipaparkan hasil-hasil Kongres Pancasila 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2018. Jilid 3 berjudul *Dari Kongres Kebudayaan Daerah hingga Kongres Kesenian*. Bagian ini berisi gambaran tentang kongres-kongres yang berkaitan dengan kebudayaan seperti: kebudayaan daerah (Jawa, Sunda, Bali, Madura, Banjar, Minangkabau, dll), sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, perpustakaan, perbukuan, dll. Jilid 4 berjudul *Kongres Bahasa dan Sastra*. Pada buku ini dipaparkan seluruh kongres bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang pernah berlangsung, juga Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang diselenggarakan oleh pemerintah Malaysia. Terakhir, Jilid 5 berjudul *Catatan Rekam Jejak*. Setelah menjelajahi 100 tahun Kongres Kebudayaan beserta kongres-kongres lainnya, buku ini memaparkan benang merah yang menghubungkan seluruh kongres.

Beberapa kesulitan dalam menghimpun data akhirnya dapat teratasi berkat bantuan berbagai pihak. Berkat bantuan rekan-rekan di Museum Sonobudoyo, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPNST) Bandung, BPNST Pontianak, BPNST Banda Aceh, Balai Bahasa Aceh, Balai Bahasa Jawa Timur, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Pusat Dokumentasi H.B. Jassin, Balai Bahasa Lampung, Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (LBSS), Dinas Kebudayaan Bali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan, Lembaga Sensor Film, Badan Kerja sama Kesenian Indonesia (BKKI) Jakarta, Lingkar Budaya Indonesia (LBI), KITLV di Belanda, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, dan Perpustakaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, buku ini menjadi semakin kaya. Kepada semua lembaga itu pemulung mengucapkan terima kasih.

Dalam kesempatan ini pemulung secara khusus sekali menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada almarhum Prof. Dr. Fuad Hassan, yang atas kehendak beliau sendiri memberikan “Pengantar” untuk buku Edisi II, yang sengaja pemulung kutip lagi untuk edisi ini. Dengan suara parau dan sambil berbaring sakit di tempat tidur, beliau mendiktekan kata demi kata dan baris demi baris pengantar tersebut. Juga secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Adiwoso, Sdr. Sudarmadji Damais, Sdr. Chandra Halim yang dengan sabar dan tulus membantu meluruskan dan menerjemahkan teks dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Ucapan terima kasih juga pemulung sampaikan kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan yang telah mengapresiasi dengan penerbitan buku ini. Selain itu, terima kasih pula kepada tim penyunting: Ninus Andarnuswari, Isaiyas Ining, Fitri Ratna Irmalasari, dan Dewi Kharisma Michellia yang telah bekerja keras merapikan halaman demi halaman, berikut tim desain yang dipimpin oleh Febrian Adi Putra. Terakhir, kepada istriku tercinta, anak dan cucu-cucu, juga pemulung ucapkan terima kasih yang paling dalam karena, selain terus memberikan semangat untuk menyelesaikan buku ini, juga telah merelakan suami, ayah, kakek selama berbulan-bulan”menikahi” komputer dan buku.

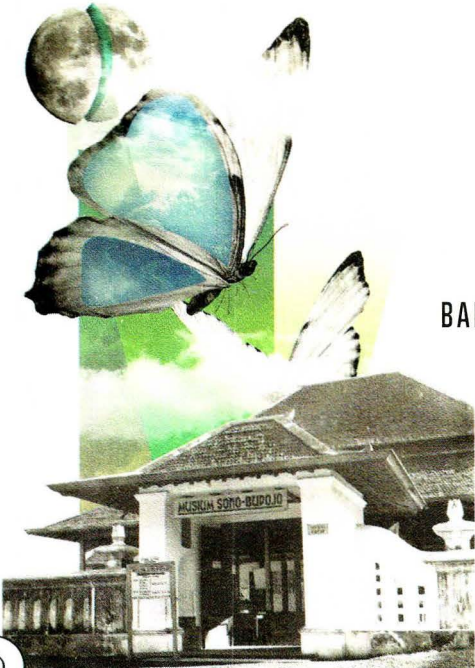
Angan-angan untuk terus merevisi buku edisi pertama 2003 yang tebersit lima belas tahun lalu akhirnya pada 2018 dapat tercapai. Diiringi ucapan syukur “Alhamdulillah Robbi” buku ini dapat terbit meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahannya, terutama kelengkapan data dari beberapa kongres. Mudah-mudahan buku ini dapat membuat kita mendusin dan mengakui seluruh perjalanan KK selama 100 tahun sebagai peristiwa penting bagi sejarah kebudayaan Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2018

Pemulung
Nunus Supardi

**Jilid
lima 05/05**





BAB

01

PENDAHULUAN

Setelah menjelajahi perjalanan seratus tahun KK, kini tibalah pada bagian akhir, sebagai catatan kesimpulan. Tentu amat sulit untuk membuat suatu rangkuman pamungkas—yang dibuat berdasarkan pada sekian banyak rangkuman (kesimpulan, keputusan, rekomendasi, deklarasi) yang dihasilkan oleh sekian banyak kongres. Dalam kenyataan, masing-masing masyarakat pemangku kebudayaan sangat antusias untuk menyelenggarakan kongres untuk mencari landasan untuk dijadikan acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam jilid terakhir ini akan disajikan sekilas mengenai hubungan tema dan pokok bahasan yang dijadikan sebagai arah perbincangan dari kongres sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Dengan mengetahui hubungan antara keduanya, kita akan mendapatkan gambaran kemungkinan adanya “benang merah” jalan pikiran para pendahulu dalam melestarikan (melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina)

kebudayaannya. Tampaknya, permasalahan kebudayaan tidak cukup dibahas berkali-kali selama seratus tahun. Perbincangan kebudayaan melalui forum kongres untuk mencari formula pemajuan kebudayaan akan terus berlanjut, karena kebudayaan selalu dinamis menyesuaikan perkembangan zaman.

Selain itu, juga penting untuk menelusuri hubungan antara KK dan kongres-kongres lainnya. Tampaknya, permasalahan kebudayaan memiliki dimensi luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, dan tidak dapat dituntaskan hanya dalam KK saja. Setelah memasuki masa Reformasi, semangat untuk menyelenggarakan kongres terkait unsur kebudayaan maupun kebudayaan daerah yang beranekaragam semakin bertambah besar.

Bagian lain yang patut disimak di buku V ini adalah mengenai langkah lebih lanjut setelah kongres berakhir. Terjadi kecenderungan bahwa akhir-akhir ini muncul tanggapan sinis dan pesimistis terhadap realisasi segala keputusan, rekomendasi, dan resolusi hasil kongres. Kongres yang disebutkan didominasi oleh kehadiran para birokrat itu tidak menghasilkan keputusan yang membumi dan banyak yang berhenti pada keputusan atau rekomendasi saja.

Bagian penting yang akan ditarik dari perjalanan seratus tahun KK di buku V ini adalah mengenai relevansi KK dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kemajuan budaya bangsa. KK pertama 1918 yang masih menggunakan label “Jawa” (Congres voor Javaansche Cultuur Onwikkeling), sepiantas menyiratkan keterbatasan pandangan dan sasaran yang dibincangkan. Memang tidak salah, karena senyatanya kongres 1918 digagas oleh orang Jawa, diselenggarakan oleh kaum terpelajar Jawa, dan berlokasi di tanah Jawa. Tetapi, apakah di balik keterbatasan itu dapat dipetik makna, tujuan, dan pemikiran yang lebih dalam, luas, dan penting dalam mengawal perjalanan sejarah bangsa dan budaya Indonesia? Jika di balik itu memang ditemukan mutiara-mutiara konsep, kebijakan, dan strategi pemajuan kebudayaan, maka kongres itu tentu akan mendapat pengakuan dan tempat dalam sejarah pembangunan kebangsaan dan menjadi tonggak sejarah pemajuan kebudayaan bangsa.



BAB

02

Hubungan Antarkongres

Bab ini akan menguraikan dua hal. *Pertama*, mengenali hubungan atau benang merah antarkongres kebudayaan yang pernah berlangsung, terutama hubungan antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Hal penting yang perlu disimak tentu yang berkenaan dengan berbagai pemikiran, konsep, kebijakan, dan strategi kaum terpelajar bumiputra dalam membangun dan memajukan kebudayaan bangsa apabila cita-cita menjadi bangsa merdeka tercapai. Berbagai pemikiran dan pendapat yang diungkap ketika berada di bawah tekanan budaya penjajah tentu menarik bila dihubungkan dengan pemikiran dan pendapat yang diungkap setelah Indonesia merdeka. *Kedua*, mengenali hubungan antara KK dan kongres-

kongres lainnya yang merupakan unsur kebudayaan atau bidang yang memiliki kaitan erat dengan kebudayaan; misalnya, kongres pendidikan dan kongres Pancasila, kongres diaspora Indonesia, kongres masyarakat adat Nusantara, dll, yang di dalamnya juga membahas masalah kebudayaan.

Dengan pengenalan itu diharapkan akan didapat pula gambaran variasi tema dan topik yang dibahas masing-masing kongres atau konferensi selama perjalanan 100 tahun. Beberapa hal yang dapat dicatat dari keseluruhan kegiatan selama 100 tahun itu adalah sebagai berikut.

Hubungan Tema dan Pokok Bahasan dalam Kongres Kebudayaan

Mengawali tinjauan tentang apa *benang merah* yang menghubungkan KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, yang perlu dicermati dahulu ialah bentuk pertemuan yang dipilih kaum terpelajar sebagai ajang untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas masalah kebudayaan. “Kongres” dinilai merupakan forum yang paling tepat dan oleh sebab itu Pangeran Prangwadono mengusulkan agar diselenggarakan Kongres Kebudayaan, bukan Kongres Bahasa Jawa sebagaimana yang diminta oleh pemerintah Batavia.

Usulan itu menjadi kenyataan dengan diselenggarakannya KK pertama pada 1918. Kongres ini dapat disebut sebagai tonggak sejarah kebudayaan bangsa dan menjadi motor penggerak diselenggarakannya kongres-kongres kebudayaan berikutnya. KK 1918 disusul oleh KK 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, dan 1937 (tujuh kali kongres). Setelah Indonesia menjadi bangsa merdeka dan berdaulat, perbincangan kebudayaan melalui forum kongres semakin bertambah. Tidak hanya kongres kebudayaan umum tetapi berbagai kongres unsur kebudayaan—seperti sejarah, kesenian, bahasa, sastra, arkeologi, serta kebudayaan daerah (suku bangsa) berserta unsur-unsurnya—juga diselenggarakan.

Dalam rentang 100 tahun (1918–2018) ternyata telah diselenggarakan berbagai kongres dan konferensi kebudayaan umum maupun khusus. Kongres

kebudayaan khusus yang dimaksud ialah yang dengan lebih khusus membicarakan unsur-unsur kebudayaan, antara lain: kongres kebudayaan daerah, kongres bahasa, kongres sastra, kongres kesenian, kongres kepurbakalaan, kongres antropologi, kongres epigrafi, kongres perpustakaan, kongres perbukuan, kongres ilmu pengetahuan, kongres kebatinan, dll. Bahkan, setelah reformasi berlangsung, kongres bahasa-bahasa lokal seperti Cirebon, Makassar, Kaili, Lampung, Aceh, Tegal, Bali, Madura, dll mulai diadakan. Bila dihitung, total jumlah forum diskusi terkait kebudayaan yang pernah diselenggarakan selama 1918 hingga 2018, adalah 283 kali kongres dan konferensi—lihat Tabel III. Sangat mungkin jumlah itu masih dapat bertambah karena ada kongres dan konferensi kebudayaan atau unsur kebudayaan lainnya yang belum ditemukan.

Pilihan forum kongres untuk menyelenggarakan perbincangan kebudayaan setelah Indonesia merdeka didorong oleh penilaian bahwa forum musyawarat kebudayaan yang berlangsung di Sukabumi pada 31 Desember 1945, meskipun menghasilkan sejumlah keputusan penting, dianggap oleh para budayawan belum memiliki kekuatan yang mengikat semua pihak. Oleh sebab itu mereka berinisiatif untuk menyelenggaraan KK seperti yang dilakukan oleh kaum terpelajar sebelum Indonesia merdeka. Mereka khawatir sejumlah keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh musyawarah itu akan tidak berpengaruh apa-apa. Atas dasar itu, Pusat Kebudayaan Kedu mengambil inisiatif mengadakan rapat-rapat persiapan penyelenggaraan sebuah kongres. KK pertama setelah Indonesia merdeka di Magelang pada 1948 yang diselenggarakan ketika pemerintahan RI sedang mengungsi ke Yogyakarta itu berjalan sukses meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi panitia.

Termasuk KK 2018 yang akan diselenggarakan pada November nanti, terhitung Indonesia pernah menyelenggarakan sepuluh KK: 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1991, 2003, 2008, 2013, dan 2018. Jika tujuh kali KK sebelum Indonesia merdeka juga diakui sebagai bagian dari sejarah kebudayaan dan bagian dari sejarah KK di Indonesia, berarti selama 100 tahun bangsa Indonesia telah melangsungkan KK sebanyak 17 kali. Pengakuan terhadap penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka sebagai bagian sejarah bangsa sangat penting dan beralasan. Selain telah melahirkan sejumlah konsep, kebijakan, dan strategi

dalam memajukan kebudayaan bangsa, KK juga merupakan titik awal tumbuhnya kesadaran berbangsa dan berbudaya seperti yang terjadi pada Kongres Pemuda (28 Oktober 1928), Kongres Perempuan (22 Desember 1928), dan Kongres Bahasa (1938)—tujuh tahun sebelum Indonesia merdeka.

Ketiganya diakui dan dicatat dalam sejarah Indonesia. Namun, peristiwa budaya berupa penyelenggaraan KK 1918 dan kongres-kongres berikutnya yang berlangsung sebelum Indonesia merdeka belum banyak dikenal orang dan belum masuk dalam catatan sejarah.

Sebagaimana diuraikan di buku Jilid 1, kelahiran kesadaran berbangsa dan kelahiran kesadaran masa depan kebudayaan bangsa berhubungan erat. Kelahiran kesadaran berbangsa ditandai dengan pendirian BO pada 1908—sekalipun tujuan awalnya adalah untuk mengembangkan kebudayaan (Jawa). Dalam perjalanan, tujuan BO berkembang menjadi gerakan untuk menggalang rasa kebangsaan dengan berlandaskan pada pola budaya tradisional. Sementara itu, untuk mewujudkan konsep, kebijakan, dan strategi pengembangan kebudayaan bangsa yang disepakati melalui kongres, dibentuklah suatu lembaga bernama Java Institut pada 1919. Sesuai AD-ART Pasal 3 lembaga tersebut, tujuan perhimpunan ini ialah untuk mengembangkan kebudayaan bumiputra dalam arti yang seluas-luasnya dari Jawa, Madura, dan Bali.

Tampaknya, penyebutan tiga wilayah itu tidak dalam arti sempit tetapi di balik itu, konsep, kebijakan, dan strategi yang dihasilkan pada setiap kongres sudah mengarah pada “arti seluas-luasnya” mencakupi budaya Indonesia. Tidak mungkin Belanda akan diam saja bila pada saat itu telah disebut dengan terang-terangan nama Indonesia. Seperti halnya ketika kaum terpelajar bumiputra berkumpul pada 20 Mei 1908 yang kemudian melahirkan organisasi yang oleh M. Soeradji diusulkan bernama Boedi Oetomo. Tiba giliran pada perumusan mengenai semboyan organisasi tersebut, setelah diperdebatkan akhirnya yang disepakati “*Indie Vooruit*”, atau Hindia Maju, dan bukan “*Java Vooruit*”, atau Jawa Maju, apalagi “*Indonesie Vooruit*” atau Indonesia Maju (buklet Museum Benteng Vredeburg). Mereka masih menimbang-nimbang dalam menggunakan nama Indonesia. Meskipun nama itu telah menjadi cita-cita, hampir dua puluh tahun kemudian baru diucapkan secara terang-terangan seperti tecermin dalam ikrar

atau sumpah yang menyebut kata “Indonesia” sebagai tanah air, bangsa, dan bahasa, pada acara Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

BO dan Java Institut yang dikawal oleh kaum terpelajar dan bangsawan bumiputra berjalan seiring dalam upaya mereka memupuk tumbuh kembang kesadaran berbangsa dan kesadaran tentang masa depan kebudayaan bangsa. Yang satu melalui pendekatan politik dan yang satunya melalui pendekatan budaya. Mereka sangat menyadari bahwa budaya masing-masing suku bangsa punya kesamaan sekaligus perbedaan unsur. Terkait kesamaan mereka tidak berkehendak untuk menyama-nyamakan. Persamaan telah menggugah bersemainya rasa persaudaraan dan solidaritas untuk bersatu. Sebaliknya mereka juga menyadari adanya perbedaan. Perbedaan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Adanya perbedaan (baca: keanekaragaman) justru merupakan tantangan, karena perbedaan merupakan kekayaan (baca mozaik) yang membanggakan dan harus dijaga, yang pada gilirannya menggugah tumbuhnya semangat nasionalisme. Meskipun kebudayaan mereka berbeda-beda, mereka tidak berkehendak untuk membeda-bedakan. Berbagai kegiatan BO dan kegiatan kebudayaan saling berkait, mencerminkan kuatnya rasa bangga terhadap keanekaragaman dan keunikan kebudayaan yang ada, sehingga pada puncaknya melahirkan ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari masa pergerakan hingga sekarang, peran kebudayaan berbeda-beda. Mengikuti Dr Soerjanto Poespowardojo, kebudayaan punya peran khusus pada masing-masing zaman berikut: [1] pra-revolusi; [2] revolusi; dan [3] zaman pembangunan. Pada zaman pra-revolusi, kebudayaan Indonesia berperan cukup besar dalam membentuk kesadaran nasional. Pada zaman revolusi, kebudayaan Indonesia mampu membangkitkan semangat juang yang luar biasa, sehingga bangsa Indonesia dapat mempertahankan ikatan “satu bangsa” dari upaya memecah-belah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda karena ingin menjajah kembali Indonesia. Memasuki zaman pembangunan, kebudayaan diletakkan dalam posisi sebagai modal dasar dan sekaligus acuan dalam melaksanakan pembangunan.

Konsep pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangunan yang berwawasan budaya. Namun, peran itu baru sebatas wacana, belum konkret dijadikan acuan. Sejak 1970-an peran kebudayaan dalam pembangunan nasional mulai menurun karena didesak oleh faktor-faktor lain seperti ekonomi, produksi, dan teknologi. Bahkan, pada zaman ini sudah jamak bahwa kebudayaan terpinggirkan dan ekonomi menjadi panglima.

Kalau diteruskan ke zaman Reformasi, kebudayaan dijadikan komoditas yang dapat mendatangkan devisa. Ada lagi yang menyebut, kebudayaan menjadi “daya tarik” untuk menggoda iman wisatawan mancanegara berkunjung membelajakan dolar, yen, yuan, atau euro di Indonesia. Dalam perkembangan terakhir, peran kebudayaan menjadi lebih penting lagi sebagai basis pengembangan sistem ekonomi liberal yang disebut ekonomi kreatif, industri kreatif, atau industri budaya.

Perbedaan kondisi dan peran-peran itu tentu berpengaruh terhadap tema dan pokok bahasan yang diperbincangkan pada setiap kongres. Tema dan pokok bahasan yang dipilih mencerminkan permasalahan yang saat itu dipandang penting. Sementara menurut WS Rendra, bagian penting yang tidak boleh ditinggalkan ketika menyelenggaraan KK, kita tidak boleh melupakan *setting* kebudayaan. Dalam ceramahnya di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, ia menyatakan: “Kongres itu bisa-bisa saja, tapi soalnya bagaimana kesemua itu tidak sampai melupakan *setting* kebudayaan sosial-politik yang tengah terjadi hari ini, sehingga kongres itu tidak membuat kesenian menjadi menara gading (*Pikiran Rakyat*, 24/9/2005).”

Tema dan pokok bahasan tiap kongres memang berbeda-beda. Akan tetapi, bila perjalanan KK mulai dari yang pertama pada 1918 hingga 2013 disimak secara cermat, bisa ditarik suatu *benang merah* konsep pikiran yang menghubungkan antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Benang merah itu juga muncul antara KK yang satu dengan yang lain. Bahkan, benang merah itu juga muncul antara KK dan kongres-kongres lainnya: bahasa, sastra, kesenian, arkeologi, antropologi, kebatinan, ilmu pengetahuan, dll. Oleh karena itu, sengaja dalam uraian tentang KK dalam Buku I, II, III, dan IV diupayakan untuk dapat ditampilkan secara lengkap mengenai agenda, pokok bahasan, serta kesimpulan

setiap kongres. Dengan sedikit cuplikan tema dan pokok bahasan kongres, penyimakan masalah yang diperdebatkan mulai dari KK 1918 hingga 2018 bisa dipermudah. Cuplikan itu dituangkan dalam Tabel I seperti terlihat di bawah ini.



Djawa: Tijdschrift van het Java-Instituut (Dari Koleksi Perpustakaan Nasional RI)

Poesaka Djawi
(Dari Koleksi Perpustakaan Nasional RI)

Tabel I
Cuplikan Pokok Bahasan
Kongres Kebudayaan 1918-2018

No.	Tempat & Tahun	Nama, Tema & Pemrakarsa	Pokok Bahasan
1.	Surakarta 1918	<p><i>Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling</i></p> <p><i>Pengembangan Kebudayaan Jawa</i></p> <p><i>Pangeran Prangwadono</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tentang perlunya pelajaran sejarah.</i> 2. <i>Pengembangan kebudayaan Jawa</i> 3. <i>Penguasaan ilmu pengetahuan Barat</i>
2.	Surakarta 1919	<p><i>Congres van het Java-Instituut</i></p> <p><i>Pengajaran Kebudayaan</i></p> <p><i>Java-Instituut</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengajaran sejarah Jawa, Sunda, Madura, dan Bali</i> 2. <i>Pengajaran kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali</i>
3.	Bandung 1921	<p><i>Congres van het Java-Instituut</i></p> <p><i>Pendidikan dan Sejarah Seni</i></p> <p><i>Java-Instituut</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pendidikan seni musik dan sejarah pada sekolah bumiputra.</i> 2. <i>Pelestarian dan pengembangan seni musik</i> 3. <i>Perbandingan seni musik sekarang dengan masa lalu</i>

4	Yogyakarta 1924	<p>Congres van het Java-Instituut</p> <p>Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya</p> <p>Java-Instituut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah bangunan kuno di Jawa 2. Nilai yang terkandung dalam bangunan kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan akan datang? 3. Pelestarian dan pemanfaatan bangunan kuno
5.	Surabaya 1926	<p>Congres van het Java-Instituut</p> <p>Bahasa, Seni, dan Kebudayaan Rakyat Jawa Timur</p> <p>Java-Instituut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musik Hindu-Jawa di Jawa Timur 2. Sejarah dan manfaat bangunan Majapahit. 3. Seni musik Madura 4. Seni sastra Madura 5. Sejarah Madura 6. Kebudayaan daerah dalam pendidikan
6.	Surakarta 1929	<p>Congres van het Java-Instituut</p> <p>Pengajaran Kebudayaan di Perguruan Tinggi</p> <p>Java-Instituut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajaran sastra, filsafat, dan budaya Timur di perguruan tinggi 2. Sepuluh tahun Java-Instituut

7.	Bali 1937	<p>Congres van het Java-Instituut</p> <p>Kebudayaan dan Kehidupan Masyarakat Bali</p> <p>Java-Instituut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan tua di Bali 2. Kehidupan keluarga masyarakat Bali 3. Kehidupan sosial masyarakat Bali 4. Seni kerajinan Bali
8.	Magelang 1948	<p>Kongres Kebudayaan Indonesia</p> <p>Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat</p> <p>Pusat Kebudayaan Kedu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan dan pembangunan masyarakat 2. Kebudayaan dan hukum masyarakat 3. Kebudayaan dan pembangunan ekonomi 4. Kebudayaan dan pembangunan kota-kota 5. Kebudayaan dan pembangunan negara 6. Kebudayaan dan pendidikan 7. Kebatinan sebagai alat dalam pembangunan negara

9.	Bandung 1951	Kongres Kebudayaan Indonesia Kritik Seni dan Hak Cipta Lembaga Kebudayaan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai hak mengarang 2. Mengenai perkembangan kesusastraan 3. Mengenai kritik seni 4. Mengenai sensor film 5. Mengenai organisasi kebudayaan
10.	Surakarta 1954	Kongres Kebudayaan Indonesia Pendidikan Kebudayaan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional/BMKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan kebudayaan dalam masyarakat sekolah 2. Pendidikan kebudayaan untuk masyarakat kota 3. Pendidikan kebudayaan untuk masyarakat buruh dan tani
11.	Denpasar 1957	Kongres Kebudayaan Indonesia Kebudayaan dan Arsitektur BMKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan arsitektur dengan seni rupa 2. Penyelenggaraan kesenian semasyarakat 3. Kebudayaan dan konstitusi

12.	Bandung 1960	Kongres Kebudayaan Indonesia Kebudayaan dan Ekonomi BMKN	Kebudayaan dan ekonomi
-----	-----------------	---	------------------------

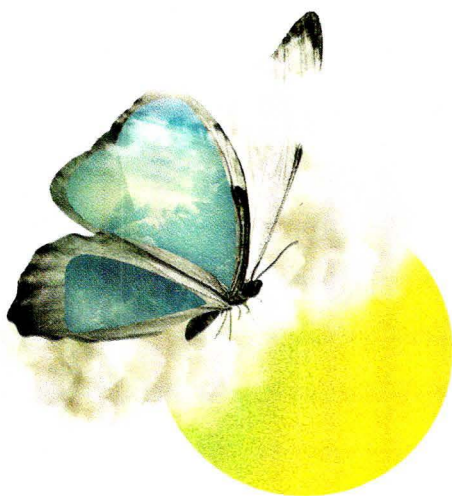


Poesaka Madhoera
 (Dari ANRI, Sonobudoyo,
 No. 2252)

13.	Jakarta 1991	<p>Kongres Kebudayaan</p> <p>Kebudayaan Kita: Kemarin, Kini, dan Esok</p> <p>Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>Warisan Budaya: Penyaringan dan Pengembangan, dengan lima topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya 2. Kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat pendukungnya 3. Pelestarian dan pengembangan kesenian serta kerajinan tradisional 4. Aturan-aturan adat berkenaan dengan kekuasaan dan pemilikan 5. Warisan budaya agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa <p>Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan, dengan enam topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional 2. Arah perkembangan kebudayaan nasional 3. Kesusastraan Indonesia dalam kebudayaan nasional 4. Media massa dan kebudayaan nasional 5. Kebudayaan nasional dan sistem pendidikan nasional 6. Keterkaitan antara kebudayaan dan pembangunan nasional <p>Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional, dengan enam topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya cipta dan pertumbuhan kesenian daerah dan nasional 2. Peranan seniman dalam masyarakat 3. Daya cipta ilmu dan teknologi dalam pertumbuhan kebudayaan di Indonesia 4. Daya cipta budaya dan media massa 5. Generasi muda dan daya cipta budaya 6. Daya cipta dan pertumbuhan kesusastraan daerah dan nasional <p>Kebudayaan dan sektor-sektor kehidupan masyarakat, dengan tujuh topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan dan ekonomi 2. Kebudayaan dan ilmu dan teknologi 3. Kebudayaan dan sosial, politik, dan hukum 4. Kebudayaan dan pertahanan dan keamanan 5. Kebudayaan dan wanita 6. Kebudayaan dan olahraga 7. Kebudayaan dan lingkungan alam <p>Kebudayaan Nasional dan Dunia (Umat Manusia), dengan lima topik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan asing dan kebudayaan di Indonesia 2. Kebudayaan Indonesia di luar negeri 3. Pariwisata dan kebudayaan di Indonesia 4. Kerja sama kebudayaan antarnegara 5. Penerjemahan karya-karya asing di Indonesia.
-----	-----------------	--	--

14.	Bukittinggi 2003	<p>Kongres Kebudayaan</p> <p>Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia</p> <p>Departemen Kebudayaan dan Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi dan disintegrasi 2. Krisis otoritas 3. Desentralisasi politik (otonomi daerah) 4. Identitas dan transisi 5. Konflik dan kekerasan 6. Warisan budaya (cagar, ilmu, seni, dan budaya) 7. Kesetaraan gender 8. Hukum, produktivitas, dan korupsi 9. Reintepretasi & reposisi adat dan tradisi 10. Pendidikan 11. Ekonomi kerakyatan 12. Bahasa dan simbol 13. Budaya pop dan seni hiburan 14. Religi dan spiritualitas 15. Sains dan teknologi 16. Lingkungan hidup <p>Catatan: Pokok bahasan nomor 11–16 diusulkan pada prakongres di Denpasar, Bali.</p>
-----	---------------------	--	---

15.	Bogor 2008	<p>Kongres Kebudayaan Indonesia</p> <p>Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan</p> <p>Departemen Kebudayaan dan Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Film/seni media 2. Sastra 3. Bahasa dan aksara 4. Seni rupa 5. Media massa 6. Seni pertunjukan 7. Ekonomi kreatif/ industri budaya 8. Hak kekayaan intelektual 9. Diplomasi kebudayaan 10. Warisan budaya 11. Kebijakan dan strategi kebudayaan 12. Pendidikan 13. Filantropi kebudayaan 14. Identitas budaya 15. Etika
-----	------------	--	--



16.	Yogyakarta 2013	<p>Kongres Kebudayaan Indonesia</p> <p>Kebudayaan untuk Keindonesiaan Kita</p> <p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Demokrasi Berkebudayaan dan Budaya Berdemokrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi berwawasan budaya 2. Demokrasi keindonesiaan 3. Kearifan lokal yang memperkuat demokrasi 4. Demokrasi dan nomokrasi <p>Warisan dan Pewarisan Budaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warisan budaya bersama Asia Tenggara 2. Unity in diversity: kebijakan kebudayaan 3. Glokalisasi kebudayaan 4. Penyerbukan silang kebudayaan <p>Diplomasi Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diplomasi internal dan eksternal 2. Budaya sebagai kekuatan diplomasi 3. Kerja sama internasional 4. Mengglobalkan budaya Indonesia. <p>Pengelolaan Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik dalam perspektif budaya 2. Kemitraan pemerintah dan masyarakat 3. Pemerintah pusat dan daerah 4. Kelembagaan kebudayaan <p>Sumber Daya Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generasi Multimedia 2. Pendidikan kebudayaan 3. Etos kreatif dan semangat kompetisi 4. Kontekstualisasi pemberdayaan budaya
-----	--------------------	---	---

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pemrakarsa dan pelaksana kongres baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka kebanyakan ialah lembaga kebudayaan non-pemerintah. Hanya inisiatif KK 1918 yang datang dari perseorangan, seorang terpelajar bumiputra bernama Pangeran Prangwadono—didukung oleh kaum terpelajar dan bangsawan yang tergabung dalam organisasi BO. Ia adalah bangsawan terpelajar yang kemudian dinobatkan menjadi Mangkunegoro VII. Hampir pada setiap penyelenggaraan kongres sebelum Indonesia merdeka Pangeran Prangwadono selalu aktif berperan. Kongres pertama diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diketuai oleh R. Sastrowidjono.

Kongres berikutnya hingga KK 1937 diselenggarakan oleh lembaga penelitian kebudayaan Java-Instituut. Peran ini memang telah diatur dalam anggaran dasar/AD Java-Instituut. Dalam pasal 4, butir b AD Java-Instituut disebutkan bahwa misi lembaga ini adalah melakukan kegiatan untuk memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaan berhadiah (kuis), dan karang-mengarang. Posisi pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintahan kerajaan hanya terbatas pada bantuan dana dan fasilitas penyelenggaraan seperti tempat, tim kesenian, bahan pameran, dan transportasi.

Pada KK sesudah Indonesia merdeka, inisiatif datang dari lembaga kebudayaan di masyarakat. Inisiatif itu muncul setelah diselenggarakannya Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi pada Desember 1945. Setelah pertemuan Sukabumi, Pusat Kebudayaan Kedu mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Usul yang sangat penting dan strategis itu mendapat dukungan dari kalangan budayawan, seniman, pemangku adat, dan cendekiawan yang punya perhatian pada nasib kebudayaan bangsanya. Sebagian dari mereka yang terlibat dalam persiapan KK pertama itu adalah kaum terpelajar yang kemudian juga terlibat dalam kongres kebudayaan dan kongres bahasa sebelum Indonesia merdeka. Nama-nama seperti Prof. Dr Husein Djajadiningrat, Dr Radjiman, Ki Hadjar Dewantara, Dr R. Ng. Poerbatjaraka, Mr Wongsonegoro, Armijn Pane, telah banyak berperan dalam kongres-kongres sebelum Indonesia merdeka.

Setelah pemerintah mendengar rencana Pusat Kebudayaan Kedu itu, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan membantu dana persiapan dengan menyelenggarakan “konferensi persiapan kongres” di Magelang pada 6 Mei 1948. Dari pertemuan ini kemudian dibentuk panitia penyelenggara.

KK pertama di Magelang disusul KK kedua di Bandung pada 1951. Dalam kongres ini segala persiapan hingga pelaksanaannya ditangani oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), yakni sebuah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan salah satu rekomendasi KK di Magelang. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi dari KK di Bandung, dibentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional Indonesia (BMKN). LKI masuk sebagai salah satu organisasi dalam BMKN. Pada KK 1954 di Surakarta, 1957 di Denpasar, dan 1960 di Bandung, kegiatan persiapan dan penyelenggaraan sepenuhnya ditangani oleh BMKN.

Dari sedikit gambaran di atas, jelas bahwa dari lima kali penyelenggaraan KK sesudah Indonesia merdeka (1948, 1951, 1954, 1957, dan 1960) posisi pemerintah hanya pasif dalam arti bersikap sebagai fasilitator saja. Peran aktif lebih banyak dilakukan oleh organisasi kebudayaan nonpemerintah. Pada sambutan pembukaan KK 1948, Menteri PP dan K Mr Ali Sastroamidjojo juga mengakui: “... tjampur tangan Kementerian itu adalah pasief (*Majalah Budaya*, 1950:13).”

Pandangan yang sama disampaikan oleh Menteri PP dan K, Mr. Wongsongoro yang hadir pada KK 1951 di Bandung dan oleh Menteri PP dan K, Mr Moh. Yamin pada pembukaan KK 1954 di Surakarta. Dalam pidato sambutannya, di samping menyatakan terima kasih kepada Panitia, Yamin juga menyatakan terima kasih kepada BMKN karena telah mengambil peran yang besar dalam mengembangkan kebudayaan. Mr Moh. Yamin mengatakan bahwa BMKN adalah:

“... yang secara langsung merupakan koordinasi dalam usaha-usaha guna perkembangan kebudayaan dalam arti luas menampakkan kegiatan yang memberi dasar kepada pengharapan umum untuk mencapai hasil yang baik. Berdasarkan

keinsyafan itu maka Pemerintah tak segan-segan untuk mencurahkan perhatian kepada Kongres ini dan memberikan bantuan sebaik-baiknya di mana perlu dan di mana mungkin (*Budaya*, September–Oktober 1954:2).”

Posisi pemerintah dalam penyelenggaraan kongres seperti itu sama dengan KK sebelum Indonesia merdeka. Pemrakarsa dan penyelenggara KK sesudah Indonesia merdeka adalah lembaga kebudayaan di masyarakat.

Berbeda dengan kongres-kongres tersebut di atas, pada penyelenggaraan KK 1991 inisiatif datang dari pihak pemerintah, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Langkah ini dilakukan mengingat kondisi organisasi kebudayaan yang ada, terutama BMKN yang biasa menyelenggarakan KK, sedang mengalami kemunduran. Setelah KK 1954, perkembangan politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sejak itu politik telah ditempatkan sebagai panglima. Karena politik dinomorsatukan, lembaga kebudayaan pun tak terelakkan menjadi sarat bermuatan politik. KK bukan mencari jalan pemecahan masalah kebudayaan melainkan menjadi ajang pertarungan ideologi dengan memanfaatkan kebudayaan. Mereka menilai, pendekatan budaya (*cultural approach*) terbukti merupakan sarana ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politik (DS Moeljanto dan Taufiq Ismail, 1995: 9). Akibatnya, tidak hanya terjadi perang ideologi antara komunis dan nonkomunis, tetapi juga perang budaya dalam arti dua kelompok budayawan, cendekiawan, dan wartawan yang menganut paham komunis dan yang tidak setuju dengan paham komunis. Mencermati situasi saat itu, DS Muljanto dan Taufiq Ismail sampai pada kesimpulan bahwa telah “terjadi prahara budaya yang menggelegar di tahun 60-an itu”.

Gejala itu sudah mulai tampak dalam KK 1957 di Bali. Masing-masing partai politik mendirikan lembaga kebudayaan sendiri di luar BMKN. Dalam perdebatan di kongres itu, masing-masing lembaga lebih mengedepankan kepentingan partainya ketimbang memperjuangkan kemajuan kebudayaan bangsa. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra); SOKSI mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (Lekri)—yang bertentangan dengan Lekra; Partai Nasional Indonesia (PNI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN); Partai NU mendirikan Lembaga Seniman dan Budayawan

Muslimin Indonesia (Lesbumi); Partai Kristen Indonesia mendirikan Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (Lekrindo); Partindo mendirikan Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi); dan Partai Katolik mendirikan Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia (LKKI).

Setelah meletus peristiwa G30S pada 1965, keberadaan organisasi kebudayaan yang dibentuk oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan menjadi semakin terpuruk. BMKN sebagai organisasi induk yang bersifat nasional tidak berdaya lagi. Dalam kondisi seperti itu, pelaku kegiatan kebudayaan sesudah 1965 cenderung bergeser, lebih banyak dilakukan oleh pihak lembaga kebudayaan di pemerintahan pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta oleh pemerintah daerah. Inisiatif untuk menyelenggarakan KK 1991 datang dari Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Peran pemerintah seperti ini tampaknya masih diperlukan pada penyelenggaraan KK 2003 dan 2013. Sesuai dengan keputusan KK 1991, kongres berikutnya seharusnya sudah diselenggarakan pada 1996 (setiap lima tahun sekali), tetapi dalam kenyataan baru terwujud pada 2003—yang berarti mengalami keterlambatan selama dua belas tahun. Meskipun penyelenggaraan kongres mengalami keterlambatan, tidak pernah muncul inisiatif dari lembaga di masyarakat seperti halnya pada masa Java-Instituut, LKI, atau BMKN. Sebaliknya, pihak pemerintah yang dikritik tidak cepat mengambil langkah inisiatif untuk menyelenggarakan kongres.

Bagian berikutnya yang perlu disimak adalah mengenai keluasan wilayah budaya yang diperbincangkan dalam kongres. Pada KK pertama sebelum Indonesia merdeka, perbincangan masih terbatas pada kebudayaan yang berkembang di lingkungan masyarakat Jawa saja. Yang menarik, meskipun wilayah budaya masih terbatas pada kebudayaan Jawa, perdebatan bisa melebar sampai pada masalah pengembangan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia. Pada kongres-kongres berikutnya, wilayah budaya yang diperbincangkan meluas, mencakup kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Setelah Indonesia merdeka dengan sendirinya cakupan wilayah meluas ke seluruh wilayah budaya di seluruh Indonesia.

Mengenai tema kongres, yang dipilih untuk KK 1918 adalah “*pengembangan*

kebudayaan Jawa". Untuk dapat menemukan konsep, kebijakan, dan strategi pengembangan kebudayaan Jawa yang tepat, para pemrasaran memusatkan perhatiannya pada masalah pendidikan bagi anak-anak dan remaja bumiputra. Perbincangan diawali dengan memperdebatkan masalah pendidikan sejarah dan pendidikan bahasa Jawa serta penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan kebudayaan bangsa. Juga masalah pengajaran bahasa asing dalam kaitan dengan penyerapan sains Barat.

Pada kongres-kongres berikutnya, tema berganti-ganti dan cenderung disesuaikan dengan permasalahan di mana kongres itu diselenggarakan. Pada KK 1921 di Bandung, temanya adalah "Pendidikan dan Sejarah Seni". Pembahasan diutamakan pada tinjauan seni Sunda. Demikian pula halnya pada KK 1924 di Yogyakarta, pembahasan mengenai "Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya" dititikberatkan pada peninggalan sejarah dan purbakala yang banyak terdapat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ketika kongres diselenggarakan di Surabaya, temanya adalah "Bahasa, Seni, dan Kebudayaan Rakyat Jawa Timur". Pembahasan diarahkan pada tinjauan tentang peninggalan purbakala, seni sastra, dan kerajinan di Jawa Timur. Pada KK 1937 di Bali, temanya adalah "Kebudayaan dan Kehidupan Masyarakat Bali" dan oleh karena itu tinjauan banyak menyoroti masalah kerajinan, berbagai peninggalan budaya, dan tata hubungan dalam masyarakat Bali. Jika maksud tema-tema kongres itu disarikan, maka tujuannya bukan hanya mencari pemecahan atas masalah konsep, kebijakan, dan strategi *pengembangan kebudayaan* saja, melainkan *pelestarian kebudayaan* dalam arti luas. Termasuk mencari pemecahan atas masalah *pembinaan*, *perlindungan*, dan pemanfaatan kebudayaan.

Perdebatan mengenai *pembinaan kebudayaan* diarahkan pada upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pendukung kebudayaan. Adapun cara yang disepakati adalah dengan mengoptimalkan peran pendidikan dalam arti luas sebagai proses pembudayaan. Hal ini tergambar jelas ketika mereka memperbincangkan tentang perlunya mengubah pandangan sebagai 'bangsa kuli' menjadi bangsa yang merdeka dan berkepribadian. Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, mereka membahas tentang masalah pendirian lembaga pendidikan bumiputra, pendidikan sejarah, arsitektur,

bahasa, sastra, filsafat, musik, tari, sandiwara (tonil), dan kerajinan (antara lain tentang kerajinan besi, perak, emas, kayu, tenun, bambu, kulit, hingga pada pembuatan perahu tradisional).

Sementara itu, perdebatan masalah *pengembangan kebudayaan* diarahkan pada masalah substansial kebudayaan itu sendiri, yaitu tentang perlunya dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan bangsa. Hal ini tergambar dalam perdebatan mereka yang tidak hanya terbatas pada kebudayaan Jawa tetapi juga memperbincangkan kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali, kemudian meluas dengan menyelipkan perdebatan tentang kebudayaan Nusantara, kebudayaan nasional, dan kebudayaan Indonesia. Mereka telah sampai pada perbincangan masalah pengaruh kebudayaan dari Barat maupun Timur (India) terhadap kebudayaan Jawa. Bahkan mereka telah memperbincangkan tentang hubungan langsung dengan kebudayaan asing (kebudayaan seluruh bangsa di dunia), seperti yang diusulkan oleh Ki Hadjar Dewantara (1994:39): “Tidak mungkinkah bangsa kita dengan tendens-tendens nasionalnya membentuk suatu badan yang dapat kita sebut ‘Hubungan Internasional’ untuk menghubungkan bangsa kita dengan bangsa lain?”

Upaya mempertemukan kebudayaan Barat dan Timur telah dilakukan sejak zaman kolonial. Pengenalan kebudayaan Indonesia ke luar negeri antara lain dilakukan pada 1889 ketika komposer Claude Debussy bersama Grup Musik Gamelan Jawa dan Grup Musik Gamelan Sari Oeng dari Sunda ikut dalam Pameran Internasional di Paris. Upaya itu diulang lagi pada 1931 dan untuk kali ini terjadi kecelakaan, tenda pameran terbakar serta beberapa koleksi hancur. Bersamaan dengan pameran itu, musik gamelan Bali dari Peliatan dikirim ke Paris untuk pertama kali. Lalu, pada 1952 dengan koordinasi John Coast dari Inggris, grup Peliatan membuat terpesona masyarakat London, New York, dan Las Vegas.

Perdebatan tentang upaya *perlindungan kebudayaan* diarahkan pada upaya untuk menjaga agar kebudayaan tidak mengalami kerusakan dan kemusnahan. Perlindungan diarahkan pada kebudayaan yang bersifat benda (*tangible*) maupun yang bersifat nonbenda (*intangible*). Hal ini tergambar pada perbincangan mereka tentang nilai-nilai (tata krama), seni musik, keutuhan berbagai bangunan

kuno, situs purbakala, arsitektur, alat-alat kesenian, hasil kerajinan, bahasa daerah, hingga sistem keluarga dan adat. Mereka telah memikirkan untuk mendirikan lembaga penelitian kebudayaan dan museum untuk menyimpan dan memamerkan berbagai benda peninggalan sejarah bangsa; juga lembaga pendidikan seni (kerajinan). Banyak pusat kerajinan di Jawa hilang. Oleh karena itu, dalam KK 1926 di Surabaya, Walikota Surabaya Ir. Dijkerman mengharapkan agar kejayaan kerajinan Jawa Timur masa lalu dan kini yang hilang atau terancam akan hilang dapat dipulihkan.

Di samping itu, pemerintah Hindia Belanda juga mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan untuk melindungi keselamatan benda peninggalan sejarah dan purbakala. Atas usul Ir. PAJ Moojen—yang pernah menjadi anggota panitia dan peserta KK 1921—lahirlah *Monumenten Ordonnantie* (MO) *Staatblad* No. 238 Tahun 1931 (Adolf Heuken, S.J. & Grace Pamungkas, S.T., 1999:69). Dasar pertimbangan yang mendorong kelahiran MO adalah: "... perlunya diambil tindakan-tindakan guna melindungi benda-benda yang harus dianggap memiliki nilai penting bagi prasejarah, sejarah, kesenian, atau palaeo-antropologi." Jika tidak ada upaya perlindungan, warisan budaya bangsa akan rusak, hancur, dan akhirnya punah, karena berbagai gangguan dan ancaman faktor alam maupun manusia.

Sementara itu, mengenai pemikiran tentang *pemanfaatan kebudayaan* diarahkan pada upaya penggunaan kebudayaan bagi kepentingan pendidikan, sains, agama, ekonomi (koperasi, perdagangan, kesejahteraan rakyat) dan bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri. Mereka telah membahas pemanfaatan peninggalan sejarah dan budaya bagi penyelenggaraan pendidikan kesadaran bangsa. Mereka juga sudah memperbincangkan pemanfaatan kebudayaan untuk pariwisata (*tourism*), yaitu sebagai aset budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata (lihat: KK 1924 di Yogyakarta, 1926 di Surabaya, dan 1937 di Bali).

Tema kongres, seperti diuraikan di atas, berkembang dan semakin meluas pada KK sesudah Indonesia merdeka. Untuk meletakkan dasar-dasar pemajuan kebudayaan bangsa setelah menjadi bangsa merdeka, tema yang dipilih KK 1948 adalah "Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat". Dari tema itu dapat disimpulkan bahwa sebagai bangsa yang masih belia—baru berusia tiga tahun—

para pendiri bangsa telah menempatkan bidang kebudayaan sebagai unsur paling penting untuk dibahas demi menemukan suatu konsep, kebijakan, dan strategi dalam membangun kebangsaan. Kebudayaan sebagai garis acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu negeri yang multietnik, multikultur, dan multimental perlu diperbincangkan dalam suatu forum kongres.

KK 1951 memilih tema “Kritik Seni dan Hak Cipta”, sementara KK 1954 mengambil tema “Pendidikan Kebudayaan”. KK 1957 bertema “Seni dan Arsitektur” sedangkan KK 1960 mengambil tema “Kebudayaan dan Ekonomi”. Lalu, pada KK 1991 tema yang dipilih adalah “Kebudayaan Kita: Kemarin, Kini, dan Esok”. Dengan tema-tema itu perhatian diarahkan pada pembahasan masalah kebudayaan bangsa masa lalu, masalah yang kini dihadapi, dan masalah yang akan dihadapi pada masa mendatang. Sementara itu, dalam KK 2003, tema kongres ditekankan pada pemecahan masalah “konsep, kebijakan, dan strategi” pemajuan kebudayaan bangsa.

Lalu, bagaimana halnya dengan pokok bahasan antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka? Pokok bahasan merupakan penjabaran lebih rinci dari tema untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk dalil-dalil, pernyataan, atau butir-butir masalah dan pemecahannya. Dalam KK 1918, pokok bahasan mencakup pelajaran sejarah, pengembangan kebudayaan Jawa, dan penguasaan sains Barat. Pada kongres-kongres berikutnya, pokok bahasan makin bervariasi sesuai dengan tema kongres, yaitu menyangkut masalah-masalah: bangunan kuno/tua atau peninggalan sejarah dan purbakala, pendidikan sejarah, kesenian (tari, musik), kerajinan, bahasa, sastra, filsafat, sains, teknologi, arsitektur, hubungan budaya antarbangsa (Timur dan Barat), kelembagaan yang mengurus kebudayaan, serta hubungan kebudayaan dan pariwisata. Pokok bahasan yang dipilih pada KK sebelum Indonesia merdeka dilanjutkan pada KK sesudah Indonesia merdeka seperti terlihat dalam tabel di atas.

Di antara berbagai pokok bahasan di atas, yang paling menonjol dan berulang kali diangkat dalam kongres adalah masalah hubungan antara kebudayaan dan pendidikan. Pada hampir setiap KK, kaitan antara keduanya selalu ditampilkan dan menjadi seperti tidak pernah berakhir untuk diperdebatkan.

Pendidikan sebagai sebuah proses pembudayaan telah diposisikan sebagai bagian penting dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa, menguasai sains dan teknologi, menjadikan manusia beretika, bermoral, beriman, dan bertakwa. Pendidikan merupakan media utama untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan.

Pada KK 1918, masalah pendidikan bagi penduduk bumiputra menjadi pokok bahasan, dengan menekankan pada pentingnya pengajaran sejarah dan bahasa Jawa. Pada kongres 1921, masalah pendidikan seni dalam hal ini seni sastra serta musik (seni nada) dari suku Sunda menjadi fokus perbincangan. Pokok bahasan ini dilanjutkan lagi pada KK 1926, yaitu mengenai pendidikan seni sastra serta musik Jawa Timur dan Madura. Di samping itu, juga diulas pokok bahasan tentang hubungan seni musik Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Sunda dan masalah pendidikan seni kerajinan—di Jawa Timur seni ini mengalami kemunduruan. Pada masa sesudah Indonesia merdeka, masalah seperti tersebut di atas masih tetap aktual untuk diangkat kembali sebagai topik kongres. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pokok bahasan mengenai pendidikan kebudayaan (sejarah, seni, sastra, bahasa, etika, dll) menjadi perhatian utama KK sebelum Indonesia merdeka. Pengulangan perbincangan pokok bahasan itu, di samping menunjukkan bahwa antara kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan yang kompleks, juga dimaksudkan untuk lebih memperluas cakupan dan memantapkan konsep pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Perhatian tidak hanya ditujukan pada pendidikan di tingkat rendah tetapi juga pendidikan di perguruan tinggi, antara lain dengan membicarakan tentang perlunya dibuka jurusan sastra, budaya Timur, dan filsafat (KK 1918; KK 1929).

Pada KK 1948 hingga 2018, masalah kaitan kebudayaan dan pendidikan tetap menjadi pokok bahasan penting. Dalam KK 1948, masalah kebudayaan dan pendidikan dijadikan tema khusus dengan pemrasaran Ki Hadjar Dewantara. Peran Ki Hadjar Dewantara sebagai seorang pendidik dan juga seorang budayawan dalam perdebatan masalah itu sangat menonjol—sejak dari kongres sebelum Indonesia merdeka. Pokok-pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara memberikan masukan yang penting bagi perumusan hasil kongres.

Sementara itu, dalam KK 1951, meskipun pokok bahasan yang didiskusikan

mengenai kritik seni dan film, pembahasan juga tetap menyinggung masalah pendidikan. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa untuk mencapai apa yang dituju oleh kritik seni perlu diadakan perluasan kesempatan untuk mempertinggi nilai membanding (sikap kritis) dari masyarakat terhadap seni, misalnya dengan mengadakan: akademi seni, mata pelajaran seni dan estetika di universitas, serta pendirian museum hasil kesenian. Pokok bahasan mengenai kebudayaan dan pendidikan lebih diperdalam dan diperluas pada KK 1954, dengan mengelompokkan rumusan menjadi tiga bagian, yaitu kebudayaan bagi pendidikan [1] masyarakat sekolah, [2] masyarakat kota, dan [3] masyarakat buruh dan tani. Selain itu, muncul usulan untuk mendukung pengelolaan bidang pendidikan sebagai bagian penting dari proses pembudayaan.

Usul mengenai perlunya segera ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional muncul pada KK 1954 di Surakarta, di samping hal-hal yang berkenaan dengan kurikulum, sarana pendidikan, dan tenaga pengajar kebudayaan. Pada KK 1954, anggaran Kementerian PP dan K diusulkan agar dinaikkan menjadi 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Usul tersebut diterima dan menjadi keputusan kongres. Dalam KK 1991, masalah pendidikan kebudayaan sudah tidak terlalu dominan, hanya menjadi bagian dari topik tentang kaitan kebudayaan dan sektor-sektor masyarakat. Sementara itu, dalam KK 2003, perbincangan masalah pendidikan kembali penting dan menjadi salah satu dari 16 pokok bahasan.

Pokok bahasan lain yang selalu muncul sejak KK sebelum Indonesia merdeka adalah masalah yang berkaitan dengan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Dalam kongres sebelum Indonesia merdeka, masalah kebudayaan nasional sesekali muncul dalam prasaran, perdebatan, dan pidato sambutan. Pada kongres 1948, setelah Indonesia merdeka, masalah itu dijadikan pokok bahasan utama, karena saat itu diperlukan suatu konsep strategi dalam memelihara, memajukan, dan mengembangkan kebudayaan nasional seperti yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia."

Pada KK 1948, pokok pembahasan diarahkan pada: (1) kebudayaan dan pembangunan masyarakat dan negara; (2) kebatinan dalam hubungan dengan kebudayaan; (3) kebudayaan dan pendidikan; (4) kesenian; dan (5) pembangunan kota. Tiga tahun berikutnya, pada KK 1951, pokok bahasan menyempit dan

hanya mengulas sebagian aspek kebudayaan. Topik yang dibahas adalah sebagai berikut: (1) hak pengarang; (2) perkembangan kesusastraan; (3) kritik seni; dan (4) sensor film. Sementara itu, dalam KK 1954, materi yang dipandang amat penting serta mendesak adalah masalah pendidikan kebudayaan. Dalam KK 1957, materi yang diperbincangkan adalah (1) hubungan antara arsitektur dan seni rupa; (2) kesenian di masyarakat; (3) kebudayaan dan konstitusi; sedangkan pada KK 1960 tema yang dibahas adalah fungsi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi. Dari paparan itu, tampak jelas bahwa tema yang diperbincangkan dalam KK makin menyempit.

Setelah tiga puluh tahun lebih vakum, baru diselenggarakan kongres kebudayaan lagi pada 1991. Jarak waktu ini relatif panjang bila dibandingkan dengan jarak antarkongres-kongres kebudayaan sebelumnya. Setelah sedemikian lama tidak ada kongres, KK 1991 seperti menjadi ajang pelampiasan keinginan yang tak tersalurkan. Meskipun ada forum-forum perdebatan seperti simposium, seminar, diskusi, dialog, dan temu budaya serta sarasehan budaya, forum tersebut dianggap belum dapat menjadi forum penyaluran yang tepat. Di samping jumlah pesertanya cukup banyak, materi yang dibahas juga amat luas cakupannya. Hampir mencakup seluruh permasalahan kebudayaan, baik dilihat dari sisi dalam (*intern*) maupun dari sisi luar (*ekstern*).

Masalah yang diperbincangkan, secara internal, dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama memperbincangkan keberadaan warisan budaya bangsa: di samping ada bagian kebudayaan yang perlu dikembangkan, ada pula bagian yang perlu dikesampingkan, dan untuk itu perlu dilakukan penyaringan (seleksi). Bagian kedua memperbincangkan kembali keberadaan (eksistensi) kebudayaan nasional setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 *de facto*—maka *de jure* kehadiran kebudayaan bangsa (nasional) Indonesia resmi diakui. Lalu, setelah berjalan selama 45 tahun, dipandang perlu untuk mengkaji perkembangannya di masa kini dan tentang harapan di masa depan. Pada bagian ketiga, masalah daya cipta dan pertumbuhan kesenian daerah dan nasional dijadikan topik bahasan karena pada saat itu masyarakat dilanda kegelisahan tentang arah perkembangan kesenian daerah dan nasional yang cenderung banyak terpengaruh oleh kesenian asing.

Perbincangan kebudayaan dilihat dari sisi eksternal mencakup dua bagian. Bagian pertama, tentang kebudayaan dalam kaitannya dengan sektor-sektor kehidupan masyarakat, yaitu mencakup kaitan kebudayaan dengan ekonomi, sains dan teknologi, sosial, politik dan hukum, pendidikan, agama, pertahanan dan keamanan, wanita, olahraga, serta kebudayaan dan lingkungan alam. Pada bagian kedua dibahas tentang kebudayaan nasional dalam kaitan dengan dunia luar, bahkan dalam hubungan dengan umat manusia yang ada di Bumi ini, yaitu mencakup masalah hubungan antara kebudayaan asing dan kebudayaan di Indonesia, antara pariwisata dan kebudayaan, dan kerja sama kebudayaan antarnegara. Hal lain yang menarik dari sekian banyak pokok bahasan pada KK 1991 adalah masalah penerjemahan karya-karya asing ke dalam bahasa Indonesia dan daerah. Meskipun masalah ini telah diperdebatkan sejak KK 1951, karena belum ada langkah yang konkret, maka masih dipandang perlu untuk diangkat lagi.

Benang merah antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka juga tampak dalam hal pembentukan lembaga kebudayaan sebagai wadah untuk melakukan aktivitas kebudayaan. Dalam Kongres Kebudayaan 1918 dikeluarkan rekomendasi agar didirikan lembaga penelitian kebudayaan dan kesenian. Rekomendasi tersebut terwujud dalam pembentukan Java-Instituut pada 4 Agustus 1919. Lembaga inilah yang menyiapkan dan melaksanakan kongres-kongres kebudayaan dan bahasa berikutnya. AD-ART Java-Instituut disahkan oleh Gubernur Jenderal melalui surat keputusan No. 75 tanggal 17 Desember 1919 dan memiliki masa hidup 29 tahun. Pendirinya antara lain Pangeran Prangwadono, Dr. Hoessein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, dan Dr. F.D.K. Bosch.

Seperti halnya pada KK sebelum Indonesia merdeka, pada kongres-kongres setelah Indonesia merdeka juga diusulkan berdirinya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengurusan kebudayaan. Lembaga-lembaga itu antara lain: Kementerian Kebudayaan tersendiri, Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI (1948), Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN (1951), Panitia Pemeriksaan Film atau PPF (1951), Dewan Pengawas Pemasukan Lektur dan Film (1954). Rekomendasi kongres tentang perlu dibentuknya lembaga-lembaga kebudayaan itu diikuti oleh berdirinya lembaga-lembaga kebudayaan

di masyarakat terutama lembaga-lembaga yang dibentuk oleh organisasi partai politik atau kemasyarakatan seperti: Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi), Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia (LKKI), Himpunan Seni Budaya Indonesia (HSBI), dll.

Sebagai tambahan, untuk menunjukkan *benang merah* antarkongres kebudayaan, ada baiknya bila kongres itu ditilik dari perspektif pergerakan kesadaran berbangsa. KK yang diselenggarakan pada masa pergerakan menjadi forum untuk menggalang dan memperkuat kesadaran itu. Di samping akibat tekanan pemerintah yang berkuasa (penjajah), kesadaran berbangsa juga tumbuh karena berkembang suatu kesadaran bahwa semua suku bangsa memiliki unsur budaya yang sama. Oleh karena itu, KK saat itu memiliki hubungan timbal balik antara tumbuhnya kesadaran untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesadaran berbangsa. Kongres menjadi forum untuk menggalang kekuatan baru yang setahap demi setahap mengkristal dalam bentuk tuntutan agar segera terwujud satu bangsa.

Tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kepedulian terhadap nasib kebudayaannya merupakan suatu perwujudan pendapat salah seorang ahli sejarah, yang menyatakan bahwa kekuatan baru dapat tumbuh akibat tekanan kekuatan lama (dalam hal ini penjajah). Tekanan yang kuat justru membangkitkan semangat dan kekuatan yang makin hebat. Seperti yang dikutip oleh HB. Jassin dkk sebagai berikut:

“Berdasarkan fenomena-fenomena sejarah maka seorang ahli sejarah mengatakan bahwa kebudayaan dari suatu periode adalah senantiasa kebudayaan dari kelas yang berkuasa. Akan tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa justru karena tidak termasuk dalam kelas yang berkuasa maka orang berhasil membentuk kekuatan baru. Dan politik, sebagai kekuatan baru yang terbentuk di tengah-tengah penindasan kekuatan lama, merupakan faktor positif yang menentukan perkembangan kebudayaan dan kesenian (E. Ulrich Kratz [ed.], 2000:496).”

Bukti bahwa telah lahir kekuatan baru dapat dilihat dari pencetus dan peserta kongres. Dalam kongres-kongres itu banyak terlibat nama-nama kaum terpelajar

bumiputra yang di antaranya juga terlibat dalam pergerakan nasional. Telah aktif mengambil peran antara lain: PH. Hadinegoro, Pangeran Prangwadono, Dr. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, Soejono, Ki Hajar Dewantara, Dr Radjiman, R. Ngabei Poerbatjaraka, dr. Soetomo, R.P. Soeroso, Mr. Singgih, Tjipto Mangoenkoesoemo, R.A. Wira Nata Koesoema, R. Hassan Sumadipradja, dan Abdul Azis. Bahkan inisiatif untuk menyelenggarakan kongres pertama 1918 justru datang dari kalangan bumiputra, yaitu Pangeran Prangwadono. Pendapat mereka tentang kesadaran berbangsa dan berkebudayaan sangat jelas dan tegas. Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, R. Sastrowidjono pada saat itu mengatakan: "... telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi (Jaap Erkelens, 2001:2)."

Selanjutnya, Sastrowidjono menyatakan bahwa budaya milik suatu bangsa merupakan cerminan paling sempurna dari kesadaran nasional dan jati diri bangsa yang bersangkutan. Untuk itu ia menyerukan kepada seluruh bangsa di Jawa, tanpa membedakan antara orang Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, ataupun Bali, agar membahas bersama jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Masalah 'menjadi bangsa' masih tetap menjadi pokok bahasan pada KK sesudah Indonesia merdeka. Dalam KK 1948 disimpulkan bahwa perlu diperbaharui jiwa manusia Indonesia guna menciptakan manusia, masyarakat, dan kebudayaan baru, dengan mewujudkan dan memperkembangkan nilai-nilai kebudayaan seperti yang terkandung dalam Pancasila. Demikian pula pada KK 2003, masalah konflik antarsuku bangsa yang berkembang di beberapa daerah menjadi pokok bahasan.

Bagian lain yang menarik dari serangkaian KK sebelum Indonesia merdeka adalah perhatian para raja dan pejabat pemerintah pada masa sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka terhadap kegiatan kongres. Para raja dan bangsawan yang pernah hadir dalam kongres antara lain: Sultan Hamengkoeboewono VIII, Sri Soesoehoenan Pakoeboewono X, KGPAA Mangkoenegoro VII, Pakoe Alam, Tjokorde Gde Raka Soekawati, Tjokorde Raka (Ubud), dan I Gusti Bagoes Djelantik dari Karangasem. Pada masa sesudah Indonesia merdeka, Kongres Kebudayaan juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara. Pada KK 1948 hadir Presiden

Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan Menteri Penerangan Moh. Natsir. Pada KK 1948 dan 1951, Bung Hatta menyampaikan prasarannya. Hadir pula Panglima Besar Soedirman dan beberapa orang menteri. Sekalipun pada KK 1951 hadir Wakil Presiden Moh. Hatta dan Menteri PP dan K. Mr. Wongsonegoro, KK 1954 hanya dihadiri oleh Menteri PP dan K, Mr. Muh. Yamin. Pada KK 1991, kongres dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Soedharmono, SH. Hadir pula pada kongres tersebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Soepardjo Roestam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr Fuad Hassan yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah. Sementara Kongres Kebudayaan 2003 hanya dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. I Gede Ardika dan kongres ditutup oleh Asisten Deputi (Eselon II). Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatra Barat sebagai tuan rumah KK 2003 mewakili kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membacakan sambutannya. Selanjutnya, pada KK 2013 pembukaaan direncanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetapi batal dan akhirnya dibuka oleh Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti dan ditutup oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh. Sementara itu, Kongres Kebudayaan Banjar III yang diselenggarakan 15 hari setelah KK 2013 (23–26 Oktober 2013) dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagaimana halnya dengan pendapat kaum terpelajar keturunan Belanda tentang kebudayaan bangsa? Dari sejumlah nama yang terlibat dalam kongres adalah para pemerhati dan peneliti kebudayaan yang penuh dedikasi dan hasil karyanya menjadi dokumen yang penting bagi sejarah kebudayaan kita. Nama-nama seperti Dr F.D.K. Bosch, Samuel Koperberg, A. Muhlenfeld, Z. Stokvis, P.A.J. Moojen, Ir Th. Karsten, J. Kats, Dr. G.A.J. Hazeu, Dr W.F. Stutterheim, Ir. H. Maclaine Pont, Dr. R. Goris, Dr. G.W.J. Drewes, dan J.W. Teillers adalah nama-nama yang pendapat dan karyanya menjadi acuan bagi para peneliti kebudayaan pada masa sekarang.

Salah satu dari sekian banyak cendekiawan Belanda yang memiliki pandangan yang sama dengan jiwa bangsa Indonesia adalah A. Muhlenfeld, yang antara lain pada 1918 menyatakan pendiriannya bahwa perlu diajarkan sejarah

abad-abad yang lalu, agar keturunan kita yang sedang tumbuh menyadari betapa buruk akibat yang harus ditanggung oleh bangsa yang berselisih dan bercerai-berai. Menurut Muhlenfeld, pada zaman yang akan datang, daerah Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara akan mendapatkan kedaulatan penuh. Hanya atas dasar kesatuan nasional, bangsa “Jawa” akan mampu mempertahankan kedaulatan itu dan hal tersebut harus ditanamkan melalui pendidikan.

Di samping nama-nama yang memang terlibat dalam penelitian kebudayaan, terdapat nama pejabat Pemerintah Hindia Belanda yang pikirannya telah menuju ke arah kebudayaan bangsa. Dari sekian banyak pejabat warga Belanda yang menarik untuk disimak karena memiliki perhatian besar terhadap kebudayaan Indonesia adalah Walikota Bandung Mr. S.A. Reitsma dan Walikota Surabaya Mr. Dijkerman. Pernyataan mereka disampaikan ketika masing-masing menjadi tuan rumah kongres. Dalam pidato pembukaan KK 1921 di Bandung, S.A. Reitsma mengatakan bahwa tujuan diadakannya kongres adalah untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang dalam keadaan tertindas. Di daerah-daerah, kebudayaan itu akan dihidupkan dan dengan demikian akan kembali berkembang. Sementara itu, Walikota Surabaya Mr. Dijkerman menyampaikan pandangannya bahwa seni dapat berkembang apabila didukung oleh semangat dan kegairahan hidup dari bangsa yang sedang berkembang. Seni berkembang kuat pada saat bangsa itu sedang dalam kondisi kuat. Dan menurut Dijkerman, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyadarkan bangsa Indonesia.

Seorang tokoh lain yang patut dicatat adalah Mr. Samuel Koperberg. Di kalangan rekan-rekannya ia sering dipanggil “Gunung Kuningan” atau “Gunung Tembaga”, karena kata *koper* = kuningan atau tembaga dan *berg* = gunung atau timbunan. Koperberg, selain menjabat sebagai Sekretaris Java-Instituut, juga Sekretaris Panitia Kongres dari 1919 hingga 1937. Sebagai Sekretaris Java-Instituut ia menerbitkan majalah kebudayaan dan bahasa. Dialah yang mengambil prakarsa untuk mendirikan Museum Sonobudoyo, di Yogyakarta, yang koleksinya kebanyakan berasal dari Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Semasa hidupnya di Indonesia ia sangat akrab dengan banyak pemuka gerakan nasional di Indonesia, antara lain Ir Soekarno, M. Husni Thamrin, dr Soetomo, dr Radjiman, H. Agus Salim, R.P. Soroso, Mr Singgih, Soewardi Soerjaningrat, Muh.

Hatta, dan Sjahrir. Setelah Indonesia merdeka ia masih tetap bekerja di Indonesia. Terakhir ia menjadi pegawai Museum Sonobudoyo dengan SK dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) dengan SK. No. 5316, tanggal 7 Juni 1946. Pada 1947 ia diangkat sebagai pegawai pada Dinas Purbakala dan pada 1949 menjadi Kepala Dinas Perpustakaan Kementerian PP dan K.

Samuel Koperberg sangat serius untuk mengembangkan kebudayaan Jawa sebagai alat untuk memperkuat kepribadian Jawa. Menurut Koperberg, kongres kebudayaan merupakan salah satu media untuk kebangunan kebudayaan dan menjadi unsur penting dalam renaissans orang Jawa. Selain itu, ia juga memiliki pendirian yang jelas tentang hubungan antara kebudayaan Barat dan Timur. Pendirian itu dituangkan dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada Sutan Sjahrir tertanggal 17 Agustus 1946, yang berbunyi sebagai berikut:

“Waktu saya menerbitkan majalah De Taak bersama J.E. Stokvis dan kemudian majalah Timbul bersama Mr Singgih, tujuan utama saya adalah kebangunan kebudayaan sebagai unsur penting dalam renaissans orang Jawa. Inilah pedoman saya selama bekerja bagi Java-Instituut, majalah Jawa dan Museum Sonobudoyo. Mengenai nilai hasil pekerjaan itu orang dapat berselisih pendapat, namun saya tetap yakin bahwa di antara kebudayaan Indonesia lama dan alam pikiran orang Barat perlu ada kompromi (Jaap Erkelens, 2001:13).”

Bila direnungkan, pendapat ini terkesan sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang disampaikan pada 1937, yang berbunyi: “... bahwa untuk kemajuan hidup tumbuhnya kebudayaan diperlukan adanya hubungan dengan kebudayaan-kebudayan lain (Ki Hadjar Dewantara, 1994: 78).” Alasan yang digunakan oleh Ki Hajar adalah karena bahan-bahan kebudayaan dari luar itu dapat diambil untuk “memperkembangkan (yakni memajukan) atau memperkaya (yakni menambah) kebudayaan sendiri”. Tetapi dengan syarat bahwa dalam berhubungan dengan kebudayaan asing itu harus “diusahakan menjadi asimilasi, dalam arti ‘mengolah’ dan ‘memasak’ bahan baru tadi”. Pendapat inilah yang kemudian menjadi amat penting perannya karena dipilih untuk menjadi sebagian dari kalimat penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: “... dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya dan

memperkembangkan kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”

Demikian gambaran sekilas tentang tema, pokok-pokok bahasan, dan rumusan hasil mulai dari KK 1918 hingga KK 2018. Dari situ dapat disimpulkan bahwa antara KK sebelum dan sesudah Indonesia ada hubungan yang mengalir sehingga tampak *benang merah* yang sambung menyambung. KK sesudah Indonesia merdeka pada hakikatnya adalah sambungan dari KK sebelum Indonesia merdeka.

Hubungan Kongres Kebudayaan dan Kongres-kongres Lainnya

KK 1918 benar-benar kemudian menjadi motor bagi penyelenggaraan KK berikutnya, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Selain kongres kebudayaan, sebelum Indonesia merdeka pernah berlangsung Kongres Bahasa Jawa sebanyak tiga kali (1924, 1926, dan 1929) serta Kongres Bahasa Sunda sebanyak dua kali (1924 dan 1926). Kongres Bahasa Indonesia sebelum Indonesia merdeka dilaksanakan pada 1938 di Surakarta. Sama seperti KK, kedua kongres bahasa daerah itu dan Kongres Bahasa Indonesia 1938 juga menjadi penggerak bagi penyelenggaraan Kongres Bahasa Jawa, Kongres Bahasa Sunda, serta Kongres Bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka.

Selama seratus tahun terhitung dari 1918 hingga akhir 2018 telah berlangsung 283 kali kongres dan konferensi kebudayaan serta unsur-unsur kebudayaan (bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, perpustakaan, perbukuan, ilmu pengetahuan, kebatinan, dll). Rincian kegiatan kongres dan konferensi kebudayaan Indonesia, kebudayaan daerah, dan berbagai unsur kebudayaan dapat dilihat dalam Tabel II di bawah ini.

Tabel II
Daftar Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan
dan Kongres-kongres Lainnya, 1918–2018

Tahun	Nama Kegiatan	Tempat	Penyelenggara/ Panitia
1918	Kongres Kebudayaan (Jawa) I/ Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling	Surakarta	Boedi Oetomo Cabang Surakarta
1919	Kongres Kebudayaan II/ Congres van het Java-Instituut	Surakarta	Java-Instituut
1921	Kongres Kebudayaan III/ Congres van het Java-Instituut	Bandung	Java-Instituut
1924	Kongres Kebudayaan IV/ Congres van het Java-Instituut	Yogyakarta	Java-Instituut
	Kongres Bahasa Jawa I	Yogyakarta	Java-Instituut
	Kongres Bahasa Sunda I	Bandung	Java-Instituut
1926	Kongres Kebudayaan V/ Congres van het Java-Instituut	Surabaya	Java-Instituut
1927	Kongres Bahasa Jawa II	Yogyakarta	Java-Instituut
1929	Kongres Kebudayaan VI/ Congres van het Java-Instituut	Yogyakarta	Java-Instituut
	Kongres Bahasa Jawa III	Surakarta	Java-Instituut
1935	Kongres Pendidikan I		
1937	Kongres Kebudayaan VII/ Congres van het Java-Instituut	Bali	Java-Instituut
	Kongres Pendidikan II		
1938	Kongres Bahasa Indonesia I	Surakarta	
1939	Konferensi Sastra Indonesia	Medan	

1947	Kongres Pendidikan III	Surakarta	Kementerian Pengajaran
1948	Konferensi Kebudayaan	Magelang	Pusat Kebudayaan Kedu dan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)
	Kongres Kebudayaan Indonesia I	Magelang	Pusat Kebudayaan Kedu, LKI, dan Kementerian PP dan K
1949	Kongres Pendidikan dan Pengajaran Antar Indonesia	Yogyakarta	Kementerian PP dan K
1950	Konferensi Kebudayaan Indonesia I	Jakarta	LKI
1951	Kongres Kebudayaan Indonesia II	Bandung	Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)
1950	Konferensi Kebudayaan Indonesia I	Jakarta	LKI
1951	Kongres Kebudayaan Indonesia II	Bandung	BMKN
1952	Konferensi Bahasa dan Sastra Sunda	Bandung	Kementerian PP dan K
	Konferensi Kebudayaan Indonesia II	Jakarta	LKI

1954	Kongres Kebudayaan Indonesia III	Surakarta	BMKN
	Kongres Bahasa Sunda I	Bandung	Sejumlah Ahli Bahasa Sunda
	Kongres Bahasa Indonesia II	Medan	
1955	Kongres Kebatinan I	Semarang	Perkumpulan Kebatinan
	Konferensi Seni Tari	Yogyakarta	
1956	Kongres Bahasa Sunda II	Bandung	LBSS
	Kongres Kebatinan II	Surakarta	Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI)
1957	Kongres Kebudayaan Indonesia IV	Bali	BMKN
	Kongres Sejarah I	Yogyakarta	UGM dan Universitas Indonesia
	Kongres Bahasa Sunda III	Bandung	LBSS
1958	Kongres Kebatinan III	Jakarta	BKKI
	Kongres Ilmu Pengetahuan I	Malang	Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI)
1959	Kongres Kebudayaan Rakyat I	Solo	Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)
	Kongres Lembaga Kebudayaan Nasional I	Solo	Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)
	Kongres Kebudayaan Indonesia V	Bandung	BMKN

1960	Kongres Kebatinan IV	Malang	BKKI
	Kongres Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) II	Bandung	Ikapi
1961	Kongres Bahasa Sunda IV	Bandung	LBSS
1962	Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner I	Jakarta	Lekra
	Konferensi Nasional Kebudayaan Rakyat I	Bali	Lekra
	Kongres Ilmu Pengetahuan II	Yogyakarta	LIPi
	Konferensi Lembaga Kebudayaan Nasional	Semarang	LKN
1963	Kongres Kebatinan V	Surakarta	BKKI
	Kongres Lembaga Kebudayaan Nasional II	Solo	LKN
1964	Kongres Nasional Kebudayaan Rakyat II	Jakarta	Lekra
	Kongres Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI)	Jakarta	Pendukung Manifest Kebudayaan
	Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner II	Jakarta	Lekra
1965	Kongres Reog Ponorogo se-Indonesia	Ponorogo	Lekra
1970	Kongres Sejarah II	Yogyakarta	MSI
1975	Kongres Pewayangan	Yogyakarta	
1977	Kongres Arkeologi I	Cibulan	Sejumlah Ahli Arkeologi
	Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia I	Jakarta	Sejumlah Pustakawan

1978	Kongres Bahasa Indonesia III	Jakarta	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa/ Pusbinbangsa
1979	Kongres Pewayangan	Yogyakarta	
	Konferensi Internasional Linguistik Indonesia I	Yogyakarta	Panitia/Sejumlah Ahli Linguistik
1981	Kongres Bahasa Bali I	Denpasar	Panitia/Sejumlah Ahli Bahasa Bali
	Kongres Sejarah III	Jakarta	MSI
	Kongres Ilmu Pengetahuan III	Jakarta	LIPI
1982	Konferensi Internasional Linguistik Indonesia II	Surakarta	Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI)
	Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah	Jakarta	Pusbinbangsa
1983	Kongres Bahasa Indonesia VI	Jakarta	Pusbinbangsa
	Kongres Arkeologi III	Ciloto	IAAI
1985	Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia III	Yogyakarta	IPI
	Kongres Sejarah IV	Yogyakarta	MSI
1986	Kongres Bahasa Bali II	Bali	Panitia/Pemda Bali
	Konferensi Internasional Linguistik Indonesia III	Denpasar	MLI
	Kongres Ilmu Pengetahuan IV	Jakarta	LIPI
	Kongres Arkeologi IV		IAAI
	Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia IV	Ujung Pandang	IPI

1988	Kongres Bahasa Indonesia V	Jakarta	Pusbinbangsa
	Kongres Bahasa Sunda V	Cipuyung	LBSS
	Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia IV	Makassar	MLI
1989	Kongres Arkeologi V	Yogyakarta	IAAI
	Konferensi Internasional Kesusastraan I	Denpasar	Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski)
	Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia V	Banjarmasin	IPI
1990	Konferensi Internasional Kesusastraan II	Bandung	Hiski
	Konferensi Internasional Kesusastraan III ¹	Malang	Hiski
1991	Kongres Kebudayaan Indonesia VI	Jakarta	Pusbinbangsa
	Kongres Bahasa Jawa I	Semarang	Panitia/Pemda Jateng, DIY, dan Jatim
	Kongres Bahasa Bali III	Denpasar	Panitia/Pemda Bali
	Kongres Sejarah V	Semarang	MSI
	Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia V	Semarang	MLI
	Kongres Ilmu Pengetahuan V	Jakarta	LIPI
	Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia VI	Padang	IPI
1992	Konferensi Internasional Kesusastraan IV	Bogor	Hiski

1. Penyelenggaraan Konferensi Internasional Kesusastraan 1990 berlangsung dua kali.

1993	Kongres Bahasa Indonesia VI	Jakarta	Pusbinbangsa
	Kongres Bahasa Sunda VI	Bandung	LBSS
1994	Konferensi Internasional Kesusastraan V	Yogyakarta	Hiski
	Kongres Arkeologi VI		IAAI
	Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia VI	Palembang	MLI
	Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing I	Salatiga	Tim Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (Tim BIPA)
	Kongres Kesenian Indonesia I	Jakarta	Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud)
1995	Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia VII	Jakarta	IPI
	Konferensi Internasional Kesusastraan VI		Hiski
	Kongres Ilmu Pengetahuan IV	Jakarta	LIPI
	Kongres Perbukuan Indonesia		Ikapi
	Kongres Arkeologi VII	Cipanas	IAAI
1996	Kongres Sejarah VI	Jakarta	MSI
	Kongres Bahasa Bali IV	Denpasar	Panitia/Pemda Bali
	Kongres Bahasa Jawa (KBJ) II	Malang	Panitia/Pemda Jateng, DIY, dan Jatim
	Konferensi Internasional Kesusastraan VII		Hiski
	Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing II	Padang	Tim BIPA
	Kongres Asosiasi Prehistorisi Indonesia	Yogyakarta	Asosiasi Prehistorisi Indonesia (API)

1997	Konferensi Internasional Kesusastraan VIII	Padang	Hiski
	Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia VII	Surabaya	MLI
1998	Kongres Bahasa Indonesia	Jakarta	Pusbinbangsa
	Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia VIII	Bandung	IPI
	Konferensi Internasional Kesusastraan IX		Hiski
	Kongres Pewayangan	Yogyakarta	Pemda DIY
1999	Konferensi Internasional Kesusastraan X	Bali	Hiski
	Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia VIII	Jakarta	MLI
	Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing III	Bandung	Tim BIPA
	Kongres Ilmu Pengetahuan V	Tangerang	LIPI
	Kongres Arkeologi VIII	Bali	IAAI
	Kongres Masyarakat Adat Nusantara I	Bali	Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
2000	Kongres Cerita Pendek Indonesia I	Yogyakarta	
	Konferensi Bahasa Daerah	Jakarta	Pusbinbangsa
	Konferensi Internasional Kesusastraan XI		Hiski

2001	<i>Konferensi Sejarah VII</i>	<i>Jakarta</i>	<i>MSI</i>
	<i>Kongres Bahasa Bali V</i>	<i>Denpasar</i>	<i>Panitia/Pemda Bali</i>
	<i>Kongres Bahasa Jawa III</i>	<i>Surabaya</i>	<i>Panitia/Pemda Jateng, DIY, dan Jatim</i>
	<i>Kongres Bahasa Sunda VII</i>	<i>Garut</i>	<i>LBSS</i>
	<i>Konferensi Internasional Kesusastraan XII</i>		<i>Hiski</i>
	<i>Kongres Sastra Jawa I</i>	<i>Surakarta</i>	<i>Para sastrawan bahasa Jawa</i>
	<i>Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing IV</i>	<i>Bali</i>	<i>Tim BIPA</i>
	<i>Konferensi Internasional Budaya Sunda</i>	<i>Bandung</i>	<i>Yayasan Budaya Sunda Rancage</i>
	<i>Kongres Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia</i>	<i>Malang</i>	<i>Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (AAEI)</i>
	<i>Kongres Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi</i>	<i>Surakarta</i>	<i>Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi (APPT)</i>
2002	<i>Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia IX</i>	<i>Batu</i>	<i>IPI</i>
	<i>Kongres Arkeologi IX</i>	<i>Kediri</i>	<i>IAAI</i>
	<i>Konferensi Internasional Kesusastraan XIII</i>		<i>HIS</i>
	<i>Kongres Cerita Pendek Indonesia II</i>	<i>Bali</i>	
	<i>Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia X</i>	<i>Denpasar</i>	<i>MLI</i>
	<i>Kongres Bahasa Aceh I</i>	<i>Banda Aceh</i>	<i>Panitia/Pemda Prov. Nangro Aceh Darussalam</i>

2003	Kongres Kebudayaan Indonesia	Bukittinggi	Ditjen Kebudayaan
	Kongres Bahasa Indonesia	Jakarta	Pusbinbangsa
	Kongres Cerita Pendek Indonesia III	Lampung	
	Konferensi Internasional Kesusastraan XIV	Solo	Hiski
	Kongres Ilmu Pengetahuan VIII	Jakarta	LIPI
	Kongres Masyarakat Adat Nusantara II	Lombok	AMAN
2004	Konferensi Internasional Kesusastraan XV	Manado	Hiski
	Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing V	Makassar	Tim BIPA
2005	Kongres Kesenian Indonesia II	Jakarta	Ditjenbud
	Kongres Arkeologi X	Yogyakarta	IAAI
	Kongres Bahasa Sunda VIII	Subang	LBSS
	Kongres Cerita Pendek Indonesia IV	Riau	
	Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia XI	Padang	MLI
	Konferensi Internasional Kesusastraan XVI	Palembang	Hiski

2006	Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia X	Bali	IPI
	Konferensi Sejarah VIII	Jakarta	MSI
	Kongres Sastra Jawa II	Semarang	Para sastrawan bahasa Jawa
	Kongres Bahasa Bali VI	Denpasar	Panitia/Pemda Bali
	Kongres Bahasa Jawa IV	Semarang	Panitia/Pemda Jateng, DIY, dan Jatim
	Kongres Kebudayaan Minangkabau	Padang	Panitia/Pemda Prov. Sumatra Barat
	Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing VI	Serang	Tim BIPA
	Konferensi Internasional Kesusastraan XVII	Jakarta	Hiski
	Kongres Bahasa Tegal	Tegal	Panitia/Pemda Kabupaten Tegal
	Kongres Kebudayaan Aceh	Banda Aceh	BPR NAD-NIAS dan Aceh Culture Institute (ACI)

2007	Kongres Budaya Banjar I	Banjarmasin	Panitia/Pemda Prov. Kalimantan Selatan
	Konferensi Internasional Kesusastraan XVIII	UI Depok	Hiski
	Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia XII	Surakarta	MLI
	Kongres Kebudayaan Madura	Sumenep	Panitia/Abdullah Said Institut
	Kongres Bahasa Cirebon	Cirebon	Panitia/Pemda Kab. Cirebon
	Kongres Bahasa Aceh II	Banda Aceh	Panitia/Pemda Prov. Nangro Aceh Darussalam
	Kongres Masyarakat Adat Nusantara III	Pontianak	AMAN
	Kongres Cerita Pendek Indonesia V	Banjarmasin	Komunitas Cerpem Indonesia
	Kongres Bahasa Makassar	Makassar	Pemda Prov. Sulsel dan Balai Bahasa Sulawesi Selatan
	Kongres Bahasa-bahasa Daerah Wilayah Barat	Lampung	Pemdaprov Lampung, Kantor Balai Bahasa Lampung, dan Badan Pengembangan Bahasa
Kongres Ilmu Pengetahuan IX	Jakarta	LIPI	

2008	Kongres Kebudayaan Indonesia	Bogor	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
	Kongres Bahasa Indonesia	Jakarta	Pusbinbangsa
	Kongres Bahasa Madura	Pamekasan	Panitia/Pemda Kabupaten se- Madura
	Kongres Budaya Kalimantan Barat I	Pontianak	Panitia/Pemda Prov. Kalimantan Barat
	Kongres Kebudayaan Bali	Denpasar	Panitia/Pemda Prov. Bali
	Kongres Perpustakaan Digital Indonesia I	Bali	Perpustakaan Nasional
	Kongres Arkeologi XI	Surakarta	IAAI
	Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XIX		Hiski
	Kongres Komunitas Sastra Indonesia I	Kudus	Komunitas Sastra Indonesia (KSI)
	Kongres Internasional Bahasa dan Adat Gorontalo I	Gorontalo	Pemdaprov Gorontalo dan Badan Pengembangan Bahasa
	Konferensi Tradisi Lisan	Wakatobi	Asosiasi Tradisi Lisan

2009	<i>Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia XI</i>	<i>Batam</i>	<i>IPI</i>
	<i>Kongres Perpustakaan Digital Indonesia II</i>	<i>Jakarta</i>	<i>Perpustakaan Nasional</i>
	<i>Konferensi Internasional Kesusastraan XX</i>		<i>Hiski</i>
	<i>Konferensi Internasional Budaya Bali Utara</i>	<i>Singaraja</i>	<i>Panitia/Pemda Kab. Buleleng</i>
	<i>Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia XIII</i>	<i>Batu</i>	<i>MLI</i>
	<i>Konferensi Internasional Budaya Jawa</i>	<i>Surakarta</i>	<i>Panitia/Pemda Prov. Jawa Tengah</i>
	<i>Konferensi Internasional Budaya Daerah I</i>	<i>Yogyakarta</i>	<i>Ikatan Dosen Budaya Daerah (Ikadbudi)</i>
	<i>Kongres Pancasila I</i>	<i>Yogyakarta</i>	<i>UGM, Mahkamah Konstitusi</i>

2010	Kongres Budaya Banjar II	Banjarmasin	Panitia/Pemda Prov. Kalimantan Selatan
	Kongres Perpustakaan Digital Indonesia III	Bandung	Perpustakaan Nasional
	Konferensi Internasional Kesusastraan XXI	Surabaya	Hiski
	Konferensi Internasional Bahasa Daerah (Sulawesi Tenggara)	Bau-Bau	Panitia/Pemda Prov. Sulawesi Tenggara
	Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing VII	Depok	Tim BIPA
	Konferensi Internasional Budaya Renaissance	UNS Surakarta	Perpustakaan Nasional dan Universitas Sebelas Maret
	Konferensi Internasional Budaya Sunda Kuno	Bogor	Panitia/Pemda Prov. Jawa Barat
	Kongres Pancasila II	Bali	Universitas Udayana, UGM, dan Mahkamah Konstitusi
	Kongres Cerita Pendek Indonesia VI	Bogor	Komunitas Cerpren Indonesia
	Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat II	Ketapang	Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisional (BPNST) Kalimantan Barat
Konferensi Tradisi Lisan	Bangka- Belitung	Asosiasi Tradisi Lisan	

2011	Kongres Kebudayaan Betawi	Jakarta	Panitia/Pemda DKI Jakarta
	Kongres Bahasa Kaili	Palu	Balai Bahasa Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Prov. Sulteng
	Kongres Komunitas Sastra Indonesia II	Bogor	Komunitas Sastra Indonesia (KSI)
	Kongres Pancasila II	Surabaya	Unair, UGM, MPR, Mahkamah Konstitusi
	Kongres Ilmu Pengetahuan X	Jakarta	LIPI
	Konferensi Internasional Budaya Sunda	Bogor	Pemda Bogor
	Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia XIV	Bandung	Yayasan Rancage
	Konferensi Internasional Kesusastraan II		MLI
	Kongres Bahasa Sunda IX		LBSS
	Kongres Bahasa Jawa V	Surabaya	Panitia/Pemda Jateng, DIY dan Jatim
	Kongres Sastra Jawa III	Bojonegoro	Para sastrawan bahasa Jawa
	Konferensi Sejarah IX	Jakarta	MSI
	Kongres Arkeologi XII	Surabaya	IAAI
	Kongres Perpustakaan Digital Indonesia IV	Samarinda	Perpustakaan Nasional

2012	Konferensi Internasional Budaya Daerah II	Bali	Ikadbud dan IKIP PGRI Bali.
	Kongres Masyarakat Adat Nusantara IV	Ternate	MAN
	Kongres Diaspora Indonesia/ Congress of Indonesian Diaspora/ CID	Los Angeles, CA, AS	Kementerian Luar Negeri/Kedubes Indonesia di AS
	Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Yogyakarta	Pusat Studi Pancasila UGM
	Kongres Pancasila IV	Yogyakarta	Pusat Studi Pancasila UGM bekerja sama dengan MPR RI
	Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat III	Singkawang	Balai Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah, dan Nilai Tradisional
	Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia	Jakarta	Kemendikbud
	Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi	Surabaya	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Kemendikbud
	Kongres Kebudayaan Madura	Sumenep	Said Abdullah Institut dan Pemda seluruh kabupaten di Madura
	Konferensi Internasional Tradisi Lisan	Tanjung Pinang	Asosiasi Tradisi Lisan
	Kongres Bahasa Makassar II	Makassar	Balai Bahasa Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pemda Prov. Sulawesi Selatan
	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia V	NTT	Perpustakaan Nasional
	Konferensi Internasional Kesusastraan XXII	Yogyakarta	Hiski
Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing VIII	Salatiga	Tim BIPA	

2013	Kongres Pancasila V	Yogyakarta	Pusat Studi Pancasila UGM bekerja sama dengan MPR RI
	Kongres Diaspora II	Jakarta	Desk Diaspora Indonesia (DDI) Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan IDN
	Konferensi Internasional Budaya Daerah III		Ikadbudi
	Kongres Bahasa Indonesia	Jakarta	Badan Bahasa
	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia	Malang	Perpustakaan Nasional
	Kongres Budaya Banjar III	Banjarmasin	Lembaga Adat Budaya Banjar dan Pemda Prov. Kalimantan Selatan
	Konferensi Internasional Kesusastraan XXIII	Banjarmasin	Hiski
	Kongres Bahasa Cirebon II	Cirebon	Pemda Cirebon
	Konferensi Internasional Budaya Daerah III	Sukoarjo	Ikadbudi

2014	Konferensi Internasional Budaya Daerah IV	Jember	Ikadbudi, Universitas Negeri Jember, dan Badan Bahasa
	Kongres Pancasila VI	Yogyakarta	Pusat Studi Pancasila UGM
	Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia	Makassar	IAAI bekerja sama dengan Ditjen Kebudayaan
	Kongres Kebudayaan Maluku	Ambon	Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku
	Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia	Lampung	MLI
	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia VII	Aceh	Perpustakaan Nasional
	Konferensi Internasional Tradisi Lisan	Bitung	Asosiasi Tradisi Lisan

2015	Konferensi Internasional Budaya Daerah V	Bandung	<i>Ikabudi, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Badan Bahasa</i>
	Kongres Pancasila VII	Yogyakarta	UGM
	Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional XI	Jakarta	LIPI
	Kongres Kebudayaan Jatim	Pasuruan	<i>Disbudpar Provinsi Jawa Timur</i>
	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia VIII	Bogor	<i>Perpustakaan Nasional</i>
	Konferensi Internasional Kesusastraan XXIV	Banjarmasin	HISKI
	Konferensi KIPBIPA IX	Denpasar	Tim BIPA
	Kongres Peradaban Aceh	Banda Aceh	Pemda NAD
	Kongres Diaspora III	Jakarta	<i>Indonesian Diaspora Network Global/IDNG</i>

2016	Kongres Bahasa Jawa VI	DIY	Panitia/Pemda Jateng, DIY, dan Jatim
	Kongres Bahasa Daerah Nusantara I	Bandung	Yayasan Kebudayaan Rancagé, Pemda Prov. Jabar, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
	Konferensi Internasional Budaya Daerah VI	Lampung	Ikadbudi, Universitas Lampung, dan Badan Bahasa
	Kongres Pancasila VIII	Yogyakarta	PSP UGM
	Konferensi Sejarah Nasional X	Yogyakarta	MSI
	Konferensi Internasional tentang Transformasi Sosial dan Intelektual Orang Banjar Kontemporer	Banjarmasin	IAIN Antasari
	Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia	Makassar	MLI
	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia IX	Denpasar	Universitas Udayana Bali dan Perpustakaan Nasional
	Kongres Budaya Banjar IV	Banjarmasin	Lembaga Adat Budaya Banjar dan Pemda Prov. Kalimantan Selatan
	Kongres Bahasa Panginyongan	Banyumas	Pemda Banyumas
Konferensi Internasional Kesusastraan XXV	Yogyakarta	Hiski	

2017	Kongres Diaspora Indonesia IV	Jakarta	Indonesian Diaspora Network Global/IDGN dan Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan IDN
	Kongres Pancasila VIII	Yogyakarta	Pusat Studi Pancasila UGM
	Kongres Bahasa Daerah Maluku	Ambon	Kantor Bahasa Maluku, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud
	Kongres Ikatan Ahli Arkeologi	Bogor	IAAI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan
	Kongres Masyarakat Adat Nusantara V	Medan	AMAN
	Kongres Kebudayaan Mandar	Mandar	Pemda Kabupaten Sulawesi Barat/Dewan Kebudayaan Mandar
	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia X	Mataram	Perpustakaan Nasional
	Konferensi Internasional Kesusastraan XXVI	Bengkulu	Hiski
	Konferensi Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	Batu	Tim BIPA
	Konferensi Internasional Tradisi Lisan	Mataram	Asosiasi Tradisi Lisan

2018	<i>Konferensi Musik Indonesia</i>	<i>Ambon</i>	<i>Komite Konferensi Musik Indonesia (KAMI)</i>
	<i>Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan IV</i>	<i>Yogyakarta</i>	<i>Universitas Gajah Mada</i>
	<i>Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat V</i>	<i>Bengkayang</i>	<i>Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi</i>
Total: 283 kali kongres/konferensi			

Dari 283 kongres dan konferensi yang pernah diselenggarakan itu, Kongres Kebudayaan Indonesia berlangsung sembilan kali dan kongres serta konferensi kebudayaan daerah dan berbagai unsur kebudayaan dan kongres lainnya yang terkait erat dengan kebudayaan berlangsung 274 kali. Aktivitas kongres sebanyak itu jelas menunjukkan betapa tinggi perhatian dan semangat para pemangku kebudayaan untuk membicarakan permasalahan budaya dalam forum kongres dan konferensi. Di sisi lain, itu juga berarti bahwa permasalahan yang dihadapi dalam memajukan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan suku bangsa terus berkembang.

Volume jumlah kongres dan konferensi juga dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dan pemerintahan. Gerakan Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Dari data yang terkumpul menunjukkan, semangat berkongres dan berkonferensi di era Reformasi semakin meningkat. Setelah otonomi daerah bergulir, banyak suku bangsa menyelenggarakan kongres atau konferensi kebudayaan daerah, antara lain: konferensi bahasa Sunda (2001), kebudayaan Jawa (2010), kongres kebudayaan Banjar (2007), kebudayaan Madura (2007), kebudayaan Bali (2010), Minangkabau (2006), kongres Sastra Jawa (2001), kongres bahasa Aceh (2002), kongres kebudayaan Aceh (2006) bahasa Makassar (2007), bahasa Madura (2008), bahasa Cirebon (2007), bahasa Tegal (2006), bahasa Kaili (2011), bahasa Panginyongan/Banyumas (2016), kebudayaan Mandar (2017), dll.

Bila dihitung, jumlah kongres dan konferensi kebudayaan sebelum Reformasi dibandingkan sesudah Reformasi menunjukkan jumlah yang seimbang padahal dalam rentang waktu yang lebih pendek, bahkan melampaui setengah dari keseluruhan. Selama delapan belas tahun Reformasi, antara 2000 hingga 2018, telah berlangsung sebanyak 160 kali kongres dan konferensi. Ini berarti sekitar 57% dari jumlah kongres dan konferensi selama 100 tahun (1918–2018) yang berjumlah 283 kali. Seperti terlihat dalam Tabel III di bawah ini, selama 18 tahun rata-rata diselenggarakan kongres dan konferensi sebanyak 8 kali setiap tahun. Suatu peningkatan jumlah yang sangat tajam bila dibandingkan dengan rata-rata setiap tahun sebelum Reformasi, yang hanya sekitar dua kali dalam satu tahun. Jumlah itu cenderung terus bertambah karena masing-masing suku bangsa yang belum menyelenggarakan kongres atau konferensi juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sama.

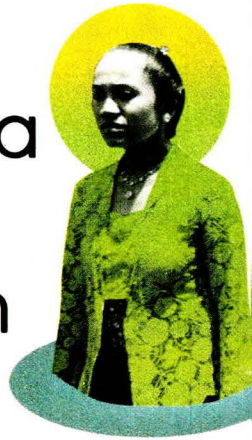
Tabel III
Jumlah Kongres dan Konferensi Kebudayaan, 2000–2018

Tahun	Jumlah Kongres/ Konferensi
2000	3 kali
2001	10 kali
2002	6 kali
2003	6 kali
2004	2 kali
2005	6 kali
2006	10 kali
2007	11 kali
2008	11 kali
2009	8 kali
2010	11 kali
2011	14 kali
2012	14 kali
2013	9 kali
2014	7 kali
2015	9 kali
2016	12 kali
2017	10 kali
2018	2 kali
Jumlah	160 kali
Rata-rata	8 kali

Dalam setiap KK, masalah kebudayaan daerah atau lokal sebenarnya telah masuk dalam agenda perbincangan. Tetapi sifatnya masih sangat umum, sehingga masing-masing daerah atau suku bangsa menyelenggarakan forum sendiri dengan tujuan untuk menemukan suatu formula pemajuan kebudayaan daerah yang lebih konkret dan operasional. Reformasi telah membangkitkan semangat para pemangku kebudayaan masing-masing suku bangsa untuk merumuskan kembali konsep, kebijakan, dan strategi untuk memajukan kebudayaan lokal masing-masing. Seperti ditulis oleh *Suara Merdeka*, Kongres Kebudayaan 2003 ternyata juga berkaitan erat dengan hasil rumusan Kongres Bahasa. Indikasinya, ada rumusan rekomendasi yang menyangkut kebahasaan. Mereka menganjurkan agar ada perhatian yang sungguh-sungguh baik terhadap pengembangan maupun pembakuan Bahasa Indonesia sebagai perwujudan daya cipta dan disiplin dalam berbahasa (*Suara Merdeka*, 23 /10/2003).



“Kongres itu bisa-bisa saja, tapi soalnya bagaimana kesemua itu tidak sampai melupakan setting budaya sosial-politik yang tengah terjadi hari ini, sehingga kongres itu tidak membuat kesenian menjadi menara gading”



*WS Rendra
(Pikiran Rakyat, 24/9/2005)*



BAB

03

Realisasi Hasil Kongres

Sebagaimana disinggung dalam Bab I, bagian yang paling penting untuk disimak dari seluruh perjalanan KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka adalah mengenai realisasi atas rekomendasi, kesepakatan, ataupun keputusan kongres. Berbagai pendapat menyatakan, hasil-hasil kongres yang didapatkan dengan susah payah dan menghabiskan biaya yang tidak kecil itu akhir-akhir ini cenderung tidak memberikan manfaat yang berarti. Di samping dinilai bahwa hasil kongres kurang “membumi”, banyak yang berhenti pada keputusan atau rekomendasi saja. Tidak ada realisasi yang konkret. Tidak ada evaluasi pelaksanaan keputusan dan tidak ada pula laporan pada kongres berikutnya. Sosiolog Ignas Kleden, yang menjadi salah satu narasumber dalam kongres 2013 menyatakan, rumusan rekomendasi kongres 2013 tidak operasional. Oleh karena itu, sulit untuk mengukur apakah rekomendasi-rekomendasi kongres dilaksanakan atau tidak (*Kompas*, 12/10/2013).

Untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang tentang realisasi hasil kongres, ada baiknya disimak beberapa bagian keputusan dan rekomendasi kongres yang telah dan belum direalisasikan mulai dari kongres pada 1918 hingga 2008. Bila dilihat dari sisi rekomendasi terkait pembentukan lembaga dan realisasinya, hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV sebagai berikut.

Tabel IV
Realisasi Rekomendasi Kongres-kongres Kebudayaan terkait
Kelembagaan, 1918–2008

Tahun	Rekomendasi / Hasil Kongres	Tindak Lanjut
1918	Perlu dibentuk lembaga penelitian Kebudayaan Jawa	Berdiri Java-Instituut pada 4 Agustus 1919
1929 & 1937	Perlu didirikan sekolah kerajinan	Berdiri Sekolah Kerajinan Tangan / Kunst Ambaacht School pada 1939
1929	Perlu didirikan jurusan sastra, filsafat, dan budaya Timur	Pada 1940 dibuka Fakultas Sastra dan Filsafat/Faculteit der Letteren en Wijsbegeerten
1948	Perlu didirikan akademi kesenian	Berdiri antara lain ASRI, Asdrafi, ATNI, ISI, STSI, IKJ, Konservatori
	Perlu dibentuk Kementrian Kebudayaan sendiri	Belum terealisasi
	Perlu didirikan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)	Berdiri pada 1948
1951	Perlu dibentuk Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN)	Pada 1951 berdiri BMKN; LKI ikut bergabung di dalam BMKN
	Perlu didirikan Balai Penerjemah	Belum terealisasi
	Perlu diadakan pendidikan penerjemah	Dibuat di Universitas Nasional Jakarta

Perlu didirikan badan penerbit buku kebudayaan	Belum terealisasi
Perlu didirikan akademi kesenian	Berdiri antara lain ASRI, Asdrafi, ATNI, IKJ, AMI
Balai Pustaka menjadi badan otonom	Pada 1963 Balai Pustaka menjadi Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka; pada 1985 menjadi Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka; kini berubah menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara
Perlu didirikan balai bahasa	Pada 1947 telah berdiri Balai Bahasa di Bali; pada 1952 di Yogyakarta dan pada 1953 di Makassar; kemudian disusul balai-balai bahasa yang lain
Perlu didirikan museum kesenian	Berdiri Galeri Nasional pada 1999; kemudian banyak didirikan museum seni rupa pribadi/swasta
Perlu dibentuk badan pengarah film (di daerah-daerah)	Dibentuk Badan Pengarah Film Daerah
Perlu didirikan Kantor Urusan Film di bawah Kementerian PP dan K	Pada 1951 dibentuk Panitia Sensor Film yang berada di bawah Departemen PP dan K; pada 1964 lembaga sensor film pindah ke Departemen Penerangan
Perlu dibentuk Badan Sensor Film	Pada 1965 Panitia Sensor Film (BSF) dan pada 1994 berubah lagi menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). Pada 1999 sekretariat LSF pindah ke Depdiknas dan mulai 2001 di bawah BP Kebudayaan dan Pariwisata; sekarang LSF berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

	Perlu didirikan gedung-gedung bioskop	Pihak swasta telah membangun berbagai gedung bioskop di berbagai tempat
1954	Perlu didirikan balai budaya/gedung-gedung kesenian	Telah berdiri taman budaya di seluruh provinsi
	Perlu dibentuk panitia sejarah nasional	Telah dibentuk Panitia Nasional yang menghasilkan buku Sejarah Nasional Indonesia I-VII dan sejumlah penyelenggaraan Kongres Sejarah
	Perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Lektur Film	Dewan Pertimbangan Lektur tidak pernah terwujud
	Perlu didirikan biro penerjemah Perlu dibentuk panitia penyelidikan buku-buku lama tentang filsafat	Belum direalisasikan
	Perlu diselenggarakan pekan raya kebudayaan	Berdiri Dewan Pekan Raya dan Ekshibisi Indonesia Pusat (DEXIP); telah diselenggarakan Pekan Raya Jakarta (kini menjadi Jakarta Fair) dan berbagai festival, pameran, pergelaran seni tingkat nasional dan internasional
	Perlu dibentuk jawatan kebudayaan di tingkat kabupaten dan kecamatan	Sebelum berlaku otonomi daerah di setiap kabupaten/kotamadia berdiri Seksi Kebudayaan dan di tingkat kecamatan Penilik Kebudayaan
	Perlu didirikan Lembaga Film dan Perpustakaan Lektur Film	Berdiri lembaga Sinematek
	Perlu dibentuk panitia sensor	Dibentuk Badan Sensor Film, sekarang Lembaga Sensor Film
	Perlu didirikan Dewan Pertimbangan Siaran Radio	Dibentuk Dewan Pertimbangan Siaran Radio

	Perlu didirikan pendidikan tinggi kesenian	Berdiri antara lain ASRI (ISI Yogyakarta), Asdrafi, ATNI, IKJ, AML, STSI
	Perlu didirikan konservatori seni daerah	Telah berdiri di beberapa daerah (Surakarta, Medan, Padang Panjang, Bali)
	Perlu dibentuk dewan pertimbangan kota	Belum seluruh daerah merealisasikan
	Perlu didirikan sanggar, museum, gedung pertunjukan, balai budaya, taman kebudayaan (untuk anak-anak dan rekreasi)	Telah berdiri berbagai sanggar sampai ke desa-desa, telah berdiri museum, taman budaya, dan tempat-tempat hiburan dan rekreasi serta perpustakaan
	Perlu diselenggarakan pekan kesenian	Telah diselenggarakan berbagai macam pameran, pangelaran, dan festival seni di berbagai tempat baik tingkat daerah maupun tingkat nasional
	Perlu penyempurnaan susunan dan usaha Panitia Sejarah Nasional dan mendesak agar secepat mungkin mengusahakan buku-buku pelajaran sejarah yang seragam dan berdasarkan garis nasional	Dibentuk Panitia Sejarah Nasional; juga Lembaga Sejarah dan Antropologi; dengan konsep penulisan sejarah yang bergeser dari Neerlando-sentris ke Indonesia-sentris telah terbit tujuh jilid buku <i>Sejarah Nasional Indonesia</i>
1991	Perlu dibentuk pusat informasi budaya	Telah dirintis Sistem Informasi Kebudayaan/SIK
	Perlu dibentuk unit misi kebudayaan/pertukaran budaya	Belum direalisasikan
	Perlu didirikan lembaga penerjemah	Belum direalisasikan

2003	<i>Perlu dibentuk Departemen Kebudayaan tersendiri</i>	<i>Belum direalisasikan</i>
	<i>Perlu dibentuk Pusat Budaya Nasional</i>	<i>Belum direalisasikan</i>
	<i>Perlu dibentuk lembaga antarkongres yang independen</i>	<i>Sudah dibentuk Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.27/UM.001/MKP/04 pada 19 mei 2004, tetapi belum melakukan kegiatan yang konkret, bahkan sekarang badan ini tidak berfungsi sama sekali</i>
	<i>Perlu dibentuk lembaga pendorong kedermawanan</i>	<i>Belum direalisasikan</i>
2008	<i>Perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri</i>	<i>Belum direalisasikan meskipun sudah diusulkan sejak Desember 1945 hingga sekarang</i>
2013	<i>Menyusun Grand Design Diplomasi Kebudayaan yang dapat menciptakan keindonesiaan yang unggul dan kompetitif</i>	<i>Dokumen resmi belum terwujud</i>

Dari tabel di atas, diperoleh gambaran seberapa besar perhatian untuk merealisasikan hasil-hasil kongres. Untuk sekadar contoh, dalam bidang kelembagaan dan kepanitiaan, beberapa usul sudah mendapatkan tindak lanjut, tetapi juga masih cukup banyak yang belum terwujud. Meskipun jarak waktu penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka relatif pendek (antara 2–3 tahun saja), hampir semua keputusan itu langsung direalisasikan dan dilaporkan hasilnya pada kongres berikutnya.

Demikian pula halnya dengan KK 1948, 1951, dan 1954, keputusan masing-masing kongres langsung ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan pada kongres berikutnya. Sementara untuk hasil KK 1957 dan 1960, karena perdebatan yang terjadi dilandasi oleh perbedaan ideologi, maka setelah kongres selesai mereka bukan bersama-sama merealisasikan hasil keputusan kongres melainkan menjadikannya bahan polemik yang berkepanjangan. Perdebatan tentang manifesto politik (Manipol) antara kelompok humanis sosialis dan kelompok humanis universal dan kelompok netral yang mulai muncul sejak KK 1957 dan memanasi pada KK 1960, dilanjutkan dalam berbagai kesempatan. Serangan terhadap kelompok humanis universal dan kelompok netral mencapai puncaknya ketika Manifes Kebudayaan (Manikebu) dideklarasikan pada 1963 dan penyelenggaraan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia diadakan pada 1964. Serangan habis-habisan itu membuahkan hasil dengan dilarangnya Manikebu.

Kecenderungan menurunnya perhatian terhadap hasil kongres mulai tampak setelah KK 1991, disambung KK 2003 hingga KK 2013. Hasil kongres-kongres itu tidak banyak berpengaruh pada bentuk kebijakan di bidang kebudayaan, meskipun tujuan diselenggarakannya kongres adalah untuk mendapatkan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan. Meskipun Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah membentuk Badan Pekerja Kongres, badan ini tidak dapat berbuat banyak. Sebagai contoh, hasil kongres 2003 yang seharusnya segera dilaporkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam kenyataan rencana aksi itu tidak pernah dilaksanakan. Demikian pula dengan hasil KK 2008, dalam hal kelembagaan, kongres merekomendasikan untuk “mewujudkan terbentuknya Departemen Kebudayaan”. Rekomendasi itu ditujukan kepada para pengambil keputusan, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam jumpa pers, seperti yang dikutip oleh *Kompas*, ketika ditanya mengenai pembentukan Departemen Kebudayaan secara terpisah, Menbudpar Jero Wacik mengatakan, pembentukan departemen merupakan hak prerogatif presiden. Perubahan kementerian negara menjadi departemen, menurut dia, setidaknya telah menunjukkan komitmen untuk lebih memperhatikan kebudayaan. Dalam kenyataan, meskipun setelah KK 2008 lahir UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan bidang

kebudayaan mendapatkan peluang untuk menjadi sebuah departemen tersendiri, peluang itu tidak dapat diwujudkan. Dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, bidang kebudayaan tetap digabungkan dengan pariwisata.

Dari tabel di atas dapat kita simak, dari beberapa rekomendasi kongres yang berkenaan dengan pembentukan lembaga, ada yang secara cepat direalisasikan dan ada yang hingga kini belum terwujud. Dalam KK pertama pada 1918 diusulkan agar dibentuk lembaga penelitian kebudayaan dan akhirnya usul tersebut diterima dan menjadi salah satu keputusan kongres. Beberapa bulan setelah kongres selesai, usul tersebut langsung ditindaklanjuti. Pada 4 Agustus 1919, berdiri Java-Instituut. AD-ART Java-Instituut disahkan oleh Gubernur Jenderal melalui surat keputusan No. 75 tanggal 17 Desember 1919 dan memiliki masa hidup 29 tahun. Pendirinya antara lain Pangeran Prangwadono, Dr. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, dan Dr. F.D.K. Bosch. Lembaga inilah yang selanjutnya melaksanakan keputusan hasil kongres termasuk menyelenggarakan kongres-kongres berikutnya.

Mengenai pendirian sekolah kerajinan dari KK 1921 dan 1926 telah dijadikan pokok bahasan. Selanjutnya, dalam KK 1929 dan 1937 masalah pengembangan seni kerajinan mendapatkan perhatian peserta kongres. Kongres mengusulkan agar didirikan lembaga pendidikan untuk menampung anak-anak berbakat di bidang seni kerajinan. Pada 1939 berdirilah sekolah kerajinan, Kunst Ambaachtsschool, di Yogyakarta. Peresmiannya baru dilakukan pada 1 Maret 1941. Pelindung sekolah ini adalah KGPAA Praboe Soerjadilaga, yang kemudian menjadi Paku Alam VIII, di samping menjabat sebagai anggota Dewan Pengurus Java-Instituut. Gedung sekolah ini terletak di belakang Museum Sonobudoyo. Yang menarik, bahasa pengantar di sekolah ini adalah bahasa Indonesia.

Masih mengenai pendidikan seni, pada kongres 1948 diusulkan agar didirikan akademi dan lembaga-lembaga pendidikan seni termasuk seni kerajinan. Sebagai realisasi keputusan itu lahirlah Sekolah Menengah Kerajinan Indonesia (SMKI), Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI), Konservatori Karawitan (Kokar), Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), Akademi Tari Nasional Indonesia (ATNI), Akademi Seni Drama dan Film Indonesia (Asdrafi), hingga Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Institut Seni Indonesia (ISI), dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Pendiri ASRI, J. Katamsi, adalah salah seorang guru yang mengajar di Kunst Ambaachtsschool. Di samping itu juga banyak berdiri kursus-kursus, padepokan, atau sanggar kebudayaan/seni di masyarakat yang banyak membantu peningkatan kemampuan pendukung kebudayaan.

Sementara itu, mengenai usul agar didirikan jurusan untuk studi sastra, filsafat, dan budaya Timur pada KK sebelum Indonesia merdeka, direalisasikan dalam bentuk pendirian Fakultas Sastra dan Filsafat (Faculteit der Letteren en Wijsbegeerten) pada 1940. Setelah Indonesia merdeka, tuntutan agar didirikan jurusan-jurusan bahasa, sastra, filsafat, sejarah, budaya di berbagai perguruan tinggi langsung dipenuhi dan kini telah berdiri jurusan-jurusan tersebut di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Di samping usul dibentuknya lembaga-lembaga pendidikan kesenian, juga diusulkan lembaga yang mengurus kebudayaan. Dalam KK 1948 diusulkan agar dibentuk lembaga kebudayaan, yang secara independen mengurus pengembangan kebudayaan bangsa. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya peserta menyepakati untuk dibentuk Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Sebagai ketua sementara ditunjuk Mr Wongsonegoro dan sebagai wakil ketua dari angkatan muda ditunjuk Dr Abu Hanifah. Tugas ketua sementara adalah menyelenggarakan rapat khusus untuk menyelesaikan naskah Anggaran Dasar yang belum tuntas dibahas di dalam kongres dan menjaring tanggapan dan masukan dari peserta serta melengkapi nama-nama pengurus LKI.

Dalam tempo dua bulan, Anggaran Dasar dan susunan pengurus definitif LKI dapat diselesaikan. Yang ditetapkan sebagai Ketua Dr. Bahder Djohan dan Penulis Umum Suratno Sastroamidjojo. Dalam penjelasannya, Bahder Djohan selaku ketua LKI definitif menyatakan bahwa rencana peresmian organisasi LKI ialah pada 1 Januari 1949 di Yogyakarta. Tetapi, berhubung situasi keamanan Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik pada saat itu tidak mendukung, karena sedang dalam pendudukan Belanda, rencana itu gagal. Akhirnya LKI baru dapat berdiri secara resmi setahun kemudian, pada 9 Maret 1950 di Jakarta.

Setelah organisasi LKI secara resmi berdiri, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan penyelenggaraan KK 1951 di Bandung. Dalam kongres ini diputuskan untuk membentuk Panitia Kesimpulan, dengan tugas

selambat-lambatnya dua bulan setelah Kongres selesai, memajukan/meneruskan kesimpulan-kesimpulan kepada semua organisasi kebudayaan/kesenian baik yang turut serta dalam kongres di Bandung maupun yang tidak sempat datang untuk ikut mempertimbangkan, melalui pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dalam waktu dua bulan setelah menerima kesimpulan-kesimpulan itu, organisasi tersebut diminta supaya menyatakan pendapatnya terhadap kesimpulan-kesimpulan itu. Kemudian, enam bulan setelah kongres selesai, yakni pada 11 Oktober 1951, pengurus LKI diminta mengusahakan *konferensi* guna membicarakan dan mengambil putusan tentang kesimpulan-kesimpulan itu dan kemudian membentuk pengurus baru (dalam konferensi itu hendaknya diundang semua organisasi kebudayaan/kesenian dari seluruh Indonesia untuk menyetujui kesimpulan yang diajukan).

Berdasarkan rekomendasi kongres di atas, Panitia Kesimpulan segera melaksanakan tugas dan hasilnya segera disampaikan kepada peserta kongres. Enam bulan kemudian, yakni pada 12–14 April, seharusnya diselenggarakan Konferensi Kebudayaan. Namun, ternyata baru dapat diselenggarakan pada 14 April 1952. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kongres di Bandung, peserta konferensi dengan suara bulat memutuskan pendirian Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN). Dengan berdirinya badan baru ini, pada 12 Mei 1952, LKI yang dibentuk berdasarkan rekomendasi KK 1948 mengambil keputusan untuk meleburkan diri ke dalam BMKN. Penetapan BMKN sebagai badan hukum berdasar pada Ketetapan Menteri Kehakiman Tanggal 23 Agustus 1952 No. JA.5/109/10.

Menarik untuk dicatat adalah tentang latar belakang lahirnya BMKN yang memiliki banyak kemiripan dengan pendirian Java-Instituut. Masalah kelembagaan kebudayaan pada KK 1951 menjadi bahan perdebatan yang cukup serius, karena para peserta sadar bahwa untuk mengurus kebudayaan diperlukan wadah organisasi yang tepat. Secara khusus dibentuk sidang untuk membahas hal itu. Dalam makalahnya, Mohammad Yamin menyampaikan enam dalil/pokok pikiran mengenai lembaga kebudayaan. Menurut Yamin, ada tiga bentuk kelembagaan yang mengurus kebudayaan.

Pertama adalah yang diterapkan di negara-negara demokrasi totaliter (komunis) seperti yang berlaku di Rusia. Urusan pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Hasilnya, seperti dapat disaksikan, kebudayaan Rusia dikagumi oleh banyak bangsa.

Kedua adalah yang diterapkan di negara-negara nasional demokratis atau liberal seperti di Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Urusan pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dipecah menjadi dua bagian, yaitu oleh pemerintah dan sebagian besar ditangani oleh lembaga yang berkembang di masyarakat. Hasilnya, semua bangsa juga mengakui karya budaya mereka sangat mengagumkan.

Ketiga adalah yang ditawarkan oleh Yamin. Setelah memperhatikan kondisi negara Indonesia yang pluralistis, terdiri atas berbagai macam suku bangsa (multietnik), beranekaragam kebudayaan (multikultur), menggunakan macam-macam bahasa dan dialek (multibahasa) dan multimental, serta memperhitungkan pengaruh internasional dan taraf kemajuan, maka pemeliharaan kebudayaan dalam negara RI, Yamin menawarkan model perpaduan. Perpaduan antara kedua model di atas, dalam bentuk yang diperluas. Bentuk kelembagaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) dilakukan oleh kelembagaan pemerintah; (2) dilakukan oleh kelembagaan di masyarakat; dan (3) dilakukan oleh lembaga campuran antara masyarakat dan pemerintah (*Indonesia*, 1-2-3, Tahun III:414-415).

Bertolak dari pendapat Yamin, untuk merealisasikan bentuk kelembagaan nomor tiga, yaitu lembaga campuran antara pemerintah dan masyarakat, pada KK 1951 disepakati mengganti Lembaga Kebudayaan Indonesia hasil KK 1948. Setelah melalui Konferensi Kebudayaan 1952 dibentuklah Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN). Badan baru ini dapat memulai aktivitasnya dengan menggunakan pegawai, kantor sekretariat, perlengkapan, dan keuangan yang dimiliki LKI setelah mendapat persetujuan Menteri PP dan K.

Sebagai badan hukum, BMKN memilih bentuk perkumpulan berasaskan "kerakyatan dan kebebasan". Sebagai sebuah perkumpulan, BMKN bersifat menghubungkan dan mengkoordinasikan usaha-usaha organisasi-organisasi dan orang per orang di bidang kebudayaan. Tujuannya ialah untuk membangun

dan mengembangkan kebudayaan nasional yang merupakan getaran dan pancaran jiwa rakyat Indonesia, yang hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sewajarnya dan organis dalam masyarakat dan sejarah rakyat Indonesia. Menurut catatan BMKN per tanggal 19 November 1954, ditambah hasil penelusuran data sampai 1995, jumlah anggota perorangan BMKN 198 orang dan organisasi/ lembaga sebanyak 273 organisasi. Sayangnya, prestasi BMKN tidak secerah Java -Instituut yang berhasil menyelenggarakan Kongres Kebudayaan sebanyak enam kali, sementara BMKN hanya tiga kali, yaitu Kongres Kebudayaan 1954, 1957, dan 1960. Selain itu, BMKN paling tidak telah menyelenggarakan berbagai macam diskusi, pertunjukan seni, pementasan drama, deklamasi/baca puisi, pameran lukis, dll. Setelah meletus peristiwa G30S, BMKN secara pelan-pelan menjadi tak berdaya dan kini hanya tinggal nama. Sementara itu, organisasi kebudayaan Java-Instituut yang berdiri sebelum Indonesia merdeka (berdiri 1919) bubar demi hukum pada 4 Agustus 1948 setelah berusia 29 tahun.

Selain rekomendasi tentang perlu dibentuknya BMKN, juga diusulkan berdirinya berbagai lembaga kebudayaan yang lain. Dalam KK 1951 diusulkan lembaga-lembaga seperti: Balai Penerjemah, Lembaga Pendidikan Penerjemah, Badan Penerbit Buku Kebudayaan, Akademi Kesenian, Balai Bahasa, Museum Kesenian, Badan Sensor Film, dan Gedung-gedung Bioskop. Dalam KK 1954 diusulkan lembaga-lembaga: Balai Budaya/Gedung-gedung Kesenian, Panitia Sejarah Nasional, Biro Penerjemah, Panitia Penyelidikan Buku-buku Lama tentang Filsafat, Pekan Raya Kebudayaan, Jawatan Kebudayaan Kabupaten dan Kecamatan, Dewan Pertimbangan Siaran Radio, Pendidikan Tinggi Kesenian, Konservatori Seni Daerah, Dewan Pertimbangan Kota, Sanggar-sanggar, Museum, Gedung Pertunjukan, Balai Budaya, Taman Kebudayaan, dll. Sementara itu, dalam KK 1991 diusulkan pembentukan: Pusat Informasi Budaya, Unit Misi Kebudayaan/Pertukaran Budaya, dan Lembaga Penerjemah; sedangkan pada KK 2003 diusulkan pendirian: Pusat Budaya Nasional, lembaga antarkongres yang independen, dan lembaga pendorong kedermawanan.

Dari sekian banyak rekomendasi tersebut hampir semua telah direalisasikan. Seiring dengan perkembangan organisasi pemerintahan, lembaga-lembaga yang didirikan antara lain: museum (pemerintah/negeri maupun swasta), Galeri

Nasional di Jakarta, taman budaya (TB), perpustakaan nasional dan daerah, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Balai Bahasa, Balai Penelitian Arkeologi (Balar), Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST), Balai Studi dan Konservasi, Lembaga Sensor Film (LSF), serta lembaga pendidikan seni di berbagai jenjang pendidikan. Di samping itu juga berkembang lembaga kebudayaan dan kesenian di masyarakat.

Satu-satunya rekomendasi kongres yang telah berulang kali diusulkan tetapi belum mendapatkan perhatian adalah mengenai pembentukan Departemen Kebudayaan tersendiri. Usul ini sesungguhnya telah muncul pada KK 1948. Bahkan jauh sebelum KK 1948, dalam Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi pada 31 Desember 1945 juga diusulkan agar dibentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri. Dalam KK 2003 di Bukittinggi dan Kongres Kesenian Indonesia II pada 2005, usul pembentukan Departemen Kebudayaan diangkat lagi. Usul pembentukan lembaga pemerintah yang menangani kebudayaan setingkat menteri bagi sebuah negara yang terdiri atas 483 suku bangsa dan masing-masing memiliki budaya yang beranekaragam dinilai cukup rasional di samping peran kebudayaan yang amat besar dalam memajukan persatuan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945.

Sebagaimana diketahui, kebudayaan bersatu dengan bidang pendidikan dalam waktu yang cukup panjang, selama 55 tahun. Semula bidang kebudayaan bernaung dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (Kementerian Pengajaran 1945–1948 dan Kementerian PP dan K, 1948–1964), kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kementerian PD dan K, 1964–1966). Ketika diadakan penataan organisasi pada 1966, kebudayaan bernaung dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud, 1966–1999), kemudian Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 1999–2000). Mulai awal 2000 kebudayaan bergabung dengan Pariwisata di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Departemen ini baru berjalan beberapa bulan lalu diganti menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenegbudpar) yang mempunyai misi menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Di samping itu dibentuk satu lembaga yang lain, yaitu Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar), yang mempunyai

misi melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang digariskan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Tetapi, belum berusia dua tahun, berdasarkan Keputusan Presiden No. 29, 30, 31, dan 32 Tanggal 26 Mei 2003 BP Budpar yang menangani kegiatan operasional kebudayaan dibubarkan.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, status Kementerian Kebudayaan berubah lagi menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Perubahan bentuk kelembagaan yang sangat sering itu memberi pengalaman dan pelajaran yang amat berharga bagi para pengelola kebudayaan, sehingga mereka sampai pada pemikiran bahwa perlu dilakukan penataan kembali posisi (reposisi) kelembagaan kebudayaan. Ketidakstabilan lembaga pastilah membawa dampak yang kurang baik bagi kinerja lembaga dan bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, sudah saatnya kebudayaan dapat berdiri secara mandiri dalam kelembagaan pemerintah.

Tetapi, mengapa usul tersebut tidak mendapatkan perhatian? Bukankah KK merupakan forum puncak dan terhormat, dihadiri oleh para pemilik kebudayaan, seniman, budayawan, cendekiawan, wartawan, pemangku adat, dll yang patut didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya? Bukankah kongres itu berlangsung atas inisiatif pemerintah dan juga dihadiri oleh para wakil rakyat dan pengambil keputusan?

Bukti lain kesungguhan merealisasikan hasil KK, selain KK 1991 dan 2003, adalah pemenuhan usul agar dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (KK 1954). Sebagai realisasi Badan Pekerja BMKN, ditambah Achdiat Kartamihardja, MA Salmun, Anas Ma'ruf, dan S Dharta, mereka menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Masyarakat. Akhirnya, undang-undang itu menjadi kenyataan tiga puluh lima tahun kemudian, setelah ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada masa Reformasi, UU itu diusulkan untuk diamendemen dan telah mendapatkan pengesahan, yaitu menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, mengenai usul kenaikan anggaran, tanggapan diperoleh dari Dewan Perancang Pembangunan Nasional (Depernas). Dalam Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I 1961-1969, dalam Lampiran C, anggaran Kementerian PP dan K ditetapkan sebesar 25% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayang, persetujuan tersebut belum terwujud karena kondisi keuangan pada saat itu belum memungkinkan, di samping kondisi politik pemerintahan sedang mengalami goncangan.

Usul agar anggaran pendidikan dinaikkan muncul lagi pada masa Reformasi dan kini alokasi anggaran tersebut telah menjadi kenyataan, yaitu dengan dicantumkannya anggaran sebesar 20% dari APBN dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 hasil amendemen. Bunyi kalimat penetapan itu adalah sebagai berikut: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapat dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Untuk bidang kebudayaan, dalam membuat rancangan pembangunan, Depernas sangat memperhatikan hasil-hasil kongres atau konferensi kebudayaan sebagai bahan masukan. Besarnya perhatian itu terlihat dalam kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961–1969. Dalam Bab II Ketentuan Umum, Bidang Mental/Agama/Kerohanian/ Penelitian, di dalam butir 6 disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesenian adalah: “Mengusahakan agar segala bentuk dan perwujudan kesenian menjadi milik seluruh rakyat dan menyiarkan sifat-sifat nasional.” Sementara itu, pada bagian program, selama 1961–1969 khusus untuk bidang kebudayaan, sasaran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

“Pembangunan semesta di bidang kebudayaan dititikberatkan pada: (1) Proyek-proyek yang dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan kebudayaan secara massal di seluruh Indonesia; (2) Melindungi kebudayaan nasional terhadap pengaruh kebudayaan asing yang merusak kepribadian Indonesia; (3) Pusat konsentrasi kekuatan kebudayaan nasional, ialah: desa, sekolah, pabrik, angkatan bersenjata, dan lain sebagainya; (4) Pembangunan kebudayaan harus diselenggarakan dalam rangka nation and character building; (5) Proyek-proyek urgen meliputi:(a) seni suara/musik; (b) seni tari; (c) sandiwar/seni drama; (d) perpustakaan/kesusastraan; (e) film; (f) taman kebudayaan (museum/galeri seni nasional) rakyat sedikit-sedikitnya sebuah di tiap ibu kota daerah tingkat I; (g) perundang-undangan musik, sastra, dan sebagainya; (h) film: film bukan

semata-mata barang dagangan melainkan alat pendidikan dan penerangan. Dalam impor film perlu ditentukan keseimbangan, kesesuaian dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Film Indonesia perlu dilindungi dari persiangan dengan luar negeri. Hanya dengan demikian ia terjamin dalam kemajuan dan perkembangannya.”

Adapun proyek-proyek bidang kebudayaan yang telah dimasukkan dalam perencanaan beserta jumlah anggarannya adalah: (1) Penggalan kekayaan kebudayaan (Nias, Kalimantan Tengah, Toraja, Flores, Maluku) dengan kode: AA.1, jumlah anggaran Rp50.000.000; (2) Proyek Museum Nasional, dengan kode: AA.2, jumlah anggaran Rp313.000.000; (3) Galeri Kesenian Nasional, dengan kode: AA.3, jumlah anggaran Rp469.000.000; (4) Perpustakaan Nasional, dengan kode: AA.4, jumlah anggaran Rp453.000.000; (5) Lembaga Bahasa dan Kesusatraan, dengan kode: AA.5, jumlah anggaran Rp44.000.000; (6) Taman Kebudayaan, dengan kode: AA.6, jumlah anggaran Rp110.000.000; (7) Terjemahan Alquran, dengan kode: AA.7, jumlah anggaran Rp62.000.000; (8) Terjemahan Alkitab, dengan kode: AA.8, jumlah anggaran Rp33.000.000; (10) Terjemahan Weda dan Dharma Padda, dengan kode: AA.9, jumlah anggaran Rp20.000.000.

Di samping itu masih ada beberapa proyek yang dikategorikan sebagai Proyek Cadangan, yaitu: (1) Teater Nasional; (2) Konservatorium Nasional; (3) Sirkus Nasional; (4) Cagar Alam dan Taman Margasatwa; (5) Perpustakaan Desa. Pelaksanaan semua rencana itu baru berjalan beberapa tahun dan dari sekian banyak program hanya beberapa program saja yang dapat dilaksanakan karena terbatasnya dana. Program pembangunan kemudian terhenti sama sekali karena meletus peristiwa G30S, yang mengakibatkan terjadi perubahan kepemimpinan pemerintahan. Presiden Sukarno digantikan oleh Presiden Soeharto dan kebijakan pembangunan nasional mengalami perubahan pula.

Uraian di atas baru menggambarkan sedikit dari realisasi hasil kongres, baik yang sudah maupun yang belum. Uraian baru menyentuh masalah pembentukan kelembagaan saja. Sementara berbagai keputusan atau kesimpulan yang berkaitan dengan upaya kebijakan dan strategi pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan belum diuraikan. Pada bagian ini banyak yang

belum direalisasikan terutama hasil kongres 1991, 2003, 2008, dan 2013. Dalam KK 2008 ada rekomendasi penting yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik untuk ditindaklanjuti. Tetapi, dalam kenyataan, rekomendasi itu tidak pernah direalisasikan, yaitu tentang “mewujudkan terbentuknya Departemen Kebudayaan”.

Pada 2011, dalam susunan kabinet *reshuffle* muncul nomenklatur kementerian baru, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu, dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan munculnya nomenklatur baru itu maka bidang kebudayaan yang telah sebelas tahun digabungkan dengan bidang pariwisata, disatukan kembali dengan pendidikan. Penyatuan kembali ini menunjukkan “eksperimen penggabungan” itu gagal dan oleh sebab itu dirujuk kembali dengan bidang pendidikan. Antara kebudayaan dan pendidikan ataupun sebaliknya, memang ditakdirkan memiliki hubungan yang amat dekat. Keduanya saling memerlukan. Dengan nomenklatur baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berarti kita kembali pada konsep awal seperti yang dirancang oleh para pendiri bangsa dengan menempatkan Pasal 31 tentang pendidikan berdampingan dengan Pasal 32 tentang kebudayaan di dalam UUD 1945.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian semua pihak untuk merealisasikan keputusan dan rekomendasi KK per 1991 cenderung menurun. Berbagai pendapat menyatakan, hasil-hasil kongres yang diselenggarakan akhir-akhir ini—yang didapatkan dengan susah payah dan menghabiskan biaya yang tidak kecil itu—cenderung tidak memberikan manfaat yang berarti. Banyak yang berhenti pada keputusan atau rekomendasi saja. Tidak ada langkah realisasi yang konkret. Tidak ada evaluasi pelaksanaan keputusan dan tidak ada pula laporan pada kongres berikutnya. Seperti yang ditulis oleh Putu Wijaya, “Keputusan-keputusan di dalam kongres itu berhenti sebagai keputusan. Tak pernah ada tindakan eksekusi keputusan.” Kenyataan seperti ini membuat Putu dengan setengah berseloroh mengatakan: “Sudah waktunya ada sebuah kongres untuk membicarakan tabiat kongres itu sendiri (Putu Wijaya, 1997:67).” Di lain kesempatan, Putu juga memberikan catatan mengenai berhentinya hasil dari

sekian banyak kongres. Menurut Putu, keputusan kongres amat tergantung pada sensitivitas lembaga yang mendapatkan rekomendasi. Sebagus-bagusnya rekomendasi, jika lembaga atau seseorang bersikap seperti tembok terhadap rekomendasi yang diberikan, tetap saja hasil kongres tidak akan berpengaruh banyak (*Kompas Cyber Media*, 20/10/03).

Kritik yang lebih tajam disampaikan oleh Hasanuddin WS, Guru Besar Ilmu Sastra Universitas Negeri Padang (UNP). Ia menyatakan bahwa kongres yang diselenggarakan bukan “kongres kebudayaan” tetapi “kebudayaan kongres”. Maksudnya, jika kongres hanya menghasilkan jargon dan pelaksanaan rekomendasi kongres tergantung pada kemauan pemerintah yang sedang berkuasa, maka kongres itu hanya latah saja mengikuti kongres lain seperti kongres bahasa (*Media Indonesia*, 17/10/2003).

Mengapa kesungguhan masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif untuk merealisasikan hasil kongres semakin menurun bila dibandingkan dengan KK sebelum 1960? Dari berbagai kritik yang dilontarkan terhadap teknis penyelenggaraan kongres, kesimpulan, dan realisasi hasil kongres antara lain dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. KK sebelum 1960-an (dan juga KK sebelum Indonesia merdeka) diselenggarakan oleh lembaga kebudayaan non-pemerintah, yakni oleh LKI dan BMKN. Mulai KK 1991, prakarsa dan penyelenggara adalah pemerintah. Pergeseran peran ini menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap tema dan tujuan kongres, yang hanya untuk kepentingan kekuasaan dan tidak bertolak dari permasalahan nyata yang berkembang di masyarakat. Hal ini menyebabkan timbulnya sikap skeptis terhadap kongres.
2. Keputusan kongres 1991 dinilai sarat dengan muatan politik, mengekang kebebasan, dan hanya untuk mengekalkan kekuasaan. Keputusan kongres yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, sementara dari pihak pemerintah maupun legislatif sendiri kurang serius dalam merealisasikan keputusan kongres.
3. Peserta kongres sebelum 1960-an berasal dari anggota LKI atau BMKN

perorangan dan wakil-wakil lembaga kebudayaan di bawah BMKN. Peserta hadir dengan biaya transpor dan penginapan dari kantong sendiri. Setelah memasuki masa pembangunan, mulai KK 1991, biaya penyelenggaraan ditanggung oleh pemerintah (pusat dan daerah). Peserta kongres dibedakan menjadi dua macam: (1) Peserta kongres yang ditanggung oleh panitia; berasal dari lembaga-lembaga kebudayaan di pemerintahan (pejabat pemerintah) dan budayawan, seniman, cendekiawan, wartawan, pemangku adat, dan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah; dan (2) Peserta kongres yang datang dengan biaya sendiri. Mekanisme penunjukan peserta seperti ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan terhadap peserta yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kongres disebut sebagai “kongres plat merah”, “kongres baju Korpri”, “kongres baju safari”, dan lain-lain. Berbagai sebutan itu membawa implikasi terhadap kesungguhan merealisasikan hasil kongres.

4. Kehadiran wakil dari berbagai lembaga kebudayaan sebagai peserta kongres sebelum 1960 sangat membantu dalam merealisasikan keputusan kongres karena lembaga-lembaga itu merupakan agen pelaksana keputusan kongres, sedangkan peserta KK 1991 dan 2003 kebanyakan bersifat perorangan. Peserta dari wakil lembaga kebanyakan berasal dari lembaga pemerintah yang berperan sebagai pelaksana program dan anggaran tetapi sangat tergantung dari dana yang dapat disediakan oleh pemerintah setiap tahun.
5. Materi KK 1991 dan 2003 dinilai terlalu luas dan abstrak. Tidak menitik pada permasalahan aktual yang sedang terjadi di masyarakat.
6. Sebelum 1960, pada sidang pleno pertama biasanya disampaikan laporan perkembangan atas realisasi hasil kongres dan hal itu tidak dilakukan pada KK 2003 di Bukittinggi maupun dalam Kongres Kesenian Indonesia II pada 2005 yang lalu.

Ada upaya agar keputusan kongres memiliki “daya ikat” dan “daya dobrak” yang kuat, seperti yang pernah dilakukan pada KK 1951. Pada bagian akhir

kesimpulan, kongres 1951 ditutup dengan jadwal tindak lanjut yang ketat. Antara lain ditutup dengan kalimat:

“Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima kesimpulan-kesimpulan itu, organisasi tersebut diminta supaya menyatakan pendapatnya terhadap kesimpulan-kesimpulan itu. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Kongres selesai, yakni pada tanggal 11 Oktober 1951, Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia diminta mengusahakan KONFERENSI guna membicarakan dan mengambil putusan tentang kesimpulan-kesimpulan itu, dan kemudian membentuk pengurus baru.”

Upaya seperti itu diulang pada KK 2003 di Bukittinggi. Pada bagian akhir Keputusan Kongres ditutup dengan kalimat yang secara tegas meminta kepada pihak pengambil keputusan di lingkungan eksekutif dan legislatif untuk menyosialisasikan dan merealisasikan hasil kongres. Dalam rekomendasi juga diminta agar pemerintah membentuk lembaga antarkongres yang independen dan memberikan prioritas perhatian agar lembaga tersebut dapat menelusuri perkembangan realisasi berbagai rekomendasi.

Demikian pula halnya pada bagian akhir Keputusan Kongres Kesenian Indonesia I 1995, ditutup dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan bahkan secara tegas menunjuk Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk merealisasikan keputusan kongres. Dalam Kongres Kesenian Indonesia II 2005, pada bagian akhir kesimpulan ditambah dengan sejumlah “Tuntutan” dan “Rencana Aksi”. Di dalam “Rencana Aksi” itu dinyatakan bahwa hasil kongres akan disampaikan langsung kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD, untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti. Di samping itu, juga akan diserahkan kepada Menko Kesra, Menkominfo, Menbudpar, Mendiknas, Mendagri, Menkeu, Bappenas, Menteri BUMN, Menhankam, Kapolri, Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti. Sementara itu, kepada Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film, dituntut untuk membentuk Tim Khusus dan memfasilitasi pelaksanaan tuntutan dan rencana aksi di atas.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak pemerintah setelah KK 2003 di Bukittinggi adalah membentuk lembaga antarkongres yang independen. Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.27/UM. 001/

MKP/04 Tanggal 19 Mei 2004, dibentuk Badan Pekerja Kongres Kebudayaan. Dalam lampiran disebutkan bahwa tugas badan ini adalah mengawal, mengevaluasi, menyosialisasikan, dan mengadvokasi rumusan, usul, dan/atau saran suatu kongres serta merencanakan dan turut melaksanakan KK berikutnya. Meskipun pengurus badan ini telah dilantik dan telah bekerja hampir dua tahun, belum ada langkah konkret sesuai dengan tugasnya, terutama langkah konkret dalam merealisasikan hasil kongres. Sementara itu, terkait realisasi hasil Kongres Kesenian Indonesia II 2005, hingga kini belum ada tanda-tanda yang dilakukan pihak mana pun untuk mengambil ancang-ancang merealisasikannya.

Apakah kenyataan seperti di atas akan berlanjut terus? Perlu ada peninjauan ulang terhadap pengorganisasian penyelenggaraan kongres, agar forum kongres tetap menjadi ajang yang tepat untuk membahas dan mencari kesepakatan tentang langkah-langkah dalam mengatasi masalah kebudayaan.

Mengenai keinginan peserta KK untuk memandirikan pengembangan kebudayaan dengan membentuk Departemen Kebudayaan, hal serupa sudah muncul sejak Musyawarah Kebudayaan pada Desember 1945, yang kemudian juga dimasukkan ke dalam kesimpulan kongres-kongres berikutnya hingga KK 2003 dan 2008. Namun, hingga kini usul ini belum juga direalisasikan. Bahkan posisi kebudayaan diuji coba digabungkan dengan bidang pariwisata (2000) dan setelah eksperimen itu dinilai gagal, bidang kebudayaan dikembalikan untuk bersatu dengan bidang pendidikan (2011).

Mungkin, karena lelah mengusulkan tetapi tidak mendapatkan persetujuan, dalam KK 2003 muncul wacana bahwa sebaiknya dibentuk Lembaga Penelitian Kebudayaan semacam Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ada pula yang mengusulkan agar dibentuk Dewan Pertimbangan Kebudayaan. Ada lagi yang mengusulkan agar di bentuk “Pusat Kebudayaan Indonesia” di luar negeri, seperti halnya Erasmus Huis, Japan Foundation, dan Goethe Institute. Anehnya, seperti ditulis oleh koran *Suara Merdeka*, lembaga-lembaga “yang sangat diharapkan direkomendasikan” justru tak dimasukkan dalam rumusan rekomendasi. Sementara itu, tuntutan kedua tentang Departemen Kebudayaan bukanlah tuntutan baru. Jauh hari sebelumnya, tuntutan ini telah berdentung, antara lain pada Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi pada 31 Desember 1945;

Kongres Kebudayaan di Magelang pada 1948; kongres serupa di Solo pada 1954, di Denpasar pada 1957, di Bandung pada 1990, dan di Bukittinggi pada 2003. Pada akhirnya, para seniman memang harus dekat dengan partai politik untuk mewujudkan tuntutan itu. Pasalnya, selama ini, agenda seperti itu memang tidak tersentuh dalam sidang-sidang mereka (*Koran Tempo*, 6 Oktober 2005). Dari sebelas rekomendasi, poin satu hingga empat lebih ditekankan pada penguatan kesenian daerah, termasuk rekomendasi tentang dukungan pendanaan APBN, APBD, dukungan perusahaan BUMN, dan perusahaan swasta. Juga agar memberikan prioritas bagi perkembangan pendidikan dan penguatan seni di Indonesia Timur. Sementara itu, yang lain lebih menekankan pada persoalan kesenian secara keseluruhan, termasuk pembentukan balai penelitian, kantong budaya, dan persoalan perlindungan hukum. Dua tuntutan hasil kongres ini adalah realisasi Undang-Undang Kesenian dan pembentukan Departemen atau Kementerian Kebudayaan.

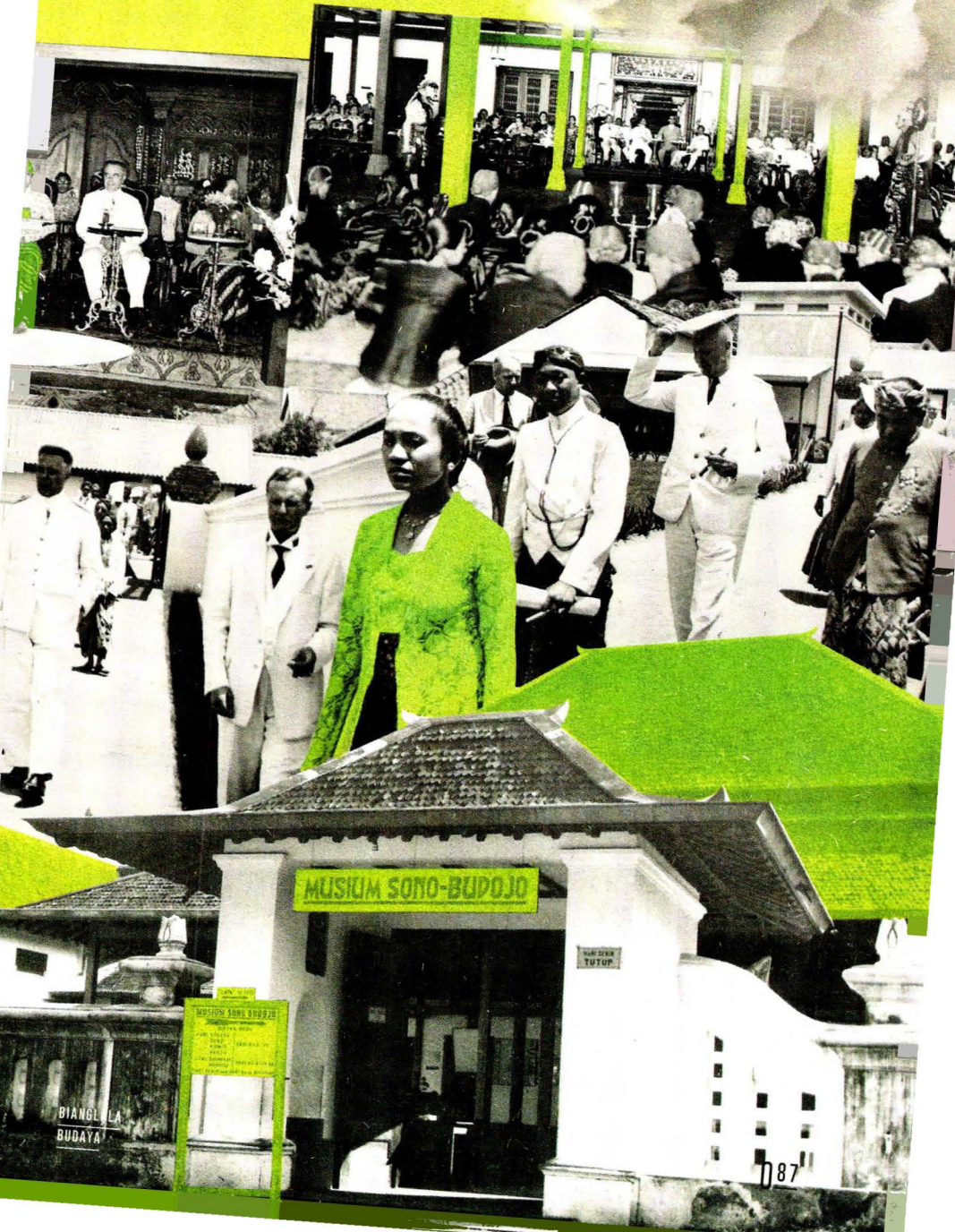
Gaung yang kuat dari berbagai kongres kebudayaan daerah serta bahasa dan sastra daerah adalah rekomendasi agar pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—setelah ditetapkan UU tentang Otonomi Daerah—mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) kebudayaan daerah. Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, dll telah menerbitkan Perda tentang Pelestarian Kebudayaan. Selain itu, juga diusulkan agar bahasa dan sastra serta kesenian daerah dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal. Ada pula yang mengusulkan agar di daerah dibentuk Dewan Pembina Bahasa. Sementara itu, khusus untuk pelestarianinggalan purbakala, muncul desakan agar pemerintah dan DPR mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang penelitian, perlindungan, dan pengelolaan Benda Cagar Budaya.

Foto-foto suasana seputar peresmian pendopo bagian Timur dari Museum Sonobudoyo pada 1 Maret 1941.

(Dari Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo, Yogyakarta)



MUSIUM SONO-BUDOJO



MUSIUM SONO-BUDOJO

MANGKUP TUTUP

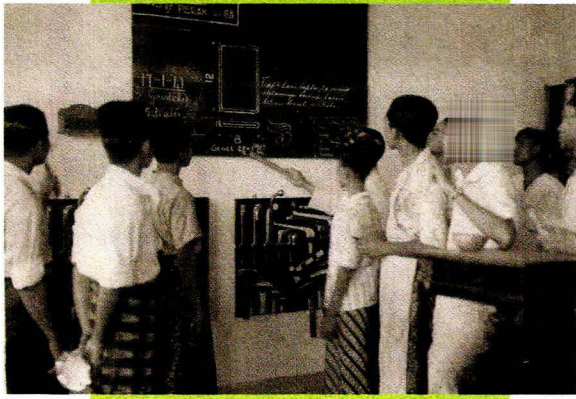
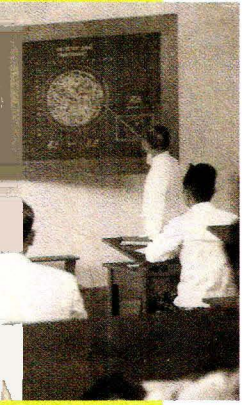
MUSIUM SONO-BUDOJO
MANGKUP TUTUP

BIANGLA
BUDAYA

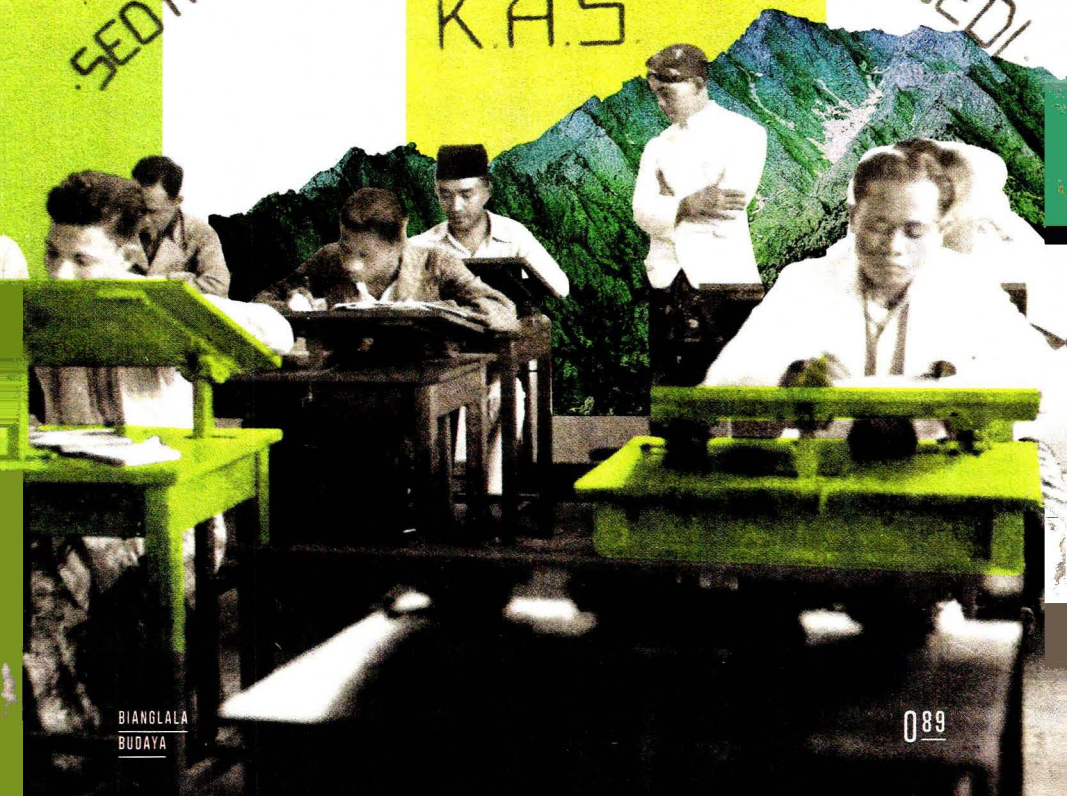
087

Foto-foto suasana belajar-mengajar
di Kunst Ambachtsschool.
(Dari Koleksi Museum Negeri
Sonobudoyo, Yogyakarta)





SEDYANING PIWOELANG ANGESTI BOEDI
K.A.S.





BAB

04

Relevansi Kongres Kebudayaan 1918

Membangun kesepakatan (*consensus*) menjadi satu ikatan (*commitment*) satu bangsa yang terdiri atas hampir 500 suku bangsa yang beraneka ragam budaya bukanlah hal yang gampang. Perjuangan untuk mencapai tujuan itu sangat panjang dan melelahkan. Pergolakan bersenjata untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah yang digelorakan di berbagai tempat belum membuahkan hasil. Di samping rakyat banyak yang menjadi korban jiwa, hidup semakin sengsara, kekuatan untuk melawan juga menjadi semakin melemah. Sebaliknya, penjajah semakin kuat, dapat bertindak leluasa menindas rakyat. Keberhasilan penerapan politik adu domba dan memecah belah kekuatan yang digunakan oleh penjajah telah menyadarkan para pemuda bumiputra untuk menggunakan cara lain. Cara lain itu adalah dengan membangun kebersamaan dalam satu ikatan kebangsaan.

Kesadaran Berbangsa dan Kesadaran Berbudaya Bangsa

Awal dari bangkitnya kesadaran itu ditandai dengan berdirinya organisasi kemasyarakatan BO. Doktrin perjuangan yang ditanamkan kepada seluruh anggota adalah menumbuhkan semangat kebangsaan. Kesadaran itu tumbuh dengan berbagai alasan, antara lain setelah mereka menyerap berbagai ilmu ketika belajar di Belanda, setelah banyak membaca buku berbagai cabang ilmu, serta bergaul dan berdiskusi dengan pemuda-pemuda dari berbagai bangsa. Kelompok mereka saat itu lebih dikenal dengan sebutan kaum terpelajar atau priyayi terpelajar (Kuntowijoyo, 2004).

Peristiwa berdirinya BO yang kemudian dikenal sebagai Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908, menurut Prof. Dr. Daoed Joesoef (*Kompas*, 19/05/12), mempunyai prinsip mengutamakan budi luhur yang lahir sebagai hasil perpaduan antara semangat nasional yang mulai hidup bernyala dalam membasmi sebab pokok kemiskinan, yaitu penjajahan, dan kesadaran tentang kemajuan nasional demi peningkatan kecerdasan anak bumiputra. Caranya melalui pencerahan akal budi yang dimungkinkan oleh pengembangan pendidikan dan budaya kemajuan. Jelas sekali betapa sepak terjang kaum muda terpelajar pendiri dan penggerak BO itu secara esensial memotori satu gerakan budaya, yang dengan sadar dan sengaja mengarahkan gerakan mereka ke arah (pembentukan) masa depan. Sebuah masa depan yang bermuara pada pembentukan satu negara-bangsa dengan tidak membedakan asal-usul, keturunan, agama, dan antara masyarakat kaya dan yang masih miskin.

Tumbuhnya kesadaran berbangsa itu makin tampak ke permukaan ketika para pemuda bumiputra yang sedang belajar di Belanda dan menjadi anggota perkumpulan *Indische Vereeniging* tidak mau lagi mengutamakan sifat kedaerahan (Hatta, *Bahasa dan Sastra*, No.1/V, 1979). Mereka kemudian mendirikan *Indonesisch Verbond*. Kata *inlander* sebagai sebutan bagi orang-orang bumiputra yang diberikan oleh penjajah berubah menjadi *Indonesier*. Kata itu diperkenalkan oleh Prof. Mr Van Vollenhoven sebagai ahli hukum adat melalui bukunya yang berjudul *De Indonesier en Zijn Grond*. Sesudah

itu, kata Indonesia banyak digunakan oleh pemuda bumiputra yang belajar di Belanda. Dalam kongres internasional yang mereka hadiri secara terbuka, dipropagandakanlah kata Indonesia itu. Pers di tanah air kemudian mengambil alih kata itu dan secara terus-menerus kata itu digunakan.

Mengenai tumbuhnya kesadaran berbudaya di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa, berdasarkan pada berbagai bukti artefak masa prasejarah, kesadaran masing-masing suku bangsa itu telah ada meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Kesadaran itu ditandai oleh aktivitas semua suku bangsa untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang memiliki ide, konsep, sistem nilai, perilaku, dan berbagai macam benda sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menanggapi lingkungan hidupnya. Berbagai macam tinggalan itu—baik yang berwujud benda (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*)—memberikan indikasi bahwa mereka adalah suku-suku bangsa yang telah memiliki budaya dan peradaban. Masing-masing memiliki kesadaran untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaannya dan menggunakannya sebagai acuan dalam menata kehidupannya. Dalam kondisi dijajah pun semua suku bangsa telah membuktikan mampu mempertahankan eksistensi budayanya masing-masing.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, selain masing-masing suku telah memiliki kesadaran budaya sukunya, juga mulai tumbuh kesadaran berbudaya bangsa. Yang dimaksud dengan kesadaran berbudaya bangsa adalah kesadaran dari masing-masing suku bangsa untuk tidak hanya mengenal kebudayaan sukunya, tetapi juga kebudayaan bangsa, bangsa Indonesia. Selama ini pembicaraan tentang kesadaran berbudaya bangsa cenderung kurang mendapatkan perhatian bila dibandingkan dengan kesadaran berbangsa. Mungkin karena masalah bangsa lebih memiliki nilai politis dan strategis dibandingkan dengan kebudayaan bangsa. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan menjadi penting dan masuk ke dalam perbincangan kesadaran berbangsa, karena dinilai memiliki nilai strategis dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menjadi salah satu butir dalam ikrar Sumpah Pemuda.

Kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa memiliki hubungan yang dekat. Bahkan hubungan itu dalam bentuk timbal balik. Tumbuhnya

kesadaran berbudaya bangsa tidak terlepas dari bangkitnya kesadaran berbangsa. Tetapi tidak salah jika dikatakan bahwa tumbuhnya kesadaran berbangsa karena didorong oleh kesadaran bahwa antara kebudayaan masing-masing suku memiliki unsur kemiripan atau kesamaan dalam hal ide, konsep dan sistem nilai serta perilaku, dan juga benda yang dihasilkan. Kemiripan atau kesamaan itu menumbuhkan solidaritas di antara suku bangsa dan dari sana tumbuh kesadaran berbangsa. Dalam kaitan antara tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa di kalangan masyarakat suku-suku bangsa, ada tiga makna yang menarik untuk dicatat.

Pertama, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna tumbuhnya kerelaan dan keikhlasan suku bangsa untuk menjadi bagian dari bangsa. Lahirnya kesadaran untuk menjadi satu ikatan “satu bangsa” itu mencerminkan betapa dalamnya keikhlasan masing-masing suku bangsa untuk mengubah statusnya dari suku bangsa menjadi bangsa. Kenaikan status itu (menjadi bangsa), membawa perubahan yang sangat mendasar dalam hal kerangka berpikir (paradigma) masyarakat. Kerangka berpikir kesukubangsaan yang telah berkembang berabad-abad tiba-tiba harus berubah atau lebih tepat bertambah atau meningkat menjadi kerangka berpikir kebangsaan. Peningkatan itu bukan berarti mengabaikan pola pikir kesukubangsaan melainkan justru pola pikir itu memperkaya dan memperluas kerangka pikir kebangsaan.

Di dalam proses menjadi bangsa itu, di samping banyak elemen kesukubangsaan yang harus diselaraskan dengan kehadiran elemen kebangsaan, tidak sedikit elemen kesukubangsaan yang meningkat statusnya menjadi elemen kebangsaan. Singkatnya, sebagai konsekuensi dari perubahan itu masyarakat tidak hanya menggunakan kebudayaan suku bangsa sebagai acuan dalam menata kehidupan kesukubangsaan, tetapi juga menggunakan kebudayaan kebangsaan sebagai garis acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping bahwa masyarakat menggunakan sistem budaya suku bangsa, masyarakat juga akan menggunakan sistem budaya kebangsaan (nasional), bahkan ditambah dengan yang berskala internasional .

Pada bagian lain, ikatan kesukubangsaan yang telah terbangun berabad-abad tentu tidak seharusnya menjadi renggang karena terjadi perluasan persaudaraan

dalam ikatan kebangsaan. Mereka tetap dapat hidup dalam kelompok suku bangsanya dan masing-masing mempertahankan kebudayaannya. Kebudayaan suku bangsa telah lebih dulu ada, sebelum adanya kebudayaan bangsa. Kebudayaan suku bangsa akan tetap ada selama bangsa Indonesia ada. Juga, kebudayaan suku bangsa akan tetap ada meskipun misalnya bangsa Indonesia karena sesuatu hal menjadi tidak ada.

Salah satu peristiwa sejarah yang menunjukkan adanya keikhlasan dari suku-suku bangsa untuk mengubah pola pikir lokal menjadi nasional adalah saat-saat menerima bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dalam pergaulan bangsa. Patut dicatat, berdasarkan data pemakaian bahasa suku bangsa (tahun 1930), bahwa pemakai bahasa Melayu jauh lebih sedikit dibanding dengan bahasa suku yang lain. Bahasa Jawa dipakai oleh 27.808.623 jiwa atau 47,02%, bahasa Sunda dipakai oleh 8.594.834 jiwa atau 14,53%, dibanding dengan pemakai bahasa Melayu Riau sebanyak 1.988.648 orang atau hanya 4,97% dibandingkan dengan jumlah penduduk Nusantara (Slametmulyana, 1966:12).

Kedua, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai bentuk “perlawanan budaya”. Yang dilawan adalah kebudayaan penjajah dalam arti luas. Meskipun kebudayaan penjajah lebih berkembang di daerah perkotaan, tetapi karena didukung oleh kekuasaan, dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan sebagai bangsa terjajah, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan kesukubangsaannya, apalagi kebangsaannya secara bebas. Kebudayaan yang pada hakikatnya bersifat dinamis selalu berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan, akan tetapi dimandulkan oleh berbagai tindakan pengekangan oleh bangsa penjajah.

Salah satu contoh adalah soal pemakaian bahasa. Pemerintah Belanda berupaya keras untuk menjauhkan para pelajar dari pemakaian bahasa Melayu dengan alasan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, Belanda dengan sengaja memberikan peluang besar bagi orang bumiputra yang pandai berbahasa Belanda untuk maju dan mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan. Pemaksaan pemakaian bahasa Belanda merupakan bentuk penjajahan budaya yang perlu diimbangi dengan perlawanan budaya, dalam bentuk upaya membangkitkan kesadaran kejayaan budaya suku bangsa atau

bangsa yang diwariskan nenek moyang.

Salah seorang pendiri bangsa yang menentang pemakaian bahasa Belanda di lembaga pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Dalam sebuah tulisannya yang dimuat dalam majalah *Hindia Putra* pada 1916–1917 Ki Hadjar (1994:111) menyatakan: “... maka tibalah juga waktunya di mana satu bahasa bumiputra terpenting akan menggantikan kedudukan bahasa Belanda dan di semua sekolah Hindia, bahasa Belanda akan dipelajari sebagai bahasa asing yang diperlukan.”

Pada akhirnya penjajah menyadari bahwa memaksakan penggunaan bahasa Belanda justru merugikan bagi kepentingan politiknya. Diperlukan bahasa suku bangsa yang dapat menjadi bahasa pergaulan (*lingua franca*) baik dalam hubungan antarsuku maupun dengan pemerintah Hindia Belanda. Belanda lebih sering menggunakan bahasa Melayu Riau sebagai pilihan. Sebagai contoh, buku panduan pariwisata yang terbit pada 1786 dan ditulis oleh Johannes Hofhout untuk para pegawai VOC yang baru tiba di Batavia, di samping memuat informasi tentang keindahan daerah Cipanas dan peringatan (*travel warning*) tentang berbahayanya penyakit tropis dan perdagangan barang-barang terlarang, juga berisi daftar kata-kata bahasa Melayu yang berguna dalam percakapan sederhana (Denys Lombard, 2000:50).

Langkah lain yang dibuat Belanda adalah ketika menyetujui penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kerja Dewan Rakyat. Penetapan itu merupakan keberhasilan “perlawanan budaya” kaum terpelajar dalam bentuk pemanfaatan lembaga yang terhormat itu untuk memperkuat kesadaran budaya bangsa. Penetapan itu secara tidak langsung melempangkan jalan menuju terwujudnya bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia.

Ketiga, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai kesadaran akan nasib kebudayaannya—baik kebudayaan bangsa maupun suku bangsa—untuk arah ke depan. Pengakuan terhadap kehadiran kebudayaan bangsa membawa konsekuensi terhadap eksistensi kebudayaan suku bangsa dan sebaliknya. Semangat kehidupan sebagai anggota suku bangsa tidak boleh padam karena pergeseran posisi menjadi anggota bangsa. Pergeseran itu justru harus menjadi pendorong tumbuhnya kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai budaya suku bangsa dalam kerangka kebangsaan. Oleh karena itu, demi tumbuhnya

kesadaran berbudaya lokal dan nasional dalam bingkai “satu bangsa” yang multietnik, multikultur, dan multimental seperti Indonesia, perlu ada pola pengasuhan dan pembimbingan yang terus-menerus agar aspirasi untuk tetap menjunjung nilai-nilai budaya masing-masing dapat tersalurkan secara positif. Menurut Prof. Dr Daoed Joesoef, “Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh, dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam (Munadjat Danusaputro, 1983:238).” Untuk mewujudkan peran itu diperlukan adanya suatu konsep, kebijakan, dan strategi yang dapat melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan keberadaan kebudayaan suku bangsa maupun kebudayaan bangsa.

Kongres Kebudayaan Tonggak Sejarah Budaya Bangsa

Untuk menggenapi dan menyempurnakan kesadaran berkebangsaan Indonesia yang dirintis oleh BO itu ternyata diperlukan waktu cukup lama, 20 tahun. Sebagai kulminasi gerakan angkatan 1908 itu, pada 28 Oktober 1928 tampil satu gerakan budaya di Batavia, lagi-lagi digerakkan oleh sekumpulan kaum muda terpelajar, yang disebut “Soempah Pemoeda”. Melalui ikrar bersama itu mereka menyatakan tekad berupa pilihan kesatuan wilayah (bertumpah darah satu), pilihan kesatuan politik (berbangsa satu), dan pilihan kesatuan budaya (menjunjung tinggi bahasa persatuan)—yang semuanya disebut “Indonesia” (*Kompas*, 19/05/12).

Peristiwa 1908 dan 1928 itu sekarang diakui sebagai dua tonggak dalam sejarah pematangan wawasan kebangsaan dan wawasan budaya bangsa. Peristiwa yang terjadi pada 1908 dan 1928 yang dilakukan oleh kaum bumiputra terpelajar itu oleh Daoed Joesoef disebut sebagai gerakan kebangkitan bangsa dan “gerakan kebudayaan” menuju ke arah kemerdekaan nasional. Tetapi, selain dua peristiwa itu ada satu peristiwa lagi yang juga patut disebut sebagai “gerakan kebudayaan”, yaitu diselenggarakannya Kongres Kebudayaan pada 1918, tepat sepuluh tahun setelah BO berdiri dan sepuluh tahun sebelum Sumpah pemuda diselenggarakan.

Sebagaimana telah dipaparkan pada Volume I, pada 1918 melayang sepucuk

surat dari Batavia menuju pimpinan BO cabang Surakarta. Surat itu berisi perintah agar BO menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Setelah membaca surat itu, Mangkunegoro VII menolak dan mengusulkan agar diselenggarakan kongres kebudayaan saja. Usul itu didukung oleh kaum terpelajar bumiputra yang lain, sementara pemerintah Belanda menyerah dan membiarkan kaum terpelajar itu menentukan pilihannya.

Keputusan kaum terpelajar untuk mengganti kongres bahasa menjadi kongres kebudayaan, menurut hemat saya, memiliki arti yang amat penting, mendasar, dan pantas disebut sebagai tonggak kebangkitan kesadaran terhadap nasib kebudayaan (bangsa) di masa depan. Kebulatan tekad itu dapat menjadi kenyataan dengan diselenggarakannya KK pertama dengan nama *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* pada 5 Juli 1918 di Kepatihan Mangkunegara, Surakarta. Munculnya inisiatif itu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya kesadaran berbangsa. Tumbuhnya kesadaran berbangsa berjalan seiring dengan kesadaran masa depan kebudayaan bangsanya.

Selama ini perhatian orang terhadap KK sebelum Indonesia merdeka tidak sebesar perhatian orang terhadap KK sesudah Indonesia merdeka dan kongres-kongres lain yang sama-sama diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka seperti: Kongres Boedi Oetomo (BO) 1908, Kongres Pemuda 1926 dan 1928, Kongres Perempuan 1928, dan Kongres Bahasa 1938. Kongres-kongres itu tercatat sebagai peristiwa sejarah dan menjadi monumental hingga sekarang. Sementara itu, KK sebelum Indonesia merdeka yang hasil-hasilnya terbukti menjadi penentu arah pengembangan kebudayaan bangsa, dalam buku-buku sejarah hampir tidak tercatat sebagai bagian dari sejarah kebudayaan bangsa. Banyak orang termasuk kalangan seniman, budayawan, maupun ahli kebudayaan tidak mengetahui bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka kaum terpelajar bumiputra juga sudah berpikir tentang hari depan kebudayaan bangsanya.

Banyak keputusan kongres yang memiliki makna strategis dan politis, sehingga jejak realisasinya masih membekas hingga sekarang. Keputusan Pangeran Prangwadono untuk lebih baik memilih menyelenggarakan KK dan menolak instruksi Batavia untuk menyelenggarakan kongres bahasa merupakan langkah yang berani. Langkah bersejarah itu telah menjadi motor penggerak

diselenggarakan kongres-kongres kebudayaan berikutnya hingga sekarang, yang jumlahnya telah ratusan kali.

Pokok-pokok pikiran yang lahir dari kongres 1918 dan seterusnya banyak yang terbukti telah menjadi landasan dalam membangun solidaritas dan mengembangkan kebudayaan bangsa hingga sekarang. Kenyataan sebagai bangsa majemuk (multietnik) dan memiliki budaya beranekaragam (multikultur) menjadi sumber inspirasi dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemajemukan telah menumbuhkan hasrat, semangat, dan inspirasi untuk mewujudkan kebudayaan bersama, menjadi milik bersama, menuju pada terwujudnya kebudayaan Indonesia “yang timbul dari buah usaha budinya rakyat (suku) Indonesia”, yang kemudian dibingkai dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Konsep bangsa dan kebudayaan majemuk dibahas dalam kongres 1918. Kalau perbincangan itu hanya mengenai kebudayaan Jawa saja mereka menilai terlalu sempit. Dalam kongres kedua pada 1919 masalah diperlebar, mencakup kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Diskusi melebar lagi ke masalah kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia. Mereka sepakat untuk memajukan kebudayaan bangsa; juga mutu sumber daya manusia sebagai pendukung kebudayaan ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan peran pendidikan dalam proses pembudayaan (KK 1918). Anak-anak bumiputra perlu diberi pelajaran sejarah bangsa, arsitektur, bahasa, sastra, filsafat, musik tradisional, tari, sandiwara (tonil), dan kerajinan (besi, perak, emas, kayu, tenun, bambu, kulit, dll). Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir (*mindset*) masyarakat suku bangsa, terutama pandangan sebagai bangsa kuli (terjajah) menjadi bangsa yang merdeka dan berkepribadian serta dari pola pikir kehidupan bersuku-suku menuju ke arah kehidupan satu bangsa. Mari kita simak cuplikan dari sekian banyak pandangan pemakalah pada KK sebelum Indonesia mereka.

Dr. Satiman, sebagai salah satu pemakalah pada KK 1918 menyatakan bahwa: “Pertemuan peradaban Barat dan Timur harus saling membagi keduanya. Perjuangan hanya dapat dicapai melalui ‘peperangan’ antara kemampuan intelektual dan oleh karena itu kemampuan intelektual kita harus dibuat sama dengan intelektual Eropa.” Pandangan seperti ini jelas memiliki pengaruh besar terhadap upaya menumbuhkan semangat menjadi sebuah bangsa baru

yang maju. Selanjutnya, pemakalah yang lain, yakni RM Sutatmo (KK 1918), menegaskan tentang konsep memajukan kebudayaan bangsa melalui strategi membuka peluang lahirnya perubahan dengan tetap memelihara, menjaga, dan mempertahankan kebudayaan yang kita miliki. Ia menyatakan: “Perlu mempertahankan keberadaan kita dan memberikan jiwa baru untuk memajukan kebudayaan kita.”

Bagaimana dengan pendapat Dr Radjiman? Sebagai orang Jawa, ia berpendapat, “Jika pribumi dipisahkan sepenuhnya secara paksa dari masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara dua peradaban.” Selain itu, Radjiman juga menyinggung masalah penyelenggaraan pendidikan kepada kaum bumiputra. Menurut Radjiman, pendidikan harus berlangsung serasi dalam bentuk penanaman nilai etika dan estetika, dan harus memerhatikan dasar adat istiadat bangsa. Pandangan ini masih tetap aktual hingga kini dan menjadi dasar dalam penyusunan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan *kebudayaan nasional Indonesia* serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”

Tak diragukan lagi bahwa para peserta kongres diliputi oleh semangat kesadaran berbangsa. Sastrowidjono selaku ketua panitia kongres mengatakan: “... telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi.” Perdebatan juga mengarah pada upaya perlindungan kebudayaan agar kebudayaan tidak mengalami kerusakan dan kemusnahan (KK 1924). Perlindungan diarahkan pada kebudayaan yang bersifat benda (*tangible*) maupun yang bersifat nonbenda (*intangible*). Hal ini tergambar pada perbincangan mereka tentang nilai-nilai (tata krama), seni musik, keutuhan berbagai bangunan kuno, situs purbakala, arsitektur, alat-alat kesenian, hasil kerajinan, bahasa daerah, hingga sistem keluarga dan adat. Melalui kongres mereka merintis berdirinya lembaga penelitian kebudayaan Java-Instituut (KK 1918), berbagai museum, sekolah seni kerajinan tangan (Kunst Ambachtsschool), serta jurusan

sastra, filsafat, dan budaya Timur (KK 1929) seperti yang ada hingga sekarang.

Untuk melindungi benda peninggalan sejarah dan purbakala, atas inisiatif PAJ Moojen, disusun Monumenten Ordonantie (MO) Stbl. 238 Tahun 1931 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan direvisi lagi menjadi UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sementara itu pemakalah Soejono pada KK 1929 meminta: "... agar Pemerintah mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala sekolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia." Nilai penting KK sebelum Indonesia merdeka adalah pendapat Ki Hadjar Dewantara tentang bagaimana menyikapi hubungan antara kebudayaan bangsa dan kebudayaan asing. Ki Hajar menyatakan pendapatnya bahwa terhadap kebudayaan asing sebaiknya kita "tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing" asal bahan-bahan itu dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Pendapat Ki Hadjar ini akhirnya dipilih sebagai bagian penjelasan Pasal 32 UUD 1945.

Bagaimana dengan para pemakalah yang berasal dari Belanda? Untuk ukuran saat itu, pandangan mereka sungguh luar biasa. Selaku pemakalah (KK 1918), Muhlenfeld paling tidak telah menyumbangkan dua pemikiran penting dan mendasar bagi bangsa Indonesia. Ia antara lain mengatakan: "Untuk membangkitkan kesadaran terhadap kebudayaan sendiri itu ke seluruh wilayah, maka pengajaran dan pengkajian sejarah bangsa merupakan sarana yang terbaik, terkuat, dan terpenting." Di samping itu, ia juga menegaskan, "Untuk sebuah 'natie' dan individu, tuntutan pertama adalah mengenal dirinya sendiri sehingga mereka memiliki perangai, karakter, dan mendapatkan kembali rasa percaya diri setelah kehilangan selama berabad-abad."

Bukankah pandangan orang Belanda seperti ini sangat patut dijadikan catatan tersendiri bagi lahirnya sebuah bangsa baru, Indonesia? Pandangan yang lain datang dari kalangan Birokrat pemerintah Hindia Belanda. Ia adalah Walikota Surabaya dan Bandung selaku tuan rumah kongres. Selaku Walikota Bandung, SA Reitsma (KK 1921) menyatakan, "perlu langkah pembentukan dan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang dalam keadaan tertindas, akan dihidupkan kembali berkembang di daerah-daerah". Sementara itu, Dijkerman sebagai

Walikota Surabaya (KK 1926) menyatakan, “seni akan berkembang kuat apabila bangsa itu sedang dalam kondisi kuat, dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyadarkan suku bangsa Indonesia” untuk menjadi bangsa yang kuat. Ilmuwan Belanda lain yang menyampaikan pandangannya adalah Dr. F.D.K. Bosch, Kepala Oudheidkundige Dienst/Lembaga Purbakala (KK 1924), Dr. G.W.J. Drewes, Dr. S.J. Esser, L. van Rijckevorsel (1929), dan Ir. P.H.W. Sitsen (1937). Dalam kongres itu Bosch menegaskan tentang pentingnya pelestarian peninggalan purbakala untuk masa saat itu dan yang akan datang; Drewes, Esser, L. van Rijckevorsel menekankan tentang perlunya pengajaran kesusastraan Timur di perguruan tinggi yang kemudian direalisasikan dengan berdirinya Sekolah Kerajinan (Kunst Ambacht School), yang mendorong berdiri Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), Fakultas Sastra dan Filsafat dengan jurusan-jurusan: Sastra, Sejarah, dan Filsafat yang masih tetap ada hingga sekarang. Sementara itu Sitsen menyampaikan pendapat tentang pentingnya mengembangkan seni kerajinan Bali, perlunya mendirikan museum kerajinan dan Bali Instituut, serta pemanfaatan budaya untuk pengembangan pariwisata di Bali.

Petikan sebagian kecil pokok-pokok pikiran kongres sebelum Indonesia merdeka seperti di atas menunjukkan betapa luasnya pandangan dan jauhnya jangkauan pemikiran para peserta kongres. Mereka pantas disebut sebagai peletak dasar konsep, kebijakan, dan strategi dalam berbangsa dan berbudaya bangsa di zaman Indonesia merdeka ini. KK sebelum Indonesia merdeka, terutama KK 1918, tidak hanya membahas masalah kebudayaan Jawa saja, seperti yang dikesankan oleh sebagian orang. Peristiwa itu pantas dijadikan tonggak sejarah kongres kebudayaan di Indonesia dan penggalan penting bagi sejarah kebudayaan Indonesia.

Gambaran singkat tentang betapa erat hubungan peristiwa budaya mulai dari lahirnya BO (1908), disusul oleh lahirnya KK pertama (1918), dan sebagai klimaksnya dimanifestasikan dalam bentuk ikrar atau Sumpah Pemuda (1928) menunjukkan betapa besar perhatian kaum terpelajar bumiputra terhadap kemajuan kebudayaan bangsa. Peristiwa bersejarah itu tidak hanya digerakkan oleh “orang kuasa” (*man of power*) tetapi lebih banyak digerakkan oleh semangat yang dimiliki oleh “orang budaya” (*man of culture*). Sejumlah “orang budaya” dan

sejumlah “orang kuasa” yang mau melibatkan diri pada kegiatan itu pastilah orang-orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap masa depan kebudayaan bangsanya. Oleh karena itu, ketiga peristiwa itu tidak hanya merupakan peristiwa sejarah politik bangsa, tetapi juga merupakan peristiwa sejarah budaya bangsa. Bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai lahirnya “manifes kebudayaan” pada zaman kita sedang dijajah.

Tetapi, di balik itu ada pandangan lain yang berbeda. Dalam jumpa pers menjelang diselenggarakannya seminar kebudayaan bertajuk “Dinamika Kebudayaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, 5 Juli 2007 di Balai Kartini, oleh Ketua Seminar Ir. Luluk Sumiarso (Penasihat Paguyuban Puspo Budhoyo) diinformasikan bahwa ada sebagian orang yang tidak setuju jika Kongres Kebudayaan (KK) 5 Juli 1918 disebut sebagai awal KK Indonesia dan sebagai tonggak sejarah kebudayaan bangsa. Mereka juga menolak usul tanggal diselenggarakannya KK pertama (5 Juli) menjadi Hari Kebudayaan Bangsa Indonesia. Mereka menilai KK itu hanya merupakan KK Jawa saja. Konon berita tentang kongres yang “hanya Jawa” itu sampai juga pada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Mengenai pendapat yang menyatakan tidak setuju jika 5 Juli dipilih menjadi Hari Kebudayaan Bangsa dapat dipahami, karena masih banyak peristiwa budaya penting lain untuk dijadikan pilihan. Tetapi mengenai pandangan yang menyatakan bahwa KK 1918 (sebelum Indonesia merdeka) hanya KK Jawa semata (dalam arti sempit dan bernada anti-Jawa), sangat perlu untuk diluruskan guna mencegah menjalarnya virus kesalahpahaman.

Pandangan seperti itu sebenarnya sudah muncul sejak KK 2003 di Bukittinggi. Setelah saya menyajikan makalah berjudul “KK Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka: Tinjauan dari Segi Konsep, Kebijakan, dan strategi”, harian *Republika*, (26/10/03) menurunkan tulisan dengan judul “Kongres Kebudayaan, Sebuah Langkah Patah-patah”. Di dalamnya disebutkan bahwa peristiwa KK yang diselenggarakan selama ini merupakan sebuah ironi. Bunyi berita selengkapannya adalah sebagai berikut:

“Inilah ironi yang terjadi dalam perjalanan Kongres Kebudayaan yang beberapa hari

lalu (19–22 Oktober) digelar di Bukittinggi, Sumatra Barat. Sebelum kemerdekaan, dalam waktu 19 tahun, Indonesia (baca: Jawa) melaksanakan tujuh kali kongres. Setelah merdeka, dalam rentang 55 tahun, hanya lima kali. Selama 85 tahun telah terlaksana 12 kali KK, lebih dari separuh bicara soal kebudayaan Jawa.”

Pada bagian lain edisi yang sama, *Republika* menulis:

“Telah menjadi kenyataan bahwa KK di Indonesia didominasi Jawa. KK sebelum kemerdekaan adalah KK Jawa dan setelah kemerdekaan setali tiga uang. Jika ingin melabelinya dengan KK Indonesia, maka hal itu hanya bisa dilekatkan pada KK IV tahun 1991, meski di sana, dominasi masih dipegang oleh utusan dari Pulau Jawa (Republika, 26/10/03).”

Sepintas pandangan seperti ini memang tidak salah, karena senyatanya kongres 1918 diberi judul KK Jawa, digagas oleh orang Jawa, dan diselenggarakan oleh kaum terpelajar Jawa, berlokasi di tanah Jawa. Tetapi amatlah dangkal jika pandangan seperti itu hanya didasarkan pada alasan-alasan di atas. Bicara soal Jawa, pendirian BO tanggal 20 Mei 1908 juga memiliki latar belakang sejarah yang sama dengan KK tersebut. Tanggal 20 Mei telah diakui sebagai awal tumbuhnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh cendekiawan bumiputra (kebanyakan Jawa) dan bersemi di Surakarta (Jawa). Juga tidak tepat apabila pandangan itu hanya didasarkan pada label kongres, yakni KK Jawa. Dalam kenyataan, yang memulai untuk menyelenggarakan kongres adalah Jawa. Jika ada KK yang lain yang diselenggarakan oleh non-Jawa seperti misalnya: KK Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Sasak, Ambon, atau yang lain, pastilah peristiwa itu akan dicatat dan mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang sama sebagai bagian dari sejarah perjalanan kebudayaan kita.


Tentu amatlah berlebihan jika dituntut adanya suatu kongres itu dapat diakui sebagai KK Indonesia jika tidak menggunakan label KK suku bangsa Jawa. Lebih-lebih jika dituntut harus berlabel KK Indonesia, sebuah persyaratan seperti itu tentu tidak mungkin terpenuhi, karena pada saat itu (1918) kondisi kita sedang menjadi bangsa terjajah dan bangsa Indonesia itu sendiri belum lahir. Pemerintah Belanda pasti akan melarang bila kongres saat itu berlabel

“Indonesia”. Sebagaimana dipaparkan pada Volume I Bab II, pada KK 1919 telah terjadi perubahan yang mendasar berupa perluasan bidang budaya yang dibahas. Tidak hanya semata-mata membahas kebudayaan Jawa saja tetapi juga kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Bahkan sejak KK 1918 pokok bahasan sudah menyebut kebudayaan Indonesia.

Bagian penting yang perlu disimak bukanlah terletak pada masalah label kongres saja, tetapi juga masalah isi dan materi yang diperbincangkan dalam kongres itu. Apakah dari kongres-kongres itu mampu menghasilkan konsep, kebijakan, maupun strategi untuk memajukan kebudayaan suku bangsa dan menumbuhkan kesadaran berbangsa atau sebaliknya, kongres itu malahan menghasilkan konsep, kebijakan, dan strategi yang memberi peluang masuknya pengaruh kebudayaan penjajah terhadap kebudayaan bangsa?

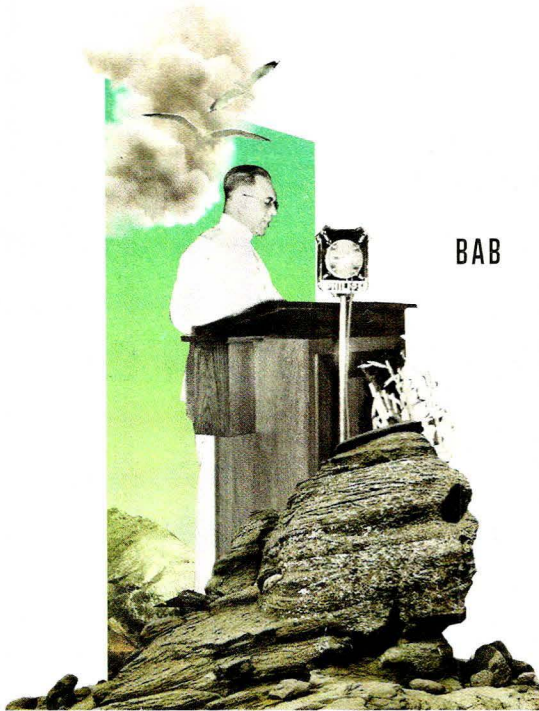
Untuk menutup paparan ini, perlu disitirkan lagi pendapat Samuel Koperberg, bahwa kongres kebudayaan sebelum Indonesia merdeka bertujuan mengembangkan kebudayaan sebagai alat untuk memperkuat kepribadian bangsa ke depan. Kongres kebudayaan juga merupakan salah satu media untuk kebangunan kebudayaan dan menjadi unsur penting dalam renaissans orang Jawa. Pendirian itu dituangkan dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada Sutan Sjahrir tertanggal 17 Agustus 1946, yang berbunyi antara lain: “... tujuan utama saya adalah kebangunan kebudayaan sebagai unsur penting dalam renaissans orang Jawa (Jaap Erkelens, 2001: 13).”





“Jika pribumi
dipisahkan
sepenuhnya secara
paksa dari masa
lalunya, yang akan
terbentuk adalah
manusia tanpa akar,
tak berkelas, tersesat
di antara dua
peradaban.”

Dr Radjiman



BAB

05

PENUTUP

Seratus tahun perjalanan sejarah Kongres Kebudayaan di Indonesia bukanlah perjalanan yang singkat. Perjalanan panjang yang penuh dinamika dan sarat ragam gagasan, kebijakan, dan strategi pemajuan kebudayaan bangsa. Semua patut dijadikan bahan renungan dan sumber inspirasi untuk merancang langkah pemajuan kebudayaan, kebangsaan, dan peradaban Indonesia masa mendatang.

Sebagaimana diuraikan di bagian awal, untuk membangkitkan rasa kebangsaan/nasionalisme menuju bangsa merdeka yang bebas dari cengkeraman penjajah Belanda, kaum terpelajar bumiputra atau priyayi terpelajar tidak hanya menyelenggarakan Kongres Boedi Oetomo/BO, Kongres Pemuda, Kongres Perempuan, Kongres Bahasa, Kongres Sarikat Islam, tetapi juga Kongres Kebudayaan/KK. Dimotori oleh kaum terpelajar

bumiputra yang bernaung dalam perkumpulan BO, pada 1918 mereka bersepakat untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Jawa dan bukan Kongres Bahasa Jawa seperti yang diusulkan oleh Batavia. Melalui kongres itu, segala masalah yang berkaitan dengan konsep, kebijakan, strategi, program, kelembagaan, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kebudayaan diperdebatkan, disimpulkan, disepakati, dan dilaksanakan bersama.

KK pertama 1918 merupakan peristiwa budaya yang amat penting bagi bangsa Indonesia yang lahir sebagai komunitas yang multietnik, multikultur, dan multimental. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa (\pm 500 suku bangsa), beraneka penutur bahasa (\pm 750 bahasa daerah dan dialek), bermacam-macam budaya dan adat istiadat. Indonesia disebut bangsa multimental karena mendapat pengaruh dari berbagai macam agama (Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam), dari berbagai bangsa dari segala penjuru benua (India, Arab, Cina, Jepang, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dll). Bangsa yang serba-multi ini bersepakat menyatukan diri menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.

KK 1918 yang muncul dan terselenggara pada era kolonial Belanda tidak berjalan mudah dan serba-mulus. Takashi Shiraishi mengungkapkan, gagasan menyelenggarakan KK 1918 bersumber dari dua pihak. *Pertama*, beberapa bulan sebelum pembukaan Volksraad, seorang teosof terkenal bernama D. van Hinloopen Labberton menyampaikan usulan pemerintah Batavia agar BO cabang Surakarta menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Usulan ini dilengkapi arahan susunan panitia yang terdiri atas Pangeran Mangkoenegoro VII sebagai ketua serta Dr. Hoesein Djajadiningrat, Dr. F.D.K. Bosch, dan Dr. B. Schrieke sebagai anggota. *Kedua*, BO cabang Surakarta memang punya rencana menyelenggarakan kongres untuk membahas masalah kebudayaan—bukan kongres bahasa. Merespons perkembangan yang terjadi, pemerintah Belanda membiarkan kaum terpelajar bumiputra meneruskan rencana mereka (Shiraishi: 1981:97).

Dalam rapat persiapan penyelenggaraan, terjadi perdebatan yang cukup seru tentang apakah kehadiran para intelektual Eropa diperlukan. Semula kehadiran mereka dapat diterima sebagai panitia penasihat kongres saja. Tetapi, pada rapat kedua, sejumlah peserta rapat menolak kehadiran mereka dengan alasan

bahwa urusan kebudayaan adalah urusan kaum bumiputra dan bukan urusan bangsa Belanda. Setelah menemui jalan buntu, Pangeran Prangwadono tampil memberikan penjelasan dan akhirnya disetujui bahwa mereka boleh terlibat dalam kongres hanya sebagai penasihat. Namun, dalam perkembangan, mereka justru diterima tidak hanya sebagai penasihat tetapi pemrasaran.

Perdebatan seru berikutnya terjadi tatkala menentukan tema kongres. Terjadi adu argumentasi apakah kebudayaan atau pendidikan yang akan dijadikan topik utama kongres. Di satu pihak dr Radjiman bersikeras menghendaki bahwa materi yang dibahas adalah pendidikan kebudayaan yang menitikberatkan pada pendidikan kebudayaan Jawa asli. Sementara R. Sastrowidjono mengusulkan agar membahas masalah pendidikan kebudayaan yang berorientasi ke Barat. Karena tidak ditemukan kesepakatan, Pangeran Prangwadono kembali tampil. Ia menegaskan bahwa kondisi kebudayaan Jawa sekarang banyak terpengaruh kebudayaan luar termasuk dari Barat; di samping itu, masyarakat yang masih terbelakang sangat memerlukan pendidikan, baik itu pendidikan kebudayaan Timur maupun Barat. Akhirnya dicapai kompromi, tema yang dibahas adalah bagaimana mengembangkan kebudayaan Jawa (Wasino, 1994: 252–253).

Perdebatan ini mencerminkan betapa serius kaum terpelajar menyiapkan kongres. Kelihatan pula bahwa mereka punya kepekaan membaca kondisi masyarakat. Seiring pertumbuhan kesadaran untuk hidup dalam ikatan satu bangsa, tumbuh pula kesadaran akan urgensi untuk menata pola pikir demi melepaskan diri dari krisis kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat terjajah.

KK 1918 berlangsung secara sederhana bila dilihat dari sisi konsep, materi, tujuan, peserta, dan penyelenggaraannya. Tetapi peristiwa ini sepatutnya diposisikan sebagai langkah awal yang luar biasa, karena diselenggarakan di tengah suasana kehidupan masyarakat yang sedang mendapatkan tekanan baik secara lahir maupun batin oleh penjajah. KK 1918 juga menjadi istimewa karena diselenggarakan tepat di tengah-tengah dua peristiwa yang sangat bersejarah bagi kelahiran bangsa Indonesia. *Pertama*, kebangkitan nasional Indonesia yang ditandai oleh kelahiran BO pada 20 Mei 1908. *Kedua*, Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928 atau lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Kedua

peristiwa ini bukan hanya peristiwa sejarah bangsa tetapi juga peristiwa budaya yang bernilai sejarah.

Untuk menggalang kesadaran menjadi satu bangsa, para pendiri BO menggunakan pendekatan budaya sebagai strategi. Ketika memulai langkah penggalangan, dr Radjiman memilih filsafat dan budaya sebagai media yang paling halus untuk berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran-pikirannya, melalui ceramah dan tulisan-tulisannya. Dengan menyebarkan isu tentang “kejayaan Jawa” dan dengan “menjabarkan akar filsafat dan sistem nilai budaya Jawa” rasa nasionalisme Jawa makin meningkat. Untuk mengubah pola pikir masyarakat Jawa sebagai bangsa terjajah agar bangkit percaya diri, dalam Kongres BO 1908 Radjiman mengatakan, “Orang Jawa tidak mungkin menjadi orang Belanda.” Kata-kata itu diulang kembali ketika bertemu dengan khalayak Belanda yang tergabung dalam Indisch Genootschap. Di samping itu Radjiman juga menegaskan: “Jika dipisahkan sepenuhnya dan secara paksa dari masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara dua peradaban (Lombard, 2000:236).” Di zaman itu, meski pendekatan yang digunakan masih tergolong halus (budaya), ungkapan Radjiman dapat dirasakan sebagai pemikiran yang cukup keras dan terbukti gemanya dapat membangkitkan rasa kebangsaan yang tinggi.

Peristiwa ini adalah peristiwa sejarah budaya yang memiliki nilai yang amat penting dan menjadi inspirasi bagi perjuangan di bidang kebudayaan selanjutnya. Di Sumatra, antara lain Sanusi Pane dan Muhammad Yamin tergerak untuk bergabung dalam barisan yang diberi nama “perlawanan budaya”. Demikian pula Soekarno secara terus-menerus mendengung-dengungkan konsep “kepribadian nasional”, “identitas nasional”, dan “berdikari di bidang kebudayaan”, dengan maksud melanjutkan dan mewujudkan cita-cita yang telah diletakkan oleh BO.

Yang juga menarik, dengan mengutip pendapat A. Nagazumi, Denys Lombard mencoba menggambarkan latar belakang kelahiran BO sebagai peristiwa kesadaran budaya. Antara lain ia menyebut bahwa kelahiran BO diilhami oleh kebanggaan pada tradisi dan warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka: “Perasaan memiliki warisan budaya terungkap lebih jelas lagi di kalangan anggota Boedi Oetomo, yang didirikan tahun 1908 oleh beberapa priyayi

yang ingin menjalin kembali hubungan dengan tradisi mereka.” Selanjutnya, Lombard (2000:327) menyatakan, “Kejawaaan merupakan titik temu reaksi-reaksi anti-Barat.”

Pendapat Nagazumi yang dikutip oleh Denys Lombard berasal dari bukunya yang berjudul *The Dawn of Indonesia Nasionalism: The Early Years of Budi Utomo 1908–1918*. Di samping itu, Nagazumi mengungkapkan sesuatu yang menarik ketika mencoba menjelaskan posisi BO di luar politik:

“... tidak pada tempatnyalah menilai Boedi Oetomo hanya dari aspek politik, berdasarkan penglihatan tiadanya pengikut massal pada organisasi itu seperti halnya Sarekat Islam, misalnya. Tidak dapat diremehkanlah pencapaian-pencapaian lain Boedi Oetomo yang juga pantas dicatat. Ia terbebas dari prasangka keagamaan dan kebakuan tradisionalisme; para anggotanya selalu terpacu untuk mengejar perkembangan intelektual, menolak kesetiaan membuta yang emosional dan tidak terjerumus pada sikap apatis terhadap hal-hal spiritual (Nagazumi, 1972:155–156).”

Terkait peristiwa kedua, ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada hakikatnya bukan hanya merupakan titik kulminasi tumbuhnya kesadaran berbangsa, tetapi juga kesadaran tentang masa depan kebudayaan bangsa. Peristiwa pengibaran bendera merah putih untuk pertama setelah bertahun-tahun tidak pernah dikibarkan, diikuti dengan menyanyikan bersama lagu “Indonesia Raya” karya W.R. Soepratman untuk yang pertama kali pula, kemudian disusul dengan pernyataan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, merupakan peristiwa budaya yang bersejarah. Setelah lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan pertama kali di hadapan peserta Kongres PNI 1929, lagu itu oleh Bung Karno untuk pertama kalinya disebut sebagai lagu kebangsaan—dan bertahan hingga sekarang. Bahkan kemudian kedudukan lagu kebangsaan, bendera merah putih, dan bahasa Indonesia menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadi satu ketentuan pokok dalam pasal UUD 1945.

Kelahiran BO 1908, penyelenggaraan KK 1918, dan ikrar Sumpah Pemuda 1928 itu tidak dapat dilepaskan dari tumbuhnya kesadaran budaya bangsa. Peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa sejarah budaya bangsa yang kemudian

menjadi sumber inspirasi bagi upaya pemajuan kebudayaan bangsa selanjutnya.

Dari gambaran singkat tentang hubungan erat ketiga peristiwa budaya itu, kelihatan betapa besar perhatian kaum terpelajar bumiputra terhadap kemajuan kebudayaan bangsa. Penyelenggaraan KK 1918 patut pula dicatat sebagai awal perjalanan sejarah KK di Indonesia. Peristiwa ini menjadi motor penggerak penyelenggaraan kongres-kongres berikutnya hingga sekarang. Rangkaian kongres yang berlangsung sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka, dilaksanakan oleh berbagai lembaga. Kongres 1918 dimotori oleh perkumpulan BO, kemudian diikuti oleh KK 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, dan 1937 yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian kebudayaan Java-Instituut. Sesudah Indonesia merdeka, KK yang berlangsung pada 1948 digagas oleh Pusat Kebudayaan Kedu yang kemudian diambil-alih oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia. Setelah berdiri Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN), KK 1951, 1954, 1957, dan 1960 diselenggarakan oleh lembaga ini.

Setelah mengalami masa vakum selama 30 tahun (1960–1991), KK 1991 diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya perubahan organisasi pemerintahan tahun 2000, bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, departemen inilah yang melanjutkan penyelenggaraan KK 2003 di Bukittinggi dan KK 2008 di Bogor. Sejak pemerintah mengambil prakarsa penyelenggaraan kongres pada 1991, selalu muncul kritik dari para seniman dan budayawan yang menyebut KK dengan aneka sebutan seperti: “rapat dinas” , “kongres Korpri”, “kongres para birokrat”, dll.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa forum kongres atau konferensi merupakan pilihan yang tepat sebagai ajang pertemuan untuk membahas dan menyepakati konsep, kebijakan, dan strategi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Kongres Kebudayaan 1918 diselenggarakan di pertengahan masa bangkitnya kesadaran nasional (1908) dan masa puncak kesadaran berbangsa yang diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda 1928. Seiring dengan bangkitnya kesadaran berbangsa, bangkit pula kesadaran kaum terpelajar terhadap nasib kebudayaannya. Pun sebaliknya, dengan bangkitnya kesadaran

tentang nasib kebudayaannya, dengan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan, semangat persatuan untuk menjadi satu bangsa makin diperkukuh. Dengan demikian, antara kesadaran berbudaya dan kesadaran berbangsa atau sebaliknya, memiliki hubungan timbal balik yang dekat.

Jarak waktu antara kongres sebelum dan sesudah Indonesia merdeka amat berjauhan, tetapi bila ditilik dari tujuannya kongres-kongres itu memiliki kesamaan. Sama-sama mencari format yang tepat untuk memajukan kebudayaan bangsa. Pandangan yang dilontarkan dalam Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka merupakan embrio lahirnya pemikiran tentang konsep, kebijakan, dan strategi pembinaan kebudayaan Indonesia masa kini.

Gambaran tema atau materi yang dibahas dari kongres ke kongres menunjukkan bahwa selalu ada hal penting yang perlu diperbincangkan. Demikian halnya dengan rumusan dan rekomendasi dari kongres-kongres yang telah dilaksanakan, sebagian telah ditindaklanjuti dengan langkah dan tindakan yang konkret, tetapi masih ada pula rumusan dan rekomendasi yang perlu mendapatkan pertimbangan untuk direalisasikan. Kongres-kongres itu memang telah lama sekali berlalu, tetapi berbagai pemikiran yang dirumuskan—apabila digali lebih dalam lagi—tidak tertutup kemungkinan memuat butir-butir yang berbobot dan bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan masa sekarang.

Sejak 1918 hingga 2018 memang sudah banyak kongres dan konferensi kebudayaan yang diselenggarakan, terhitung 283 kali. Tetapi, itu tidak berarti bahwa masalah kebudayaan sudah habis dikupas. Seperti kata Bung Hatta, seumur hidup soal kebudayaan tidak akan habis dikupas. Kebudayaan itu sesuatu yang hidup dan segala yang hidup, tumbuh dan berkembang serta senantiasa menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, di setiap kongres hampir selalu muncul pertanyaan: Ke mana arah kebudayaan kita? Pertanyaan serupa bisa jadi juga akan mencuat pada Kongres Kebudayaan 2018.

Jakarta, 11 Juli 2018.

Daftar Pustaka

- Erkelens, Jaap. 2001. *Java Instituut dalam Foto*. Jakarta: KITLV.
- Kratz, E. Ulrich. 2000. *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya III - Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nagazumi, Akira. 1989. *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908-1918*. Chiba: Institute of Developing Economy.
- Budaya*, September-Oktober 1954
- Indonesia*, 1-2-3, Thn. III: 414-415.
- Kompas*, 12 Oktober 2013
- Pikiran Rakyat*, 24 September 2005
- Republika*, 26 Oktober 2003

Tentang Penulis

Nunus Supardi bin Karsodimedjo lahir di Madiun, 19 Agustus 1943. Setelah lulus sekolah rakyat/SR (1956), sekolah guru bantu/SGB (1959), dan sekolah guru atas/SGA (1962) di kota kelahirannya, ia melanjutkan studi ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun. Ia memilih masuk Fakultas Keguruan, Sastra, dan Seni (FKSS) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan meraih gelar sarjana muda pada 1970. Nunus lantas menjadi asisten dosen merangkap Kepala Tata Usaha FKSS (1965–1973). Ia pindah ke Jakarta pada 1973.

Nunus menjadi staf di Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perjalanan kariernya di lembaga kebudayaan ini, antara lain sebagai Kepala Bagian Perencanaan (1985–1993), Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993–1999), dan Direktur Direktorat Purbakala (1999–2001). Setelah itu, ia dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari–14 November 2001). Sebelum memasuki purnabakti pada 2003, Nunus memangku jabatan sebagai Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, sebuah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND).

Di bidang kebudayaan, Nunus pernah menjabat Sekretaris Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan 1991 dan anggota Panitia Pengarah Kongres Kesenian Indonesia 1995 serta Kongres Kebudayaan 2003, 2008, dan 2013. Sejak 2009 hingga kini ia masih duduk sebagai anggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia. Selain itu, ia pernah ditugasi untuk menjadi Koordinator Penyelenggaraan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (Indonesia-Nihon Yukosai) di Jepang (1996–1997).

Setelah pensiun, Nunus masih aktif, baik sebagai Ketua I Badan Kerjasama Kesenian (BKKI) dan Ketua II Lingkar Budaya Indonesia (LBI). Ia juga salah satu pendiri Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Pada 2005–2008 ia menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF), kemudian mulai 2009 menjabat Wakil Ketua LSF 2009–sekarang. Pengalaman lain, namanya

tercatat sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan anggota Tim Ahli Panitia Nasional Pengangkatan Benda Isi Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Departemen Kelautan dan Perikanan (2004–2009). Juga menjadi salah satu anggota Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia (AFI) dan anggota Panitia Seleksi Film Edukatif Kultural pada 2012.

Sejumlah karya tulis yang sudah ia terbitkan, antara lain: *Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (1998); *Persahabatan Indonesia-Jepang* (1998); *Pedoman Merehabilitasi Gedung Bersejarah* (terjemahan, 2000); *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka* (2003); *Pendidikan Karakter Bangsa di Lingkungan Birokrasi* (Ketua Tim, 2004); *Kongres Kebudayaan 1918–2003* (edisi revisi, 2007); *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan di Pemerintahan dan Dinamikanya* (Ketua Tim, 2004); *Lima Tahun Otonomi Bidang Kebudayaan* (Ketua Tim, 2006); *Pendidikan Apresiasi Budaya di Lingkungan Pesantren* (Ketua Tim Peneliti, 2007); *50 Tahun Tugu Nasional/Monumen Nasional* (Ketua Tim, 2011); *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* (2013); *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918–2013* (2013); *Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia: Impian Lama yang Belum Terwujud* (2014); *Balai Budaya: Riwayatmu Dulu, Kini, dan Esok* (2015); *Seabad Sensor Gambar Idoep di Nusantara 1916–2016* (2016); *Melacak Jejak Direktur Jenderal Kebudayaan* (2016); *Deklarasi Hari Museum Indonesia* (2016); *Bela Budaya Buku I dan Buku II* (2017).

Beberapa artikel yang ia tulis terbit di berbagai media massa dan antologi, misalnya: *Ranah Ilmu Budaya* (2004); *Archaeology: Indonesian Perspective* (2006). Ia menjadi salah satu penulis buku *Kapal Karam: Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon* (2008); *Sejarah Permuseuman di Indonesia* (2011); *Indonesia dalam Arus Sejarah* (2011, sembilan jilid); *Sejarah Sensor Film di Indonesia* (2011); *Arkeologi untuk Publik* (2012); dan *77 Tahun Wardiman Djojonegoro* (2013). Selain itu, ia juga menjadi narasumber penulisan buku *Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945–2012* (2013).

Bianglala Budaya Jilid 1-5 merangkum perjalanan bangsa Indonesia dalam berkongres tentang bidang-bidang di bawah payung besar kebudayaan. Perjalanan ini bermula seratus tahun yang lalu, saat Indonesia belum merdeka, dan membuahkkan butir-butir pemikiran putra dan putri bangsa—mulai dari tentang kebudayaan itu sendiri hingga tentang Pancasila, masyarakat adat, ilmu pengetahuan, bahasa, sastra, dan banyak lagi.

Nunus Supardi, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993-1998), Direktur Purbakala (1998-2000), Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2000-2001), Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (2001-2003), tak henti mencurahkan perhatian terhadap kebudayaan selepas masa pensiunnya. Ia mengumpulkan data dan arsip yang menakjubkan tentang wajah Indonesia yang kurang mendapat perhatian khalayak. Wajah ini menggambarkan untaian upaya kolektif untuk merawat dan memajukan bangsa lewat kebudayaan, baik oleh kaum pergerakan era kolonial, para bapak pendiri bangsa, kalangan cendekia, budayawan, seniman, maupun lain-lain yang memiliki kepedulian. Bagi generasi kini dan nanti, buku ini menjadi pintu masuk menuju penjelajahan lebih jauh demi kemungkinan-kemungkinan baru untuk memajukan Indonesia.

